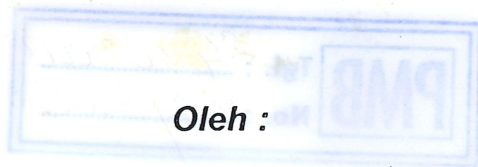


MOBILITAS PENDUDUK WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI KALIMANTAN TIMUR



Oleh :

**Aswatini Raharto
Suko Bandiyono
Bayu Setiawan
Eniarti Djohan
Herry Yogaswara**

Penyunting :

Aswatini Raharto

**PUSLITBANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
TAHUN 1997 / 1998**



PMB Tgl. 24-10-2008
No. 147/2008

KATA PENGANTAR

Daerah perbatasan termasuk daerah yang rawan karena merupakan pintu masuk orang dan barang serta merupakan tempat awal bertemunya pengaruh-pengaruh dari dua negara yang berbeda kepentingannya. Salah satu masalah kependudukan yang menonjol di daerah perbatasan adalah masalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ini tidak hanya menyangkut perpindahan fisik individu-individu melintasi batas, tetapi juga berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan di wilayah tersebut.

Pada beberapa wilayah perbatasan Indonesia, ketimpangan pembangunan di Indonesia dan negara tetangga menyebabkan penduduk wilayah perbatasan di Indonesia lebih berorientasi ke negara tetangga dalam berbagai aspek kehidupan. Keadaan ini akan meningkatkan arus mobilitas penduduk dari Indonesia ke negara tetangga, baik secara legal maupun ilegal. Keterkaitan antara mobilitas penduduk dengan permasalahan yang dihadapi wilayah perbatasan mendasari studi ini.

Studi ini merupakan rangkaian dalam kegiatan Studi masalah Kependudukan di Daerah Perbatasan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan dan Ketenagakerjaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI), yang dilakukan selama lima tahun dari tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 1998/1999. Penelitian dilakukan di Propinsi Sulawesi Utara, Timor Timur, Kalimantan Timur dan Irian Jaya. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah menghasilkan rekomendasi pengembangan konsep dan strategi alternatif pengembangan daerah perbatasan dari tinjauan sosio-demografis.

Dengan telah selesainya penulisan laporan ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi data dan pemikiran untuk para penyusun kebijaksanaan dan para perencana terutama Instansi Bappeda Tingkat I dan Bappeda Tingkat II, Instansi lain yang terkait serta para peneliti dan pemakai lainnya.

Terlaksananya kegiatan studi sampai selesainya penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Baik instansi pemerintah maupun swasta, di tingkat pusat maupun daerah, serta aparat dan masyarakat di daerah. Informasi dan bantuan yang diberikan sangat bermanfaat dalam melengkapi studi ini. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Drs. Bayu Setiawan sebagai pembaca akhir dari laporan ini.

Khusus kepada peneliti yang terlibat, yang telah bekerja keras menyelesaikan studi ini, kami ucapkan selamat. Demikian pula ucapan selamat ditujukan kepada staf administrasi dan para teknisi yang telah membantu menyelesaikan pelaksanaan kegiatan studi dan penulisan laporan ini.

Jakarta, Maret 1998

Kapuslitbang Kependudukan
Dan Ketenagakerjaan – LIPI

DR. Yulfita Raharjo, MA.
NIP.: 320000878

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Metodologi	6
1.3.1 Metode Penelitian	6
1.3.2 Pendekatan	7
1.4 Organisasi Penulisan	8
BAB II KONDISI DAERAH PERBATASAN INDONESIA MALAYSIA DI KALIMANTAN TIMUR	11
2.1 Propinsi Kalimantan Timur dan Wilayah Perbatasan	12
2.1.1 Geografi dan Struktur Pemerintahan	12
2.1.2 Sarana dan Prasarana	15
2.1.3 Penduduk	20
2.1.4 Latar Belakang Sejarah Penduduk Perbatasan	32
2.1.5 Ekonomi, Pola Kesempatan Kerja dan Hubungan Ekonomi dengan Negara Tetangga	36
2.2 Daerah Perbatasan di Daerah Tingkat II Bulungan	38
2.2.1 Geografi dan Struktur Pemerintahan	38
2.2.2 Gambaran Umum Beberapa Kecamatan di Perbatasan Pula Kalimantan Daratan	41
2.2.3 Kecamatan Perbatasan di Nunukan dan Sebatik: Dua Frontier Area	47

BAB III POLA MOBILITAS PENDUDUK	65
3.1 Sejarah Mobilitas	66
3.2 Pola Mobilitas Internal	71
3.3 Mobilitas Internasional	77
BAB IV PROSES MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN	87
4.1 Pengaturan Mobilitas Penduduk Lintas Batas	88
4.2 Proses Mobilitas Internal	99
4.3 Proses Mobilitas Internasional	103
BAB V DAMPAK MOBILITAS PENDUDUK	119
5.1 Dampak Mobilitas Penduduk Internal	120
5.1.1 Dampak Terhadap Daerah Perbatasan	120
5.1.2 Dampak Terhadap Individu dan Masyarakat	123
5.2 Dampak Mobilitas Penduduk Internasional	124
5.2.1 Dampak Mobilitas Permanen	124
5.2.2 Dampak Mobilitas Ulang Alik	125
5.2.3 Dampak Mobilitas Tenaga Kerja Internasional	128
BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	141
DAFTAR ACUAN	148

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai, Kabupaten Pasir, Kabupaten Bulungan	18
Tabel 2.2	Jumlah KK, Penduduk Propinsi Kalimantan Timur di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bulungan menurut Jenis Kelamin	22
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kalimantan Timur menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1995	23
Tabel 2.4	Kecamatan Wilayah Dati II Bulungan dan Jumlah Desa Berbatasan dengan Negara Malaysia	39
Tabel 3.1	Arus Penumpang Kapal Dalam Negeri di Pelabuhan Nunukan	76
Tabel 3.2	Distribusi Asal Tenaga Kerja Indonesia di Sabah, Malaysia Timur menurut Jenis Kelamin	78
Tabel 3.3	Distribusi Persentase Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia di Sabah, Malaysia Timur	79
Tabel 3.4	Jumlah Tenaga Kerja Resmi ke Malaysia Tahun 1984-1990	80
Tabel 3.5	Jumlah Deportasi Tenaga Kerja Indonesia di Sabah Tahun 1996	84
Tabel 6.1	Arus Orang, Barang, dan Jasa dari Indonesia ke Malaysia Melalui Pos-Pos Perbatasan di Kabupaten Bulungan	142

BAB I

PENDAHULUAN

Oleh : Aswatini Raharto

1.1. Latar belakang.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 menekankan bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang seperti daerah perbatasan dan daerah terpencil perlu ditingkatkan sebagai perwujudan wawasan Nusantara. Propinsi yang memiliki wilayah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga di Indonesia antara lain Sulawesi Utara (berbatasan dengan Filipina), Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur (berbatasan dengan Malaysia) serta Irian Jaya (berbatasan dengan Papua Nugini).

Daerah perbatasan, karena langsung dengan negara tetangga, merupakan pintu masuk lalu-lintas penduduk maupun barang dari dan ke kedua negara tersebut. Daerah ini termasuk daerah yang rawan karena merupakan tempat awal bertemunya pengaruh-pengaruh dari dua negara yang berbeda kepentingan dan ideologi. Daerah perbatasan di Indonesia umumnya juga merupakan daerah terpencil dan sulit dicapai sehingga masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan dibandingkan dengan daerah lain. Ini menyebabkan permasalahan

yang dihadapi daerah perbatasan menjadi kompleks karena adanya perbandingan dan persaingan langsung dengan negara tetangga. Kesenjangan pembangunan yang terjadi antara desa-desa dan kota perbatasan di wilayah Indonesia dengan kota-kota perbatasan di wilayah negara tetangga, serta jarak yang lebih dekat ke pusat-pusat pertumbuhan di negara tetangga akan menyebabkan penduduk daerah perbatasan di Indonesia lebih berorientasi ke negara tetangga dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu masalah kependudukan yang menonjol yang dihadapi daerah perbatasan adalah masalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di wilayah perbatasan ini tidak hanya menyangkut perpindahan fisik individu-individu melintasi batas negara baik secara legal maupun ilegal, tetapi juga berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, politik dan keamanan di wilayah tersebut.

Ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia mengakibatkan perpindahan penduduk secara berangsur-angsur meninggalkan desa-desa di wilayah perbatasan menuju daerah permukiman baru yang relatif memiliki hubungan lebih mudah ke perkotaan, baik di wilayah Indonesia maupun di wilayah negara tetangga. Ini mengakibatkan daerah perbatasan menjadi kosong, yang dari segi pertahanan dan keamanan merupakan suatu kelemahan.

Di bidang ekonomi, penduduk desa-desa perbatasan, seperti di beberapa daerah perbatasan di Kalimantan Timur, sangat tergantung pada pasar di Tawao, di wilayah Sabah Malaysia. Mereka pergi ke

Tawao untuk baik untuk memasarkan hasil produksinya maupun untuk membeli barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Selain dari itu, tersedianya lapangan kerja di wilayah negara tetangga juga menimbulkan arus migrasi tenaga kerja murah kesana, baik dari wilayah Kalimantan Timur sendiri maupun dari propinsi lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI) seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

Jarak yang dekat dengan pusat kota dan pertumbuhan di negara tetangga (dibandingkan dengan pusat kota dan pertumbuhan di Indonesia) serta mobilitas lintas batas yang tinggi juga mengakibatkan masyarakat wilayah perbatasan ini lebih banyak memahami perkembangan dan pembangunan nasional di negara tetangga. Dari segi pertahanan dan keamanan, keadaan ini juga dapat dianggap sebagai suatu kelemahan, karena penduduk wilayah perbatasan merupakan ujung tombak dalam strategi perbatasan.

Khususnya untuk Propinsi Kalimantan Timur, beberapa kecamatan seperti Nunukan dan Sebatik merupakan pintu keluar dan masuk tenaga kerja Indonesia (TKI) ke dan dari Malaysia. Kecamatan Nunukan merupakan daerah persinggahan (transit) terpenting bagi TKI yang akan menyebrang ke Malaysia. TKI ini berasal dari Propinsi Kalimantan Timur sendiri maupun propinsi-propinsi lain di Indonesia terutama Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Tingginya arus mobilitas tenaga kerja internasional ini menimbulkan masalah sosial

terutama untuk daerah persinggahan di perbatasan seperti Kecamatan Nunukan dan Sebatik.

Keterkaitan antara mobilitas penduduk dan pembangunan serta permasalahan yang dihadapi wilayah perbatasan mendasari penelitian ini, dalam rangka pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk melalui pengarahannya persebaran penduduk yang sesuai dengan daya tampung daerah dan tata ruang serta kesempatan hidup yang layak. Mobilitas penduduk di wilayah perbatasan ini sangat penting sebab bukan saja berkaitan dengan masalah persebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung wilayah tetapi juga sangat berkaitan dengan masalah pengembangan wilayah. Kebijakan-kebijaksanaan sektoral yang tidak bertujuan untuk intervensi pada persebaran penduduk dapat mempunyai dampak yang sangat besar pada pola mobilitas serta persebaran penduduk wilayah perbatasan yang selanjutnya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi dan situasi di wilayah perbatasan. Sebaliknya, adanya mobilitas penduduk di wilayah perbatasan juga dapat berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan penduduk.

1. 2. Tujuan

Penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan Penelitian Masalah Kependudukan di Daerah Perbatasan yang dilakukan oleh Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI), selama lima tahun dari tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 1998/1999 di propinsi yang berbeda-beda. Penelitian antara tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 1996/1997 dilakukan di Propinsi-propinsi Sulawesi Utara, Irian Jaya dan Timor-Timur. Tahun 1997/1998 dilakukan penelitian di Propinsi Kalimantan Timur. Penelitian di Kalimantan Timur direncanakan akan dilaksanakan selama dua (2) tahun. Tujuan umum dan akhir dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan konsep dan strategi alternatif pembangunan wilayah perbatasan.
2. Mengidentifikasi pola dan determinan mobilitas penduduk wilayah perbatasan.
3. Mengidentifikasi potensi daerah, pemanfaatan dan permasalahannya.

Tahun 1997/1998 merupakan penelitian tahun pertama penelitian di Propinsi Kalimantan Timur. Tujuan penelitian tahun ini adalah:

1. Mengidentifikasi pola dan determinan dan proses mobilitas penduduk wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.
2. Analisa dampak mobilitas penduduk wilayah perbatasan terhadap individu dan daerah.

1.3. Metodologi

1.3.1. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif umumnya digunakan untuk mendapatkan gambaran yang cermat dari suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan untuk menentukan adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya (Tan, 1977). Berdasarkan gambaran yang didapat dari penelitian deskriptif, akan disusun rekomendasi untuk pemecahan permasalahan mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur. Data yang dikumpulkan untuk keperluan analisa dalam penelitian ini mencakup data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian data primer, metode penelitian yang digunakan terutama adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini diterapkan untuk mengungkapkan proses serta alasan-alasan mobilitas penduduk yang terjadi di wilayah perbatasan dan masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan mobilitas tersebut. Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Responden adalah informan kunci yang terdiri dari masyarakat pelaku mobilitas, pimpinan formal maupun informal, aparat pemerintah serta informan lainnya yang erat kaitannya dengan proses mobilitas penduduk dan pembangunan di daerah perbatasan.

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari instansi-instansi terkait baik di Jakarta maupun di daerah. Data ini meliputi data potensi daerah, arus mobilitas tenaga penduduk dan tenaga kerja, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pengaturan mobilitas penduduk di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.

1.3.2. Pendekatan

Tinjauan teoritis mengenai migrasi internasional mengasumsikan bahwa migrasi terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara negara asal dan negara tujuan yang disebabkan karena perbedaan dalam tingkat pembangunan (Goss dan Lindquist, 1995). Karena itu, pembangunan di daerah perbatasan sangat berpengaruh terhadap mobilitas penduduk melintasi batas wilayah negara. Pembangunan yang lebih pesat di negara tetangga, tersedianya fasilitas yang lebih baik serta kesempatan hidup yang lebih baik di negara tetangga merupakan daya tarik bagi penduduk wilayah perbatasan di Indonesia, maupun dari wilayah-wilayah lain yang relatif jauh dari daerah perbatasan (tidak berbatasan langsung dengan negara tetangga) untuk melakukan mobilitas ke negara tetangga. Mobilitas ini tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga ada dimensi sosial, budaya, politik serta kelembagaan yang mempengaruhinya.

Migrasi merupakan proses yang kompleks karena keputusan untuk bermigrasi dipengaruhi baik oleh faktor-faktor di tingkat

individu maupun di tingkat keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, analisa yang luas dari fenomena mobilitas penduduk, dalam penelitian ini mobilitas penduduk melintasi batas negara Indonesia-Malaysia, harus menggabungkan analisa baik di tingkat individu maupun di tingkat keluarga dan masyarakat.

1.4. Organisasi penulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari enam (6) bab. Bab I, 'Pendahuluan', berisi uraian tentang latar belakang penelitian dan tujuan penelitian serta metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dan analisa untuk pemecahan masalah yang terungkap dari penelitian ini. Bab II 'Kondisi daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur' berisi uraian tentang daerah penelitian dalam konteks propinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Uraian dalam bab ini dimaksudkan untuk memberi gambaran latar belakang daerah yang mencakup aspek geografik, demografi, ekonomi, prasarana, latar belakang sejarah serta kebijaksanaan pemerintah dimana mobilitas penduduk ini terjadi. Bab III 'Pola Mobilitas Penduduk' menguraikan tentang sejarah dan pola mobilitas penduduk yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur. Uraian tentang mobilitas penduduk ini mencakup mobilitas penduduk internal maupun internasional. Bab IV 'Proses Migrasi' membahas bagaimana migrasi penduduk di perbatasan ini terjadi serta

pengaturan-pengaturan yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah maupun Perjanjian Lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia. Bab V 'Dampak mobilitas Penduduk di Daerah Perbatasan' berisi analisa tentang dampak yang ditimbulkan dari mobilitas penduduk yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur, baik mobilitas internal maupun internasional, terhadap individu migran, keluarga serta daerah asal, daerah transit dan daerah tujuan. Bab VI 'Kesimpulan dan rekomendasi' berisi pembahasan tentang isi dan permasalahan yang timbul dari fenomena mobilitas penduduk di daerah perbatasan ini serta rekomendasi yang dapat diberikan dalam mengatasi permasalahan yang timbul.

BAB II

KONDISI DAERAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI KALIMANTAN TIMUR.

Oleh: Eniarti Djohan dan Herry Yogaswara

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum daerah perbatasan Kalimantan Timur dengan fokus utama Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Pembahasan akan dibagi kedalam dua kelompok, yaitu secara umum mencakup wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan daerah perbatasan di DT. II Bulungan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara khusus tentang wilayah Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Kedua wilayah tersebut sangat terkait dengan kegiatan mobilitas internasional dengan Negara Malaysia, karena merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan Malaysia.

2.1. Propinsi Kalimantan Timur dan Wilayah Perbatasan

2.1.1. Geografi dan Struktur Pemerintahan

Kalimantan Timur merupakan propinsi yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan yang ada di sekitar Laut Sulawesi. Propinsi ini terluas dibandingkan dengan tiga propinsi Kalimantan lain, yaitu untuk wilayah daratan (*mainland*) 211.440 Km² atau 37,5 persen dari luas Pulau Kalimantan bagian Indonesia (P3PK-UGM, 1990;12). Secara geografis, sebelah timur dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Selat Makasar, sebelah selatan Propinsi Kalimantan Selatan, sebelah utara Negara Bagian Sabah (Malaysia), dan sebelah barat Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, dan Negara Bagian Sarawak (Malaysia).

Khusus untuk daerah perbatasan daratan Kalimantan Timur menunjukkan bentuk yang memanjang dari utara ke selatan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah, sepanjang lebih kurang 1.032 Km. Luas wilayah perbatasan ini lebih kurang 47,486 Km² (22,69 % dari luas Kalimantan Timur). Dalam sistem informasi geografis, daerah ini terletak di antara 4 20' dan 1 20' Lintang Utara, 113 35' dan 119 Bujur Timur. Daerah ini beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 250mm / bulan; khusus di

pedalaman mempunyai curah hujan paling banyak yaitu antara 3000 - 3500 mm / tahun. Untuk daerah pantai di siang hari suhunya berkisar antara 30 C sampai 32 C, sedangkan malam hari 24,2 C dan di pegunungan 14 C.

Topografi daerah perbatasan terdiri dari daerah perbukitan dan pegunungan. Misalnya wilayah Kecamatan Krayan umumnya bergunung-gunung dan berbukit-bukit, dan di antara bukit-bukit terdapat daerah yang relatif rendah. Kondisi ini juga terdapat di bagian selatan, yaitu meliputi wilayah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangi yang juga bergunung-gunung atau bergelombang. Di samping itu dijumpai juga daerah landai di sepanjang Sungai Mahakam dan Sungai Kayan beserta anak sungainya. Sungai-sungai ini mempunyai peran penting karena digunakan sebagai penghubung antara satu daerah dan daerah lain karena tidak terdapat jalan darat yang dapat dilalui kendaraan. Misalnya, Sungai Mahakam bisa dilayari '*long boat*' sepanjang 404 Km yaitu dari Samarinda sampai Long Iram - Long Bagun - Long Apari; Sungai Kayan dari Tanjung Selor sampai Long Peso - Long Pujungan; Sungai Sebakung bisa dilayari sampai ke Mensalong dan Labang.

Sumberdaya alam di wilayah perbatasan, terutama bagian daratan Propinsi Kalimantan Timur sangat kaya akan hasil hutan yang terdiri dari berbagai macam jenis kayu, rotan dan sarang burung walet, serta bahan tambang seperti minyak bumi dan gas alam. Khusus hutan yang ada di wilayah Indonesia, sebagian besar termasuk dalam

kategori hutan lindung yang dijadikan taman nasional Kayan Mentarang seluas 1600 hektar, yaitu di wilayah Kecamatan Pujung, Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu. Berbeda dengan wilayah perbatasan bagian Malaysia, pada umumnya termasuk kategori hutan industri/produksi karena banyak yang telah dijadikan perkebunan kelapa sawit; sedikit di wilayah Long Bayan yang akan dijadikan taman nasional.

Di pihak Indonesia, situasi seperti ini ditambah dengan kesulitan pengawasan hutan yang berdampak maraknya pencurian kayu, baik oleh oknum di negara tetangga maupun Indonesia. Dengan habisnya hutan di wilayah Malaysia muncul 'oknum' perusahaan yang berusaha mengambil kayu sampai melewati 'batas negara'. Kegiatan ini terkadang dibantu 'oknum' di pihak Indonesia atau melakukan penebangan sendiri yang hasilnya dijual pada *taoke* di Malaysia.

Propinsi Kalimantan Timur memiliki dua daerah kotamadya, yaitu Kotamadya Samarinda dan Kotamadya Balikpapan, serta empat daerah tingkat II yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Berau. Kabupaten Bulungan dan Kutai berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak dan Negara Bagian Sabah, dan sedikit di bagian Kabupaten Paser dengan Negara Bagian Sarawak. Dari tiga daerah tingkat II tersebut ada 10 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Di antaranya ada 8 kecamatan yang mempunyai batas daratan, yaitu Kayan Hulu, Kayan Hilir, Long Pujungan, Krayan, Lumbis, Mentarang (Kabupaten

Bulungan), Long Pahang dan Long Apari (Kabupaten Kutai), dan di perbatasan pantai daratan dan 2 kecamatan dengan perbatasan Kepulauan Nunukan dan Sebatik di Kabupaten Bulungan.

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Pada umumnya perkembangan wilayah perbatasan di Kalimantan Timur masih sangat lamban dibandingkan dengan daerah lain di Propinsi Kalimantan Timur. Ini terlihat dari masih sangat minimnya sarana perhubungan di wilayah tersebut, dan masih adanya beberapa kota kecamatan hanya bisa dicapai melalui udara. Misalnya kota Kecamatan Krayan, Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Long Pahangai dan Long Apari tidak dapat dicapai baik sungai maupun darat dari kota-kota pantai sebelah timur. Namun sarana dan prasarana perhubungan udara di kawasan ini pun sangat terbatas, sehingga hanya bisa dilandasasi sejenis pesawat helikopter dan Cessna. Lapangan udara yang dapat dilalui oleh pesawat udara yang relatif lebih besar terbatas pada hubungan antar kota kabupaten atau daerah yang dianggap berpotensi secara ekonomi seperti Kota Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan.

Seperti umumnya wilayah Kalimantan, sungai mempunyai peran penting sebagai sarana transportasi. Sarana sungai ini pun masih terbatas pada angkutan kapal yang bermuatan kurang dari 2,5 ton. Ada lima sungai yang bisa menghubungi wilayah perbatasan dengan

wilayah di luar kawasan tersebut, yaitu Sungai Mahakam menghubungkan Samarinda dengan Long Pahangai, Sungai Kayan menghubungkan Tanjung Selor dengan Long Nawang, Sungai Pujungan menghubungkan Tanjung Selor dengan Long Pujungan, Sungai Sesayap menghubungkan Tarakan dengan Mentarang, dan Sungai Sebuku menghubungkan Kecamatan Nunukan pulau dengan wilayah Kecamatan Nunukan daratan yang ada di kawasan Sebuku. Namun kondisi dari sungai-sungai itu misalnya Sungai Kayan terdapat beberapa bagian yang tidak dilalui, Sungai Sebuku ada waktu-waktu tertentu yang sangat berbahaya dengan *jeram-jeramnya*.

Sarana dan prasarana jalan darat yang bisa mencapai wilayah perbatasan terbatas dari Tanjung Selor ke Long Bawan dan Lumbis. Jalan ini, walaupun berbentuk tanah yang dikeraskan, namun bila dilanjutkan sampai di wilayah perbatasan Malaysia. Pada saat ini pemerintah sedang membuat beberapa sarana jalan darat yang dapat menghubungkan beberapa wilayah perbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur lain dan luar propinsi. Misalnya terbesar adalah jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Selatan - Tengah - Timur - Barat yang direncanakan sampai di sepanjang wilayah perbatasan Kalimantan.

Sarana dan prasarana transportasi yang bisa menghubungkan antar propinsi, selain melalui udara ada juga yang melalui laut lepas Selat Makasar atau Laut Sulawesi. Kapal laut yang tersedia tidak hanya untuk kapal barang, namun ada juga empat buah kapal

penumpang yang bermuatan besar yaitu **Kapal Tidar** (daerah-daerah Kalimantan Timur-Sulawesi Selatan-Jawa Timur), **Kapal Leuser** (daerah-daerah Kalimantan Timur-Sulawesi Selatan-Jawa Timur-Jawa Tengah), **Kapal Awu** (Kota Nunukan-Sulawesi Selatan-NTT), dan **Kapal Binaiya** (daerah-daerah Kalimantan Timur-Sulawesi Selatan-Jawa Timur-Jawa Tengah). Dilihat dari jalur kapal-kapal tersebut, menunjukkan arus mobilitas penumpang yang dari dan ke Kalimantan Timur masih didominasi Kawasan Timur Indonesia. Penumpang tersebut pada umumnya adalah pencari kerja di daerah Kalimantan Timur dan sekitarnya atau negara tetangga Malaysia yaitu Sabah dan Sarawak.

Sarana dan prasarana pendidikan di delapan daerah kabupaten/kotamadya mencakup tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Namun jumlah sarana dan prasarana, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota masih belum memadai baik dilihat dari kebutuhan dasar belajar maupun tenaga pendidik profesional yang sesuai dengan tingkat pengajaran dan fasilitas pendidikan lebih tinggi seperti Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan anak yang akan melanjutkan ke pendidikan SLTA harus ke luar Pulau Sebatik sehingga yang bisa melanjutkan pendidikan terbatas pada anak yang orangtuanya mampu secara ekonomi, karena tempat terdekat hanya ada di Kota Tarakan atau Pulau Nunukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada juga penduduk yang tidak melepas kewarganegaraan anaknya yang lahir di Malaysia dengan

alasan agar dapat sekolah di Malaysia dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anak yang lahir di negara tersebut (lihat Tabel 2.1.tentang sarana dan prasarana pendidikan di Propinsi Kalimantan Timur dan daerah tingkat II di wilayah perbatasan).

Tabel 2.1: Sarana dan Prasarana Pendidikan di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai, Kabupaten Pasir, Kabupaten Bulungan

Propinsi/Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rata-Rata Tiap Sekolah Murid Guru		Rasio Murid Terhadap Guru
Kalimantan Timur:						
SD	1.993	331.638	15.900	404	19	21.47
SLTP	341	93.791	6.161	560	37	14.75
SLTA	113	33.197	2.783	649	51	12.04
Sekolah Kejuruan: SLTP						
SLTA	3	304	131	101	44	2.32
	52	25.743	1.066	495	21	24.15
Kabupaten Kutai:						
SD	728	101.919	5.600	283	16	36.13
SLTP	115	19.960	1.718	349	30	10.79
SLTA	27	5.631	518	396	38	10.02
Sekolah Kejuruan:						
SLTA	5	1.793	134	359	27	13.38
Kabupaten Pasir:						
SD	321	38.904	1564	391	18	45.90
SLTP	32	8.017	463	440	29	15.19
SLTA	9	1.977	156	548	38	13.53
Sekolah Kejuruan:						
SLTA	3	1.066	60	355	20	17.77
Kabupaten Bulungan:						
SD	298	34.101	1778	342	17	39.35
SLTP	32	6.547	439	349	27	13.16
SLTA	10	2.262	208	503	43	11.27
Sekolah Kejuruan:						
SLTA	1	428	26	428	25	16.46

Sumber: Kalimantan Timur dalam angka 1995

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana untuk sekolah kejuruan, khususnya SLTP, masih minim dan hanya ada di Kotamadya Balikpapan dan Samarinda. Untuk tiga kabupaten wilayah perbatasan hanya ada pendidikan kejuruan setingkat SLTA. Dilihat dari perbandingan jumlah murid dan sarana pendidikan setingkat SLTA

yang tersedia di tiga kabupaten tersebut, tempatnya pendidikan kejuruan cukup diminati. Contoh di Kabupaten Bulungan hanya ada satu sekolah kejuruan namun jumlah murid ada 428 orang, sedangkan tingkat SLTA untuk 10 sekolah menampung 2.262 murid atau 1 sekolah rata-rata ada 226 murid.

Selain sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan pun dianggap sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan berbagai upaya peningkatan jaringan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Polindes dan kegiatan masyarakat Posyandu. Menurut data dinas kesehatan tahun 1995, jumlah rumah sakit di Propinsi Kalimantan Timur ada 23 buah yang tersebar di enam daerah tingkat II. Rumah sakit tidak hanya milik pemerintah yang biasanya ada di kota kabupaten, namun juga rumah sakit milik ABRI, BUMN, dan perusahaan-perusahaan yang tersebar di Kalimantan Timur dimana perusahaan terpusat. Misalnya di Kabupaten Kutai ada rumah sakit milik perusahaan Pertamina.

Dari segi pelayanan kesehatan untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dan terisolir dilakukan melalui program 'dokter terbang' atau 'dokter terapung'. Kegiatan ini termasuk untuk daerah-daerah yang ada di wilayah perbatasan. Namun tampaknya upaya ini masih sulit dilaksanakan, sehingga penduduk perbatasan banyak yang mengambil inisiatif berobat ke wilayah Malaysia, yaitu rumah sakit -

rumah sakit perusahaan/perkebunan atau kampung di Malaysia yang dilihat dari sudut fasilitas lebih baik, begitu pula dengan biaya yang tidak mahal dibandingkan bila pergi ke rumah sakit yang ada di pusat-pusat kota. Misalnya, penduduk Pulau Sebatik lebih suka berobat ke Tawau, dan Penduduk Desa Panado (Krayan) ke Desa Bakelalan (Sarawak).

2.1.3. Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1995, jumlah penduduk Propinsi Kalimantan Timur adalah 2.314.183 jiwa yang terdiri dari 1.192.032 laki-laki dan 1.122.151 perempuan (Penduduk Kalimantan Timur 1995, 1996:1-2). Dengan luas wilayah daratan 211.440 Km², maka tingkat kepadatan penduduk relatif rendah yaitu mendekati 11 jiwa/Km² Namun bila dilihat dari laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi yaitu 4,42 persen per tahun pada periode tahun 1980 - 1990. Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut mungkin karena tingginya arus migrasi ke Propinsi Kalimantan Timur yang menjadi tempat tujuan migran pencari kerja di sektor industri kehutanan, migas atau pencari kerja ke Malaysia (Sabah dan Sarawak).

Rendahnya tingkat kepadatan penduduk, terutama di daerah pedesaan juga disebabkan karena makin banyaknya penduduk yang melakukan migrasi ke kota untuk peningkatan kesejahteraan hidup yang dapat dilihat dari jumlah penduduk pedesaan, yaitu tahun 1995

hanya 49,8 persen dari jumlah penduduk di Propinsi Kalimantan Timur. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah rata-rata penduduk pedesaan secara nasional, yaitu 64,1 persen (Sensus Penduduk 1995).

Dilihat dari tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, penduduk Kabupaten Kutai terbanyak jumlahnya yaitu 641.482 jiwa, diikuti Kabupaten Pasir 232.893 jiwa dan Kabupaten Bulungan 176.741 jiwa. Tingginya jumlah penduduk di Kabupaten Kutai dan Kabupaten Pasir, selain kedekatan dengan ibu kota propinsi (Samarinda) dan Kota Balikpapan, mungkin juga dipengaruhi faktor migrasi penduduk pencari kerja di pertambangan yang banyak tersebar di dua kabupaten tersebut, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, batu kapur, dan kaolin (Profil Propinsi Kalimantan Timur, 1992:210-215).

Dibandingkan dengan Kabupaten Bulungan yang cukup jauh dengan kedua kota tersebut, sarana transportasi masih sulit, usaha pertambangan tidak sebesar Kabupaten Kutai dan Pasir. Pertambahan penduduk untuk Kabupaten Bulungan mungkin lebih karena dampak migrasi pekerja yang ke Negara Bagian Sabah (Malaysia), mengikuti program transmigrasi di beberapa daerah seperti di sekitar Tanjung Selor, Selimau, dan Simanggaris (Lihat Tabel 2.2 mengenai jumlah penduduk Propinsi Kalimantan dilihat dari wilayah perbatasan Kabupaten Kutai dan Kabupaten Bulungan)

Tabel 2.2: Jumlah KK, Penduduk Propinsi Kalimantan Timur dan Wilayah Perbatasan Kabupaten Bulungan menurut Jenis Kelamin

Wilayah	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Total
Propinsi Kalimantan Timur	398.849 *)	1.103.401	1.005.587	2.108.988**)
Kabupaten Kutai	137.218*)	335.169	306.313	641.482**)
Kabupaten Pasir	46.731*)	121.797	111.096	232.893**)
Kabupaten Bulungan (diluar Tarakan)	47.001*)	91.071	85.670	176.741**)
Kecamatan Kayan Hilir	214	550	533	1.083***)
Kecamatan Kayan Hulu	966	2.473	2.452	4.925
Kecamatan Pujungan	562	1.525	1.545	3.070
Kecamatan Kerayan	1.686	4.500	4.433	8.933
Kecamatan Lumbis	1.403	3.374	3.371	6.745
Kecamatan Nunukan	6.313	18.251	16.037	34.288****)
Kecamatan Sebatik	4.115	11.004	9.318	20.322****)

sumber: *)Sensus Penduduk 1990; **) Registrasi penduduk 1995; ***) Data Kecamatan wilayah Kabupaten Bulungan berasal dari Kantor Statistik Kabupaten Bulungan; ****) Data Kecamatan Nunukan tahun 1997; Data Kecamatan Sebatik Nopember 1997

Usia penduduk Propinsi Kalimantan Timur, menunjukkan struktur penduduk yang tidak berbeda dengan penduduk Indonesia umumnya, yaitu berbentuk piramida dengan landasan melebar (usia muda) dan makin membentuk kerucut pada usia lanjut. Ini memberikan gambaran bahwa untuk Kalimantan Timur pembangunan masih harus terfokus pada sarana pendidikan bagi penduduk usia belum produktif dan sarana kesehatan bagi penduduk tidak produktif

(anak-anak dan lansia) (Lihat Tabel 2.3 mengenai penduduk Kalimantan Timur menurut umur dan jenis kelamin)

Tabel 2.3: Jumlah Penduduk Kalimantan Timur Menurut Umur dan Jenis Kelamin tahun 1995

Umur	Laki-Laki		Perempuan		TOTAL	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
0 – 9	281.646	23,6	263.354	23,5	545.000	23,6
10 – 14	142.640	12,0	140.461	12,5	283.101	12,2
15 – 24	231.984	19,5	233.446	20,8	465.430	20,1
25 – 49	437.359	36,7	391.398	34,9	828.757	35,8
50 – 64	70.689	5,9	69.999	6,2	140.688	6,1
65 +	27.714	2,3	23.493	2,1	51.207	2,2
TOTAL	1.192.032	100,0	1.122.151	100,0	2.314.183	100,0

Sumber: Survei Penduduk antar sensus tahun 1995

Berdasarkan usia penduduk 10 tahun ke atas, maka pada tahun 1995 tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan penduduk Kalimantan Timur terbanyak adalah tingkat sekolah dasar 29,7 persen, atau tidak/belum tamat sekolah dasar /tidak 33,4 persen. Ini menunjukkan bahwa penduduk yang dapat menamatkan pendidikan sekolah lanjutan pertama ke atas tidak sampai separoh dari jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas, yaitu 25,3 persen. Menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan perempuan masih rendah yaitu dari total perempuan usia 10 tahun ke atas (858.797 orang) ada 31,9 persen yang

berhasil menamatkan pendidikan di tingkat sekolah lanjutan pertama ke atas, sedangkan laki-laki 41,9 persen dari 910.386 laki-laki berumur 10 tahun ke atas (Sensus Penduduk Kalimantan Timur, 1996:28-29).

Ada tiga lapangan pekerjaan yang banyak dimasuki oleh penduduk Kalimantan Timur, yaitu industri besar dan sedang 54.464 orang, industri kecil 39.833 orang, sektor jasa pemerintahan 30.330 orang, dan sektor perdagangan (besar, in-formal, dan rumah makan), bangunan, dan pertanian. Industri besar dan sedang lebih terfokus pada usaha-usaha pertambangan seperti minyak bumi, gas, batu bara, emas dan nikel yang kandungan dasarnya banyak ditemui di Kalimantan Timur. Kegiatan ini tidak saja menyerap tenaga setempat tapi juga dari luar propinsi, bahkan mungkin lebih banyak pendatang. Sedangkan lapangan pekerjaan pertanian meliputi persawahan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan yang lebih banyak dilakukan masyarakat lokal serta pendatang transmigrasi.

Khusus untuk masyarakat perbatasan, terutama penduduk kawasan perbatasan di daratan Pulau Kalimantan, kegiatan pertanian yang dilakukan lebih kepada kegiatan pertanian bersifat perladangan tradisional, mencari kayu di hutan, sektor perdagangan informal, perikanan dengan peralatan tradisional, dan pencarian sarang burung walet di sepanjang perbatasan Simanggaris. Data mengenai kegiatan ini tidak diperoleh, karena menurut informasi belum ada yang mendata secara terfokus pada kegiatan lapangan pekerjaan penduduk setempat. Namun contoh kasus di masyarakat perbatasan di Kecamatan Nunukan

dan Sebatik, menunjukkan penduduknya banyak melakukan kegiatan transaksi dagang dengan penduduk Malaysia karena barang-barang dari Malaysia lebih murah dibandingkan dengan Kota Samarinda, Balikpapan, atau Tanjung Selor. Orang Sebatik akan membawa hasil kebun (sayuran) dan ikan untuk dijual di Tawau, kembalinya akan membawa barang-barang makanan kaleng seperti susu dan kue-kue kering, roti, gula, beras, dan minyak goreng.

Makin berkembangnya Propinsi Kalimantan Timur tercermin juga dari keanekaragaman suku bangsa, baik yang menganggap dirinya sebagai penduduk asli atau pendatang. Secara umum penduduk Kalimantan Timur dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok Suku bangsa Melayu dan Suku bangsa Dayak. Kelompok pertama tinggal di daerah pesisir pantai dan sepanjang tepi sungai atau sepanjang sungai yang beraliran tidak deras, misalnya Suku bangsa Bulungan, Tidung, Berau, Bayau, Kutai, dan Banjar yang datang belakangan (Kalimantan Timur, 1992:89).

Sekarang, suku-suku ini ada yang mengelompok di daerah-daerah tertentu, misalnya Suku bangsa Banjar di Kota Samarinda dan Balikpapan, Suku bangsa Dayak di Kutai dan sepanjang wilayah perbatasan, Suku bangsa Bulungan di Kabupaten Bulungan, dan Suku bangsa Tidung di wilayah pantai timur bagian utara Pulau Kalimantan. Sedangkan suku-suku pendatang pada umumnya berada di pusat-pusat kota seperti Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Bulungan, Nunukan dan daerah-daerah transmigrasi. Kelompok pendatang ini yang dominan

adalah Suku bangsa Bugis-Makasar, Suku bangsa Toraja, Suku-suku dari Propinsi NTT, dan Suku bangsa Jawa. Para pendatang ini ada yang sudah tinggal secara turun temurun atau mereka yang ditugaskan oleh pemerintah, turut program transmigrasi, pencari kerja ke Negara Malaysia, atau bekerja di sektor informal.

Suku bangsa Dayak atau *lundaye* dianggap sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan secara umum karena tidak hanya tersebar di Propinsi Kalimantan Timur, namun juga di hampir seluruh Pulau Kalimantan. Kata dayak diambil dari perbendaharaan kata suku tersebut yang berari pedalaman, gunung, darat, dan hulu yang diberikan oleh orang luar dari suku dayak. Ungkapan ini muncul karena kelompok suku-suku tersebut pada dasarnya berdiam di daerah seperti pedalaman, gunung, hulu sungai. Karena itu, orang dayak adalah kelompok orang-orang yang berdiam di pegunungan/pedalaman atau hulu-hulu sungai. Suku-bangsa Dayak yang ada di wilayah perbatasan Propinsi Kalimantan Timur terdiri atas beberapa sub-suku bangsa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai. Misalnya di Kabupaten Bulungan *Dayak Kenyah* yang paling dominan, di wilayah Lumbis *Dayak Tagol* dan *Dayak Iban*.

Pola kehidupan orang dayak adalah mengikuti sistem ladang berpindah yang terbagi atas 2 kelompok, yaitu (1) pola perladangan berpindah namun tidak diikuti dengan perpindahan tempat permukiman, (2) pola exodus dimana kelompok ini melakukan perpindahan tempat permukiman dan ladang secara bertahap. **Pola**

pertama adalah, pemukiman kelompok tidak berpindah dan tanah garapan tidak luas (\pm 2 hektar) yang ada di sekitar kampung. Kelompok akan pindah bila tanah dianggap tidak berfungsi (biasanya 1 - 2 tahun), dan tanah garapan akan berpindah sebanyak 3 kali atau kira-kira tahun ketujuh akan kembali pada tanah garapan pertama atau membuka tanah keempat bila dianggap tanah pertama belum subur kembali. Pola pengolahan ini sama dengan Suku Tidung. Namun, selain memiliki tanah garapan mereka memiliki tanah lain yang disebut 'lahan jelajah' yang diukur dengan perjalanan selama satu hari. Agar tidak terjadi perang di antara kelompok, maka dalam pengukuran harus diketahui oleh kelompok atau tetangga terdekat dari kelompok yang sedang melakukan pengukuran.

Pola kedua, kelompok bermigrasi secara bertahap seperti yang dilakukan penduduk Apo Kayan yang berpindah secara berkelompok sambil membuka lahan yang dilalui. Bila lahan pertama tidak berfungsi, semua anggota kelompok akan pindah mencari lahan baru dan begitu seterusnya sampai di tempat tujuan akhir, biasanya sampai di kota. Kelompok yang sampai di kota tujuan mungkin saja bukan dari generasi kelompok pertama namun generasi-generasi selanjutnya. Kasus ini dapat dilihat dengan adanya exodus ke kota pada tahun 1980-an. Misalnya tahun 1950-an jumlah penduduk di Kayan Hilir ada 30.000 jiwa, namun sekarang untuk dua kecamatan (Kayan Hulu dan Kayan Hilir) tinggal \pm 6.000 jiwa.

Suku bangsa Banjar berasal dari Kalimantan Selatan yang pada abad ke-17 mengembangkan kekuasaan ekonomi dan politik sampai ke Kalimantan Timur. Kemudian, pada waktu Kerajaan Banjar melakukan perlawanan terhadap Belanda (1859 - 1905) banyak penduduk Kalimantan Selatan terpaksa pindah ke Kalimantan Timur. Menurut cerita dan sejarah Suku Banjar, kelompok ini berasal dari muara Sungai Kuyin, yaitu salah satu anak Sungai Barito atau hulu aliran Sungai Tabalong dimana terjadi perpaduan jenis antara orang Melayu, Suku Maanyam, Lawangan dan Dayak Bukit. Sedangkan kata Banjar berasal dari kata *banjarmasih*, yaitu nama salah satu kampung di muara Sungai Kuyin yang didiami oleh orang Melayu. Nama itu diberi oleh orang kampung *oloh ngaju* yang menggunakan bahasa *Brangas* dengan sebutan *oloh masi*. Kata ini lamban laun tidak hanya nama sebuah kampung, namun berubah menjadi sebutan identitas negeri, kerajaan, bahasa, suku dan sebagainya yang mula-mula ada di wilayah ini. Kelompok ini makin berkembang, dan abad ke -17 lahir suku baru yang merupakan perpaduan Suku *Ngaju* atau *Blaju* dengan orang Jawa asal bagian utara pantai Jawa. Perpaduan suku ini berubah menjadi perpaduan kulturil, dalam penggunaan bahasa tampak unsur bahasa Melayu dominan, sedangkan sudut agama didominir Agama Islam (PDK, 1993/1994:10).

Sekitar abad ke-15 telah ada beberapa kerajaan yang bernuansa Islam, di antaranya Kerajaan Bulungan yang penduduknya disebut dengan Suku Bulungan. Kelompok ini berasal dari pecahan Suku

Tidung (pantai timur bagian utara Kalimantan) karena salah satu anggota kerajaan Tidung ada yang kawin dengan suku di pedalaman Pulau Kalimantan, yaitu Suku Dayak **Kayan**. Suku ini masih ada namun populasinya kecil, banyak dijumpai di wilayah Tanjung Selor yang merupakan bekas Kerajaan Bulungan. Tampaknya antara Suku Bulungan dan Suku Tidung tidak ada keserasian karena orang Bulungan tidak mau disebut sebagai orang Tidung. Kelompok ini beranggapan mempunyai asal muasal dari kerajaan yang pernah jaya pada masanya di Kalimantan Timur, sehingga waktu terjadi pengelompokan wilayah menjadi kabupaten diambil dari wilayah-wilayah yang dulu menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Bulungan yang diberi nama 'Kabupaten Bulungan'.

Suku Tidung dikenal sebagai orang pantai yang sangat terbuka dalam berhubungan dengan suku-suku lain. Dilihat dari silsilah orang Tidung, menunjukkan wilayah kekuasaan Suku Tidung tidak hanya terbatas di Pulau Kalimantan bagian Indonesia, namun berkembang sampai Kerajaan Brunai, Negara Bagian Sabah di Malaysia, Filipina dan daerah Indonesia lainnya. Hal ini berdampak terhadap hubungan sosial yang tidak hanya terbatas pada lingkungan kerabat dekat, namun meluas pada tingkat kekerabatan yang lebih jauh. Misalnya, dilihat dari silsilah diri rupanya masih terkait dengan salah seorang keturunan Kerajaan Brunai, sehingga bila ke wilayah Brunai akan dibantu bahkan dijemput sampai Kinibalu. Selain itu, informan ini juga mempunyai hubungan kerabat dengan keluarga di Sabah dan setelah ditelusuri

informan ini juga berhak terhadap penggunaan tanah keluarga yang ada di Sabah. Sejak itu bila ke Sabah selalu ada kemudahan-kemudahan dengan alasan mengunjungi kerabat.

Dalam pengenalan batas wilayah, orang Tidung yang sebagian besar adalah 'orang pantai' mengenal batasan wilayah laut yang disebut '*kelong*'. Misalnya batas dengan Negara Malaysia dibuat dengan kelong-kelong sepanjang 500 meter, dan ini berlaku tetap serta diakui oleh pihak Malaysia. Sedangkan untuk batas darat atau dalam penentuan batas tanah digunakan '*jarak jelajah*' yang juga diketahui oleh tetangga mereka.

Dalam kehidupan beragama, orang Tidung dikenal sebagai pemeluk Agama Islam fanatik. Pada umumnya mereka beranggapan dirinya lebih kuat dari suku lainnya, namun jarang terdengar konflik antara suku yang berkaitan dengan permasalahan agama. Kelompok ini selalu berpegang pada buku panduan hidup **Ahluzimi**, dan bila merasa kalah dengan kelompok lain akan pindah dari wilayah tersebut. Pada umumnya, dulu mereka tidak mau bekerja di sektor pemerintahan karena bila mengacu pada sejarah pemerintahan Belanda yang bekerja di pemerintah kebanyakan beragama Kristen. Pemahaman ini berdampak terhadap pengertian pemerintah sama dengan Belanda, sehingga Belanda identik Kristen. Tahun 1964 pertama kali orang Tidung bekerja disektor pemerintahan.

Di antara beberapa suku bangsa yang ada di Kalimantan Timur di atas, untuk kawasan perbatasan daratan di dominir oleh Suku bangsa

Dayak, Bulungan dan Tidung. Sedangkan kawasan perbatasan kepulauan di dominir Suku bangsa Tidung, namun keberadaan suku ini pun makin tergeser dengan kehadiran suku pendatang Bugis, Toraja dan suku-suku NTT di Pulau Nunukan dan Suku Bugis di Pulau Sebatik. Kelompok Suku Tidung di Pulau Nunukan hanya ada sedikit dan tinggal mengelompok pada sisi pulau yang termasuk wilayah Desa Sungai Bilal, yaitu kira-kira tinggal 25 persen dari jumlah penduduk Nunukan. Kelompok ini mempunyai kegiatan sebagai petani dan nelayan. sehingga tidak mencolok seperti suku-suku pendatang.

Keanekaragaman suku bangsa yang ada di Propinsi Kalimantan Timur juga berdampak terhadap penggunaan bahasa di Kalimantan Timur. Bahasa Banjar banyak dijumpai di kota Samarinda dan Balikpapan dimana suku ini banyak berdomisili, bahasa Dayak di kawasan perbatasan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai, bahasa Tidung dan Bulungan di daerah Tanjung Selor dan wilayah kepulauan bagian utara yang pernah menjadai daerah kerajaan Bulungan dan Tidung. Namun bahasa Tidung juga banyak digunakan oleh masyarakat Malaysia yang pernah punya hubungan dengan orang Tidung.

Selain bahasa-bahasa penduduk setempat, bahasa pendatang pun banyak digunakan terutama dimana kelompok asal pendatang itu berada. Misalnya di Pulau Nunukan dijumpai kelompok orang NTT, Toraja, dan Jawa yang sehari-hari masih menggunakan bahasa daerah dari mana mereka berasal. Sedangkan bahasa Bugis dan Makasar tidak terbatas, karena dapat dikatakan hampir disetiap tempat dijumpai orang

asal Bugis dan Makasar. Kemudian, bahasa lain yang juga mendominasi dua pulau perbatasan tersebut adalah 'bahasa Melayu', sehingga ada di pulau tersebut seakan-akan ada di Negara Malaysia.

Dilihat dari agamanya, Penduduk Kalimantan Timur paling dominan adalah pemeluk Agama Islam yaitu sebesar 83,2 persen dari 2.041.221 jiwa (tahun 1995). Dibandingkan antara tiga kabupaten yang ada di wilayah perbatasan, maka Kabupaten Bulungan paling kecil jumlahnya yaitu 63,3 persen dari total penduduk kabupaten Bulungan (251.153 jiwa). Namun, untuk pemeluk Agama Kristen Protestan lebih tinggi (37,9 persen) dibandingkan dengan tingkat propinsi (9,5 persen). Mungkin ini disebabkan orang Dayak yang dominan pemeluk Agama Kristen Protestan banyak berdomisili di wilayah Kabupaten Bulungan, khusus di kawasan perbatasan Kalimantan Daratan (Kalimantan Timur Dalam Angka 1995, 1996:162).

2.1.4.. Latar Belakang Sejarah Penduduk Perbatasan

Latar belakang sejarah penduduk perbatasan Kalimantan Timur, khusus masyarakat di Kabupaten Bulungan memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara masyarakat Kalimantan Timur dengan masyarakat Malaysia. Ada dua pola terjadinya hubungan di antara dua masyarakat ini, yaitu **pola pertama** hubungan yang didasari sejak masa nenek moyang karena pada umumnya mereka tidak mengenal adanya batas negara kecuali hubungan berdasarkan satu

keturunan atau hak ulayat kepemilikan tanah/lahan. **Pola Kedua**, mobilitas penduduk dari wilayah Indonesia di luar Propinsi Kalimantan Timur ke Negara Bagian Sabah dengan motif mencari kerja, khusus kelompok Suku bangsa Bugis-Makasar dan NTT..

Pola pertama dapat dilihat dari dua kasus, yaitu (1) kasus kelompok Suku Dayak Kayan di Pulau Kalimantan daratan baik di wilayah Indonesia maupun Malaysia. Pola kehidupannya selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain sehingga muncul kelompok-kelompok Kayan yang baru, namun di antara kelompok selalu ada rasa keterikatan merasa satu kerabat atau kepemilikan tanah yang sama. Karena itu, terutama kelompok yang ada di wilayah perbatasan masih kunjung mengunjungi baik untuk keperluan adat, pekerjaan, dan perdagangan. (2) kasus kelompok Suku Tidung yang asal mulanya dari Tawau (Negara Bagian Sabah), kemudian melakukan mobilitas ke Sinubatang (tahun 1300) dan Tarakan (tahun 1326). Wilayah sebaran suku ini sangat luas, yaitu di Malaysia dari Tanjung Mangkaliat sampai Kudat, daerah Kalimantan Timur bagian timur beserta pulau-pulainya, bahkan ada juga di Brunai dan Filipina.

Gerakan mobilitas ini berdampak terhadap pola hubungan di antara mereka yang merasa terkait karena adanya hubungan satu keturunan yang sama, perkawinan atau keterikatan terhadap tanah ulayat keluarga. Dampak dari hubungan ini berakibat terhadap adanya kemudahan-kemudahan dalam berkunjung baik dari atau ke Malaysia. Secara lebih rinci ada tiga pola hubungan yang terjadi karena didasari

oleh hubungan sejarah maupun pertalian kerabat di antara masyarakat kedua negara, yaitu:

1. **Perkawinan**, biasanya terjadi antara laki-laki Malaysia dengan perempuan dari pihak Indonesia.
2. **Perdagangan**, dari pihak Indonesia menjual hasil-hasil hutan dan dari Malaysia membawa pulang kebutuhan pokok seperti beras, sabun, gula dan sebagainya.
3. **Ulayat Tanah**, karena di antara penduduk Kalimantan Timur ada yang masih memiliki tanah ulayat di wilayah Malaysia, begitu pula sebaliknya. Penduduk bisa mengolah tanah dengan sekehendaknya, namun tidak boleh dijual. Bahkan saat ini banyak keturunan orang Indonesia yang ada di Malaysia mulai membeli tanah di wilayah Indonesia, misalnya beberapa kasus yang ada di Pulau Sebatik. Para pembeli ini menganggap tanah di Indonesia masih murah, di antara mereka masih ada yang berkeinginan kembali ke Indonesia.

Pola kedua merupakan kasus-kasus yang dapat dikatakan baru terjadi, dan lebih berfokus karena adanya mobilitas penduduk dari wilayah Indonesia di luar Propinsi Kalimantan Timur. Ada dua kelompok suku bangsa yang dominan dalam gerakan ini, yaitu Suku bangsa Bugis dan suku-suku di NTT. Orang Bugis lebih dulu dari orang NTT yang bergerak dengan menggunakan kapal layar mereka sebagai nelayan, pedagang, bahkan ada yang sebagai 'bajak laut'. Mereka menemui daerah baru, yaitu di wilayah Negara Bagian Sabah yang kemudian menjadi tempat tinggal baru. Sedangkan kelompok

NTT diperkirakan sesudah tahun 1940 mulai ada yang ke Tawao dengan dasar untuk bekerja. Di antara mereka ada yang menetap dan sering memberi informasi terutama masalah pekerjaan pada keluarga di kampung yang berdampak terhadap hubungan antara masyarakat NTT dengan masyarakat Malaysia, khusus Tawao. Dari kasus-kasus yang muncul dapat dilihat pola hubungan masyarakat Indonesia dengan Malaysia yaitu:

1. **Perkawinan**, bisa terjadi antara Suku Bugis di Malaysia dengan Suku Bugis di daerah asal (Sulawesi Selatan). Umumnya pengantin perempuan dari Indonesia yang dinikahkan dengan laki-laki Malaysia atau laki-laki Bugis yang berdomisili di Malaysia.
2. **Pekerjaan**, buruh asal Indonesia pada umumnya bekerja di perkebunan-perkebunan, setelah mapan dan dipercaya majikan akan memanggil famili di kampung yang sangat dibutuhkan untuk bekerja di Malaysia. Kegiatan ini masih berlangsung sampai sekarang, terutama karena tenaga orang Indonesia bisa dibayar murah dan tidak sulit mengaturnya.
3. **Perdagangan**, orang Bugis yang sudah lama di Sebatik atau Nunukan ada yang melakukan kegiatan perdagangan, seperti menjual sayur-mayur, ikan asin dan ikan segar ke Malaysia. Pedagang ini ke Tawao naik perahu, di sana sudah menunggu tauke langganan tempat bisa melempar barang. Ketika kembali akan membawa kebutuhan pokok seperti beras, sabun, minyak, gula dan lain-lain untuk dijual di masyarakat atau konsumsi sendiri karena

di kedua pulau tersebut lebih murah dan baik bila membeli barang dari Malaysia (Tawao) dibandingkan dengan barang dari wilayah Indonesia.

2.1.5. Ekonomi, pola kesempatan kerja dan hubungan ekonomi dengan negara tetangga

Propinsi Kalimantan Timur dikenal mempunyai potensi kehutanan dan migas yang tinggi, namun pengelolaannya bersifat ekstraktif, dan kurang dapat mendukung perekonomian lokal maupun perekonomian rakyat. Ciri ekonomi seperti ini adalah tingginya kontribusi industri terhadap penerimaan negara dan daerah, namun kurang mampu mendongrak kemampuan ekonomi rakyat, sehingga kantong-kantong kemiskinan biasanya berada di wilayah pedalaman yang kurang terimbas oleh akselerasi industri.

Dalam konteks sebagai daerah yang mempunyai batas langsung dengan negara tetangga, maka daerah ini menjadi sensitif terhadap berbagai perubahan yang ada di negara tetangga, khususnya apabila negara tetangga tersebut mempunyai tingkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Hal ini sangat terlihat untuk daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat-pusat kemajuan negara tetangga, seperti Nunukan dan Sebatik dengan wilayah Tawao. Nunukan menjadi berfungsi sebagai daerah transit dengan segala konsekwensinya, sedangkan Sebatik berfungsi sebagai penyedia

berbagai kebutuhan pertanian, namun apabila dipertukarkan dengan barang hasil industri, maka sebetulnya nilai riil yang diterima oleh penduduk menjadi lebih kecil.

Kebijakan perekonomian dalam hal industri kehutanan maupun perkebunan ternyata berbeda antara Indonesia dengan Malaysia, dimana penguasaan hutan diserahkan pada konsesi HPH dengan akses yang minimal dari penduduk untuk mendapatkan pendapatan, sehingga kondisi penduduk di wilayah hutan masih terjerat kemiskinan. Sementara di Malaysia, penguasaan hutan dengan kontrol dari pemerintah negara bagian yang cukup kuat dapat menangkai kerusakan lingkungan amupun meminimalkan kerugian masyarakat.

Wilayah negara bagian Sabah dan Sarawak mempunyai potensi kehutanan dan perkebunan yang sangat tinggi, namun tidak didukung oleh tersedianya tenaga kerja yang *unskilled labour*, sehingga mereka membutuhkan tenaga kerja yang berasal dari luar negara bagian tersebut. Oleh sebab itu, mengalirlah tenaga kerja dari wilayah Indonesia ke wilayah ini untuk mengisi berbagai perkebunan maupun industri kehutanan yang membutuhkan kehadiran mereka. Selain itu, menaikinya tingkat perkenomian masyarakat menyebabkan semakin terspesialisasinya pekerjaan penduduk dan mereka kekurangan tenaga kerja domestik, seperti pembantu rumah tangga sektor ini juga yang banyak diisi oleh tenaga kerja dari Indoensia.

2.2. Daerah Perbatasan Di Daerah Tingkat II Bulungan

2.2.1. Geografi dan Struktur Pemerintahan

Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan adalah salah satu wilayah yang banyak memiliki daerah kecamatan maupun desa-desa berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia bagian timur, yaitu sebelah barat dengan Negara Bagian Sarawak, dan sebelah Utara dengan Negara Bagian Sabah. Tiga karakteristik wilayah yang berbatasan, yaitu wilayah daratan di Pulau Kalimantan, wilayah daratan di daerah pulau kecil (khusus Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik)¹ dan wilayah perairan yang juga ada di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.

Luas wilayah Kabupaten Bulungan adalah 75.724 Km² yang terdiri dari 15 kecamatan, 430 desa (Kalimantan Timur Dalam Angka 1995, 1996:29). Namun untuk tahun 1997 ada perubahan dengan dijadikannya Tarakan sebagai daerah kotamadya, dan wilayah Pulau Sebatik terpisah dengan Kecamatan Nunukan menjadi daerah kecamatan sendiri. Data mengenai perubahan ini belum ada, sehingga untuk tulisan ini digunakan data terbaru sebelum pemisahan wilayah

¹ Karakteristik yang hampir sama juga ada di daerah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang masih merupakan persengketaan internasional antara Indonesia dengan Malaysia yang sudah berada dalam pengurusan Mahkamah Internasional. Pada waktu penelitian berlangsung (Desember 1997) belum ada keputusan mengenai status dan kepemilikan kedua pulau tersebut.

tersebut. Di antara 15 kecamatan tersebut, wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ada 8 kecamatan yang terdiri dari sekitar 18 desa yang ada di daerah tingkat II Bulungan. Tabel I akan memperlihatkan daerah kecamatan perbatasan dan jumlah desa yang mempunyai batas-batas langsung dengan wilayah Malaysia dan ada/tidaknya pos migrasi di wilayah tersebut.

Tabel 2.4.: Kecamatan Wilayah DT II Bulungan dan Jumlah Desa Berbatasan Langsung dengan Negara Malaysia

Kecamatan	Jumlah Desa Perbatasan	Pos	Keterangan
Mentarang	3	tidak ada	Menjadi Kecamatan Tahun 1997
Kayan Hulu	14	tidak ada	
Kayan Hilir	5	tidak ada	
Pujungan	23	tidak ada	
Krayan	89	ada	
Lumbis	77	ada	
Nunukan	3	ada	
Sebatik	2	ada	

Data di atas menunjukkan bahwa separuh dari wilayah kecamatan tidak mempunyai pos perbatasan, terutama daerah kecamatan yang ada di Kalimantan daratan (*mainland*). Pembentukan pos perbatasan ini mengindikasikan bahwa layanan yang diberikan masih

diprioritaskan untuk daerah yang diduga mempunyai nilai ekonomi penting, khususnya untuk pengaturan masalah ketenagakerjaan. Sedangkan untuk masalah yang bersifat batas tradisional masih belum diberikan layanan pos perbatasan. Namun demikian, mengingat daerah pedalaman Pulau Kalimantan daratan ini merupakan daerah yang potensial untuk industri kayu, diduga akan banyak mengalami gangguan di masa yang akan datang. Karena itu, pembentukan pos perbatasan dan pos keamanan akan sangat bermanfaat dalam menanggulangi berbagai usaha pencurian kayu oleh para pengusaha kedua belah pihak.

Dalam mengantisipasi perencanaan pembangunan di daerah perbatasan maka pemerintah daerah tingkat II telah mengeluarkan Perda mengenai tata ruang daerah perbatasan, yaitu Perda No. 25/1995. Sedangkan Bappeda Tingkat I mempunyai tata ruang kawasan perbatasan untuk daerah Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Mentarang. Tahun 1995/1996 Pemda Tingkat II Bulungan dengan bantuan konsultan membuat tata ruang daerah Kecamatan Krayan dan Kecamatan Pujungan, dan tahun 1996/1997 sedang dibuat tata ruang umum daerah Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir. Selain itu, pihak kabupaten juga telah membuat rencana ibukota kecamatan meliputi daerah kecamatan Peso, Pujungan, Sembakung dan Bunyu.

2.2.2. Gambaran Umum Beberapa Kecamatan Di Perbatasan Pulau Kalimantan Daratan

Perbatasan Di Kecamatan Lumbis

Kecamatan Lumbis adalah salah satu kecamatan perbatasan yang termasuk dalam kategori pedalaman yang aksesibilitasnya dapat dicapai dengan menggunakan transportasi sungai dan udara. Ada dua pintu masuk menuju wilayah Malaysia, yaitu (1) Desa Labang masuk melalui sungai Pensiangan, pos imigrasi ada pada tingkat ranting dari Kotamadya Tarakan, (2) Desa Tau Lumbis, tidak ada pos imigrasi namun aksesibilitas ke Malaysia dapat melalui jalan sungai. Pemerintah Malaysia hingga kini masih keberatan dengan penyediaan pos imigrasi di daerah tersebut.

Desa Labang merupakan pintu masuk untuk menuju daerah Bantul di Malaysia dan pintu masuk untuk penduduk daerah Mentarang dan Malinau. Karena itu, Desa Labang merupakan pintu masuk yang penting bagi orang '**Tanah Tidung**', mencakup Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sesayap, Kecamatan Malinau, dan Kecamatan Mentarang yang merupakan ranting dari Tarakan ke wilayah Malaysia. Di antara masyarakat ini mempunyai hubungan kerabat yang kuat, karena pada waktu dulu penduduk Bantul (Malaysia) umumnya adalah migran dari Indonesia. Sedangkan Tau Lumbis merupakan pintu masuk menuju daerah Elilipan di Malaysia.

Aliran penduduk dan barang yang melalui daerah ini lebih bersifat pelintas batas tradisional dan perdagangan hasil hutan seperti sarang burung. Namun demikian karena wilayah hutan konsesi di Malaysia sangat dekat dengan perbatasan, maka seringkali terjadi masalah pelintas oleh pengusaha hutan. Tahun 1997 terdapat kasus pelanggaran tapal batas oleh pengusaha kayu Malaysia, dan pemerintah Malaysia telah minta maaf kepada pihak Indonesia dengan mengatakan adanya 'oknum' pengusaha Malaysia yang telah membuat tindakan demikian dan bukan merupakan citra atau ciri dari pengusaha Malaysia pada umumnya.

Selain itu, dua desa perbatasan di Lumbis juga merupakan desa induk dari 15 desa lain lainnya, yaitu Desa Labang dan Desa Taul Lumbis. Desa Labang merupakan desa induk dari lima desa lainnya, yaitu (1) Labang, (2) Ngawol, (3) Lagas, (4) Simantipal, dan (5) Bululuan Hilir. Sedangkan Desa Tau Lumbis merupakan desa induk dari sekitar sepuluh desa lainnya, yaitu (1) Tau Lumbis, (2) Lipaga, (3) Tetagas, (4) Kabungotor, (5) Bululaun Hulu, (6) Tuntu Libing, (7) Duyan, (8) Sibalun, (9) Memasin, dan (10) Kalisun. Desa Tau Lumbis tidak memiliki pos imigrasi, namun mempunyai landasan lapangan terbang. Selain itu, dari ibu kota Kecamatan Mensalong untuk menuju Tau Lumbis terdapat akses perjalanan darat sepanjang 80 kilometer.

Perbatasan Di Kecamatan Krayan

Kecamatan Kerayan merupakan kecamatan yang ada di daerah pedalaman dengan aksesibilitas yang sangat rendah karena hanya dapat dijangkau dengan pesawat terbang. Namun demikian, dilihat dari sisi wilayah perbatasan merupakan daerah yang sangat strategis karena merupakan pintu masuk menuju daerah Serawak dan Sabah di Negara Malaysia Timur dan Negara Brunei Darussalam.

Posisi strategis ini ternyata tidak ditunjang oleh ketersediaan sarana dan alat transportasi di daerah tersebut. Di Krayan ada Pos Imigrasi, namun demikian ciri pelintas batas adalah pelintas tradisional yang lebih ditujukan untuk perdagangan tradisional dari hasil-hasil hutan. Daerah tujuan melalui Krayan adalah daerah Bario, dimana ada lapangan terbang, sedangkan di wilayah Krayan lapangan terbang ada di Long Bawan. Aksesibilitas di wilayah Indonesia sangat jauh berbeda, karena di wilayah Malaysia sudah ada jalan yang menghubungkan daerah-daerah berdekatan dengan wilayah perbatasan, sementara di Indonesia belum ada.

Perbatasan Di Kecamatan Pujungan

Kecamatan Pujungan merupakan kecamatan pedalaman yang mempunyai aksesibilitas transportasi air dan lapangan terbang. Daerah ini berbatasan dengan Malaysia, khususnya di daerah Long Baga. Karakteristik mobilitas penduduk bersifat pelintas batas tradisional yang terjadi sejak zaman Belanda. Daerah Pujungan mempunyai suatu

sejarah yang cukup penting pada masa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, yaitu sebagai daerah batu loncatan masuknya pasukan Indonesia ke wilayah Malaysia.

Penduduk Long Banga (Malaysia), pada dasarnya adalah penduduk migran menetap, berasal dari Indonesia. Penduduk di wilayah ini, pada saat konfrontasi digunakan oleh kedua belah pihak untuk kepentingan penyerangan pasukan masing-masing, namun penduduk tidak berpihak kemana-mana dan mengatur strategi masing-masing sehingga tidak terlihat dimusuhi oleh kedua negara pada waktu itu. Daerah ini belum ada pos imigrasi, bila ke wilayah Malaysia hanya menggunakan rekomendasi dari kecamatan. Pada umumnya penduduk yang ke Malaysia 'kunjungan keluarga' atau 'berobat'.

Perbatasan Di Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir

Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir merupakan daerah pedalaman yang mempunyai tingkat aksesibilitas paling rendah dan sulit dijangkau dari wilayah Indonesia. Dua kecamatan yang sering disebut '*Apo Kayan*' ini merupakan daerah yang terkenal dengan migrasi penduduk yang tersebar hampir di seluruh wilayah Mahakam, Tanjung Selor, dan wilayah Malaysia. Kondisi dua kecamatan ini sedemikian sulit, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok dari wilayah Malaysia, khusus di dekat camp-camp konsesi kayu di Malaysia. Di kedua

kecamatan ini tidak terdapat pos imigrasi, sehingga perlintasan batas ditangani langsung oleh kecamatan yang ada di daerah tersebut. Namun sejauh ini yang banyak terjadi adalah pelintas batas tradisional untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Ibu kota kecamatan Kayan Hilir adalah Betadian yang mempunyai aksesibilitas sungai untuk menuju daerah Malaysia melalui Sungai Kayan dan Sungai Marong. Kelompok ini masih satu keturunan dengan Suku Badem, sehingga hubungan perkerabatan dan perlintasan batas lebih kepada motif keluarga dan pemenuh kebutuhan subsistensi. Di daerah ini direncanakan akan dibangun suatu bendungan untuk pembangkit tenaga listrik, yaitu membendung Sungai Musang. Lokasi bendungan ini akan menggenangi beberapa kampung yang merupakan komunitas orang Badem asal Apo Kayan. Untuk itu penduduk akan mendapat ganti rugi dan pembangunan rumah di tempat lain. Kemungkinan akan pindah ke daerah Long Betoa yang sudah memiliki listrik tenaga surya. Dengan demikian, terjadinya *permanen residen* yang bersifat bolak balik di daerah perbatasan tidak menjadi masalah sepanjang suku-suku tersebut masih mempunyai tanah ulayat di daerah asal yang ternyata masih diakui oleh kerabatnya.

Ibukota Kecamatan Kayan Hulu adalah Long Nawang yang merupakan pintu masuk menuju wilayah Malaysia melalui Long Betoa lalu menyusuri Lekap Benuang, setelah berjalan kaki sejauh 2,5 jam (masyarakat asli) hingga tiba di wilayah Malaysia di kamp Tapak Mega. Pada umumnya perjalanan ke kamp ini untuk membeli

kebutuhan bahan pokok seperti beras, gula dan kebutuhan motor tempel seperti oli dan bahan bakar (minyak tanah dan solar di wilayah Indonesia mencapai Rp. 4.500,-). Ini mengindikasikan tingkat harga yang tinggi karena aksesibilitas hanya tergantung dengan pesawat terbang, sehingga semua jenis barang harus diperhitungkan dengan ongkos angkut.

Di daerah ini memang ada *subsidi transportasi*. Namun justru subsidi transportasi yang diberikan adalah pengangkutan untuk sampai di kecamatan, sementara banyak penduduk yang tinggal jauh di pedalaman dan tidak sempat mendapatkan barang kebutuhan tersebut karena kehabisan. Untuk penduduk Long Nawang terdapat dua pilihan dalam memenuhi kebutuhan pokok di Malaysia, pertama di Kamp Tapak Naga, kedua dengan menggunakan truk menuju daerah Melaga (Serawak). Pada umumnya penduduk diberi tumpangan gratis karena para pekerja kebanyakan keturunan Apo Kayan, dan seringkali juga membawa hasil hutan yang laku di Malaysia seperti kayu gaharu, rotan, dan getah.

Kemudian, migrasi penduduk Apo Kayan ke berbagai daerah merupakan kondisi yang harus diperhitungkan dalam melihat peta persebaran masyarakat dayak ke berbagai daerah, termasuk ke wilayah perbatasan. Penurunan jumlah penduduk dengan motif migrasi ini diduga berkaitan dengan tingkat kesulitan hidup yang tinggi di Apo Kayan yang tidak sulit hubungan dengan wilayah Indonesia lain. Diperkirakan migrasi penduduk menyebar ke daerah Lepukbem,

Mahakam, Malaysia, dan Trasnawang. Orang Apo Kayan yang kebanyakan berasal dari Suku Dayak Kenyah ini, yang pertama kali pindah adalah *Lepo Timai* yang pindah ke daerah Tabang di Mahakam Hulu. Selain itu, ada juga beberapa kelompok penduduk yang mempunyai orientasi migrasi. Misalnya penduduk daerah-daerah Bakung Metun dengan tujuan wilayah Malaysia dan Tanjung Selor, dan penduduk Nakramu dengan tujuan Tanjung Selor dan Mahakam.

Perbatasan di Kecamatan Mentarang

Beberapa desa di wilayah Kecamatan Mentarang merupakan desa-desa perbatasan, dan sekarang pintu masuknya melalui daerah Numbis. Permasalahan yang cukup mencolok belakangan ini adalah adanya rencana pengelolaan 'Kawasan Taman Nasional' seluas 1.600.000 hektar. Namun di lokasi tersebut juga akan dibangun pembuatan jalan 'Trans Kalimantan' lintas utara, yaitu antara Kabupaten Kutai menuju Long Bawan.

2.2.3 Kecamatan Perbatasan di Nunukan dan Sebatik: dua frontier area

Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik merupakan daerah yang terkena imbas langsung dari daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Sebelumnya kedua daerah ini menjadi satu wilayah kecamatan, yaitu wilayah kecamatan Nunukan, namun semenjak tahun

1997, administrasi kecamatannya dipisah, dan masing-masing berdiri sendiri. Kedua kecamatan ini merupakan bagian dari kabupaten daerah tingkat II Bulungan.

Dua kecamatan ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Kecamatan Nunukan terdiri dari wilayah pulau Nunukan dan sebagian masuk dalam wilayah *mainland* pulau Kalimantan; sedangkan Sebatik merupakan pulau. Daerah perbatasan daratan antara Indonesia Malaysia di wilayah Nunukan ada di wilayah *mainland* pulau Kalimantan, sedangkan perbatasan daratan Sebatik berada di pulau. Kedua kecamatan ini mempunyai wilayah perairan yang dijaga ketat oleh pihak Angkatan laut RI maupun pihak Tentara Diraja Malaysia.

Berkaitan dengan masih barunya wilayah Sebatik sebagai daerah kecamatan yang berdiri sendiri, maka data-data sekunder yang ada kaitannya dengan kependudukan, gambaran potensi alam, sosial ekonomi dan sebagainya masih relatif terbatas, dan masih banyak yang tergabung dengan daerah Kecamatan Nunukan. Oleh sebab itu, analisa data sekunder mengenai daerah ini harus digabungkan dengan daerah kecamatan Nunukan, sebelum tahun 1997. Namun demikian, temuan-temuan data primer dengan menggunakan teknik yang bersifat *rapid assesment* seperti menggunakan pemetaan, alur sejarah, maupun wawancara dengan informan kunci yang mempunyai pengalaman di daerah tersebut dapat memberikan suatu gambaran mengenai potensi-

potensi dan permasalahan yang ada di kedua kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia ini.

Masalah Keamanan Di Wilayah Perbatasan Nunukan dan Sebatik

Masalah keamanan di wilayah perbatasan menjadi bagian penting dari dinamika hubungan antara Indonesia dengan Malaysia, karena berbagai langkah pengamanan yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas di wilayah kawasan. Khusus untuk wilayah Nunukan dan Sebatik, masalah keamanan ini dapat dilihat dari dua matra yang penting, yaitu matra darat dan matra laut. Matra darat yang memegang peranan penting adalah tugas teritorial dari TNI AD dan Kepolisian, sedangkan untuk matra laut adalah Pos Angkatan Laut dan Pasukan Marinir. Matra darat sangat terlihat dalam segi pengamanan di wilayah daratan Kecamatan Nunukan di *mainland* Kalimantan, yang banyak mengalami permasalahan pelanggaran lintas batas untuk kepentingan pengusaha.

Koramil Nunukan mempunyai wilayah tugas lapangan yang strategis, karena berada di daerah perbatasan RI dan Malaysia yang mempunyai berbagai masalah sosial maupun keamanan. Wilayah tugas koordinatifnya dengan Polsek Nunukan, Polsek Sebuku dan Polsek Sungai Nyamuk (Sebatik), selain membawahi daerah tugas Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik. Walaupun mempunyai tugas yang berada di luar jalur kecamatan, tetapi karena fungsinya adalah pembinaan teritorial (binter) maka koordinasi jauh lebih susah

dibandingkan dengan tugas dari Kamtibmas yang diemban oleh Polsek yang berada di masing-masing kecamatan. Bahkan untuk Nunukan di daerah Sebuku ada juga Polsek, dan seringkali kurang koordinasi dalam penanganan perkara Kamtibmas.

Dalam konteks strategi militer, pihak Koramil membaginya kedalam tiga wilayah, yaitu (1) daerah perbatasan dataran Sebatik sepanjang 25 kilometer, (2) dataran Semanggaris 127,5 kilometer dan (3) Lautan Kayu Mati 13,5 kilometer. Adanya garis batas yang terdiri dari wilayah dataran dan lautan ini juga membawa berbagai masalah yang berbeda pula. Wilayah kerja Koramil Nunukan merupakan daerah rawan Tenaga Kerja ilegal, penyelundupan dan masalah Hankam. Contohnya, adanya kasus penyerobotan oleh 26 traktor pengusaha Malaysia yang mencuri kayu di wilayah Indonesia. Mereka berani melakukan tindakan memindahkan patok perbatasan, yang diketahui oleh pihak Koramil dengan melakukan pengecakan garis batas dengan teknologi GPS. Saat penangkapan traktor-traktor tersebut, dari pihak pengusaha ada usaha-usaha untuk berdamai agar traktor-traktor tersebut dapat dilepaskan. Tetapi usaha itu tidak berhasil dan penahanan alat-alat berat tersebut tetap dilaksanakan.

Memantau daerah perbatasan Nunukan merupakan hal yang sangat sulit, khususnya di wilayah dataran Semanggaris yang mencapai lebih dari 127 kilometer dengan topografi yang kasar dan sulit. Daerah tersebut sulit dipantau dari darat dan harus dipantau dari udara. Pemantauan melalui darat harus dilakukan dengan berjalan kaki

selama seminggu. Oleh sebab itu sangat ideal apabila patroli di daerah tersebut dilakukan dengan bantuan matra udara. Tetapi hal ini masih sulit dilakukan. Padahal dari hasil pemantauan lapangan pihak pengusaha dari Malaysia telah berani menembus hingga 30 kilometer ke dalam hutan di wilayah Indonesia untuk mencuri kayu. Pada ketentuan bahwa 1,5 kilometer dari garis sempadan masing-masing negara merupakan kawasan hutan lindung yang tidak boleh dibuka. Dengan adanya traktor yang melanggar garis batas ini sebetulnya bukan hanya melanggar sistem tata batas melainkan juga Undang-Undang mengenai konservasi di Indonesia

Di daerah perbatasan Malaysia memang pembangunan lebih maju. Sepanjang daerah perbatasan sudah dibangun jalan-jalan darat. Ironisnya, dengan membangun jalan tersebut, pihak Malaysia juga membuat aksesibilitas jalan sehingga mempermudah pencurian kayu di wilayah Indonesia. Kendala lain yang dimiliki oleh Koramil dalam usaha pengamanan wilayah di sini adalah tidak dimilikinya peta topografi, sehingga walaupun mempunyai teknologi GPS, dalam pengecekan lapangan akan menemui kesulitan.

Untuk wilayah perairan, pihak Indonesia tampaknya juga menghadapi masalah tidak adanya sarana yang memadai untuk melakukan patroli di laut, sehingga pengamanannya pun sulit dilakukan. Sementara ini pihak Indonesia mempunyai Pos gabungan di daerah Sungai Nyamuk yang terdiri dari peleton Marinir Angkatan Laut dan 1 Peleton dari Batalyon 613 Balikpapan. Sarana perahu yang

memadai tampaknya sangat diperlukan oleh pihak pengamanan, mengingat pernah ada kasus penembakan marinir oleh pihak AL Malaysia, karena *speedboat* yang digunakan oleh mereka hanyut ke wilayah perairan Malaysia dan pihak Malaysia langsung menembak pasukan tersebut. Tampaknya pihak Malaysia agak khawatir pasukan tersebut bagian dari issue pulau Sipadan dan Ligitan yang sekarang sedang menjadi masalah di Mahkamah Internasional. Selain itu, adanya ancaman lain yang seringkali dialami oleh kapal-kapal adalah perompakan oleh orang-orang dari Filipina, karena daerah tersebut juga berdekatan dengan wilayah perairan Filipina. Upaya untuk melakukan pengamanan daerah tersebut sebetulnya dapat dilakukan dengan kerjasama antara pihak militer di Indonesia dengan pihak militer Malaysia. Hingga kini hubungan langsung hanya dilakukan di tingkat Komandan Resort Militer (KOREM), dan bukan di tingkat Koramil.

Mengenai penyelundupan yang dilakukan oleh masyarakat, menurut informasi sulit sekali untuk diberantas, apalagi dengan pola tempat tinggal penduduk yang berada di pantai. Saat air laut pasang, langsung berada di kolong-kolong rumah penduduk dan perahu dapat langsung masuk ke rumah penduduk masing-masing, sehingga menyulitkan identifikasi dan monitoring. Keadaan ini banyak ditemui di wilayah perkotaan Nunukan. Keterbatasan jumlah personil juga menjadi kendala dalam pengendalian penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jumlah personil yang ada di Koramil hanya 30 orang

yang harus dibagi-bagi, dan harus menggunakan strategi yang diluar kebiasaan struktur organisasi setingkat Koramil, seperti pembentukan komandan Pos di Sebatik dan Pos di Sebuku. Dari jumlah 30 orang tersebut, ditempatkan di Pos Sebatik sebanyak 7 orang dan di Sebuku 10 orang

Beberapa pihak yang berada di lapangan, sering merasa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun daerah perbatasan ini masih kurang serius. Pemerintah tampaknya belum melakukan terobosan-terobosan yang penting untuk daerah perbatasan, seperti pembangunan perkebunan atau berbagai industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah tersebut sehingga dapat menahan para pekerja ilegal ke Malaysia. Padahal beberapa daerah mempunyai potensi yang baik untuk pertanian. Seperti di Sebatik saja, hasil sawah dapat mencapai 7,07 ton Gabah Kering Giling (GKG), yang menandakan tanahnya subur dan lebih baik dibandingkan dengan tanah di Pulau Nunukan. Daerah yang dianggap potensial untuk pengembangan kelapa sawit berada di Sebuku, Semanggaris dan Sebatik. Memang ada informasi pihak Hankam akan membangun perkebunan kelapa sawit di pulau Sebatik, namun realisasinya belum ada.

Menurut beberapa informan yang diwawancarai, pembangunan untuk masyarakat Indonesia jauh lebih penting, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. Berbagai kerawanan yang ada di daerah tersebut sebetulnya dikarenakan upaya penduduk untuk mencari makan

dan mempertahankan hidup dan bukan untuk mencari kekayaan. Pihak keamanan merasa dalam posisi yang dilematis dalam melakukan pengamanan terhadap warga Indonesia, sebab dalam bahasa mereka, kalau menghadapi pengusaha Malaysia bisa dengan cara *babat bersih*, tapi hal seperti ini sulit dilakukan untuk warga Indonesia. Bahkan seringkali kalau ada pelanggaran hanya dinasihati untuk tidak dilakukan lagi, karena mereka tahu rakyat melakukan itu untuk mempertahankan hidupnya. Salah satu upaya untuk dapat mencegah kerawanan di daerah Nunukan adalah dengan mengembangkan suatu kerjasama antar pemerintah daerah yang diduga sebagai daerah pengirim tenaga kerja dengan pemerintah daerah Kalimantan Timur, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan deportasi penduduk dari wilayah Malaysia.

Masalah sosial yang ada di wilayah daratan Nunukan, yaitu di Sebuku dan Semanggaris timbul karena daerah tersebut merupakan medan yang berat dan kondisi masyarakat yang masih miskin, tinggal terpencar-pencar dengan wilayah desa tersendiri dan tidak mau menggabungkan diri. Upaya yang dilakukan oleh pihak Koramil adalah dengan menempatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) --yang karena keterbatasan jumlah personil-- maka seorang Babinsa merangkap 2-3 desa dalam kerangka pembinaannya. Pembinaan teritorial untuk daerah desa-desa pedalaman ini adalah menerjunkan anggota ---diantaranya---untuk membina pertanian masyarakat seperti penanaman jagung dan kacang untuk menggantikan *iloi* sebagai

makanan pokok yang dianggap nutrisinya kurang baik dan berbahaya bagi kesehatan. Program ini dibantu pula oleh kegiatan HPH Bina Desa yang ada di daerah tersebut. Namun kendala yang ada di lapangan adalah minimnya dana operasional yang ada, yang hanya mencapai Rp 125.000/per bulan. Padahal sekali jalan ke Sebuku mungkin akan menghabiskan sekitar Rp 250.000,- untuk bahan bakar, belum untuk logistik dan sebagainya. Namun pihak Koramil *dengan cara apapun* harus datang ke lokasi.

Pembinaan di wilayah Sebuku memang agak lain, mengingat kondisi alam yang sulit dan masih kuatnya pengaruh adat dalam hal kepemimpinan dan ritual lainnya. Pengalaman para anggota aparat keamanan dalam melakukan pendekatan kultural terhadap masyarakat di pedalaman cukup menarik, seperti bagaimana mereka harus menghadap kepala adat terlebih dahulu dan baru diterima, mau menunggu kegiatan ritual hingga cara mereka 'mendandani' perempuan yang tadinya tidak mengenal pakaian hingga mau bersolek.

Kecamatan Nunukan

Seperti yang disebutkan terdahulu, wilayah Kecamatan Nunukan terbagi atas dua bagian, pertama di wilayah *mainland* Kalimantan dan kedua berada di pulau Nunukan. Dalam Sistem Informasi Geografis, wilayah kecamatan ini dapat ditemukan dalam posisi 40°15 LU dan 117°40 BT, dengan luas daerah diperkirakan

sekitar 5.170 km². Daerah ini berbatasan dengan wilayah Sabah, Malaysia di sebelah Utara, di sebelah Selatan wilayah Sembakung, sebelah Timur Laut Sulawesi dan sebelah Barat dengan Kecamatan Lumbis.

Dinamika sejarah wilayah Nunukan, tidak terlepas dari kejadian-kejadian penting sejarah di daerah perbatasan, khususnya pada saat konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, dimana daerah Nunukan menjadi basis penting bagi pertahanan Indonesia pada waktu itu. Sebetulnya sejarah daerah ini tidak terlepas dari peran orang Tidung yang menjadi perintis awal penduduk yang bermukim di daerah tersebut, walaupun diakui orang Tidung di daerah tersebut juga sebagai pendatang dari daerah lain

Terdapat suatu pola ekologi yang sangat berbeda antara wilayah Nunukan daratan dengan Nunukan pulau, yang menyebabkan terdapat perbedaan potensi alam, maupun aktivitas sosial. Nunukan daratan didominasi oleh kondisi hutan hujan tropis dengan ciri pemukiman penduduk yang mengikuti aliran sungai, sedangkan wilayah Nunukan pulau terdiri dari dua karakteristik, yaitu penduduk yang menetap di daerah Nunukan kota dan penduduk yang berada 'jauh dari kota' namun pemukiman mereka mengikuti pola jalan yang dibuat oleh pemerintah, untuk memudahkan aksesibilitas.

Komposisi penduduk antara Nunukan daratan dengan Nunukan pulau juga menampilkan suatu karakteristik yang sangat berbeda. Nunukan daratan yang relatif mempunyai aksesibilitas yang sulit ke

wilayah Malaysia, menyebabkan daerah tersebut bukan merupakan daerah tujuan migran ataupun sekedar untuk melakukan transit. Hal ini berbeda dengan wilayah Nunukan pulau yang merupakan daerah transit bagi pekerja yang akan bekerja di daerah Tawau Malaysia. Oleh sebab itu dari segi kepentingan mobilitas, daerah Nunukan daratan telah ditetapkan pemerintah sebagai daerah Transmigrasi, khususnya dengan pola PIR di daerah Semunat, yang hingga kini telah ada 2 UPT, dan direncanakan akan dibangun kembali 2 UPT dengan mendatangkan transmigran dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini berbeda dengan kondisi di wilayah pulau yang merupakan daerah transit, dengan pemusatan penduduk di wilayah perkotaan dengan tingkat sirkulasi penduduk yang cepat, yang tersebar di empat desa di wilayah Nunukan pulau, yaitu Nunukan Timur, Nunukan Barat, Nunukan Utara dan Nunukan Selatan. Penduduk terpadat di wilayah Nunukan Utara yang merupakan 'pusat kota' Nunukan.

Apabila dilihat dari segi infrastruktur wilayah, Nunukan pulau merupakan suatu daerah yang sangat lengkap, yang mungkin 'terlalu lengkap' untuk sebuah pulau kecil, karena di pulau tersebut terdapat pelabuhan kapal besar, pelabuhan kapal dan motor boat, pasar-pasar, adanya kantor Imigrasi, pusat daerah hiburan dan berbagai aktivitas lainnya yang terkait erat dengan fungsinya sebagai daerah transit bagi para pekerja yang hendak berangkat ke Malaysia, pulang ke daerahnya, atau yang terdampar dan tidak dapat pulang kembali ke daerahnya

Hubungan sosial dan jaringan sosial antara warga di wilayah Indonesia dan di wilayah Malaysia sebetulnya banyak diwarnai oleh hubungan perkerabatan yang erat. Keterpisihan mereka secara administratif negara diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya (1) sejarah migrasi pada masa kolonial, (2) perpindahan penduduk karena strategi negara pada masa 1960-1970 dan (3) motif mencari kehidupan yang lebih baik di wilayah Malaysia. Banyak informasi menyebutkan bahwa sepanjang garis perbatasan di wilayah Malaysia -- *yang bermata pencaharian sebagai peladang* -- adalah orang-orang dari Indonesia yang tinggal pasca konfrontasi tahun 1964. Pada saat menjelang konfrontasi, di daerah Pujungan dan Krayan banyak warga di wilayah Indonesia masuk ke wilayah Malaysia untuk membuat perkampungan yang didukung oleh negara yang pada waktu itu merupakan kebijakan regim Soekarno agar mereka dapat mengisi daerah Malaysia, sehingga pasukan Indonesia nantinya akan lebih mudah merebut daerah Malaysia, dan batas negara akan bergeser ke wilayah Malaysia. Strategi regim Soekarno pada waktu itu belum tuntas benar, karena di Indonesia meletus G 30 S PKI tahun 1965, sehingga politik Indonesia lebih mengarah kepada pembenahan dalam negeri. Dalam situasi ini, pihak Malaysia dengan segera mengambil strategi merangkul masyarakat yang berada di sepanjang garis batas, dan mereka bahkan menjadi warga Malaysia di negara bagian Sabah dan Serawak.

Hubungan dan jaringan sosial yang seringkali diwarnai oleh kesamaan etnik menjadi salah satu faktor dari tingginya keinginan untuk mencari pekerjaan di Malaysia, karena para calon TKI ini sebagian besar mempunyai informasi dari rekan-rekan satu daerah, bahkan jaringan calo yang dimilikinya adalah berasal dari daerahnya sendiri. Tiga etnik dominan di daerah Nunukan adalah Bugis, Flores dan Toraja. Ketiga etnis ini mempunyai sejarah panjang keberadaannya di Nunukan, selain suku asli yaitu orang Tidung. Etnis Bugis merupakan etnis yang paling dominan dan menguasai hampir seluruh sektor ekonomi dan berbagai jaringan perdagangan maupun pengiriman tenaga kerja². Sedangkan etnis Flores kebanyakan berada di sektor pekerjaan buruh kasar. Etnis Toraja menguasai sektor pertanian dan mereka inilah yang menjadi penyuplai sayuran yang penting bagi daerah Nunukan, namun demikian ada pula etnis Bugis yang menjadi petani dengan membeli tanah dari orang Tidung. Kelompok Etnis asli, yaitu orang Tidung mengelompok di sungai Bilal yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Mereka tinggal di Desa Nunukan Barat.

Sebagai suatu daerah yang bersifat multi etnis dan diwarnai oleh dominasi pendatang, maka yang banyak terjadi adalah proses

² Walaupun etnis Bugis dianggap sebagai etnis dominan, namun konflik diantara orang Bugis itu sendiri cukup keras, berdasarkan keterangan seorang Jawa di daerah tersebut, hubungan saling memakan diantara orang Bugis itu sendiri cukup keras. Misalnya antara Bugis Wajo dengan Bugis dari kabupaten lainnya. Sehingga yang terjadi adalah segregasi yang lebih kecil lagi, yaitu pengelompokan berdasarkan daerah asal.

penyesuaian yang justru dilakukan oleh orang Tidung terhadap sistem budaya pendatang, dan bukan pendatang yang mengadaptasikan pada sistem budaya lokal. Selain itu, salah satu dampak sebagai kota transit adalah rendahnya rasa memiliki di kalangan pendatang terhadap kota Nunukan yang dapat dilihat dari partisipasi yang rendah terhadap masalah sanitasi kota, dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Kecamatan Sebatik

Secara definitif, daerah Sebatik menjadi kecamatan sejak bulan April 1997. Sebelumnya, desa-desa di Sebatik menjadi bagian dari Kecamatan Nunukan. Oleh sebab itu, berbagai data sekunder mengenai potensi wilayah ini belum dapat dijumpai, sebab masih menjadi bagian dari Kecamatan Nunukan. Daerah Sebatik menjadi bagian penting dari dinamika daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya dengan daerah pelabuhan Tawau, mengingat jarak yang sangat dekat antara wilayah Pulau Sebatik dengan wilayah Tawau, Malaysia. Bahkan Pulau Sebatik terbelah dua, menjadi wilayah Indonesia dan wilayah Malaysia. Berbeda dengan wilayah Nunukan yang menjadi transit bagi para pencari kerja ke Tawau, fungsi daerah Sebatik lebih sebagai pensuplai berbagai kebutuhan produk pertanian ke wilayah Tawau. Sebaliknya pasar Tawau menjadi bagian penting untuk pemenuhan kebutuhan barang industri penduduk Sebatik.

Dari segi fisik, wilayah Pulau Sebatik Indonesia ini merupakan pulau kecil yang potensial untuk tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Tanaman pangan yang cukup dominan di Sebatik adalah sawah (tadah hujan) dan tanaman palawija, sedangkan perkebunan yang potensial di daerah tersebut adalah perkebunan Kakao, yang menjadi basis ekonomi penting bagi masyarakat. Hampir seluruh Penduduk asli mempunyai kebun kakao dalam berbagai tingkatan luas areal.

Daerah permukiman penduduk di Kecamatan (Pulau) Sebatik terkumpul di lima desa, yaitu Desa Setabu, Desa Sungai Nyamuk, Desa Sungai Pancang, Desa Tanjung Aru dan Desa Tanjung Karang. Desa-desanya ini dihubungkan oleh satu jalan tembus yang mengitari pulau dan menjadi prasarana penting untuk pengangkutan berbagai hasil pertanian (lihat peta 1). Untuk kepentingan lalu-lalang penduduk ke wilayah Malaysia, banyak sekali *boat* yang dapat disewa menuju Tawau, sedangkan para pedagang sayuran melalui daerah Aji Kuning sebagai daerah pintu masuk ke wilayah Malaysia.

Masuknya penduduk ke wilayah pulau Sebatik, dapat dikatakan relatif tidak terlalu lama, yaitu sesuai dengan HUT Sebatik yang mereka peringati setiap tanggal 28 Nopember, untuk memperingati pertama kali mendaratnya satu keluarga Bugis di daerah tersebut pada tanggal 28 Nopember 1968. Sebelumnya memang ada satu keluarga Buton yang tinggal di daerah pantai yang telah ada di daerah tersebut. Keluarga perintis (keluarga Bugis) tersebut, telah mempunyai pengalaman melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia, Malaysia dan

Filipina. Selanjutnya mereka menetap di daerah tersebut dan menjadi bagian penting dari sejarah lokal daerah tersebut, maupun penguasaan asset-asset sumber daya lahan yang ada. Mulai tahun 1970-an mulai berdatangan keluarga-keluarga Bugis lainnya di daerah tersebut untuk menjadi nelayan dan petani. Dengan demikian, sejak awal di daerah tersebut ada masyarakat yang menjadi nelayan, menjadi petani dan kombinasi keduanya. Keluarga perintis tersebut membagi-bagi tanah di daerah tersebut dalam blok-blok dan dapat digunakan oleh para pendatang.

Periode awal 1970-1985, ekonomi daerah Sebatik didominasi oleh usaha-usaha pertanian yang berorientasi kebutuhan keluarga dan belum menampakkan suatu bentuk perekonomian yang lebih komersial, walaupun perkembangan ke arah tersebut mulai nampak, dengan adanya rintisan usaha transportasi laut dan perdagangan antara Sebatik dan Tawao. Bentuk usaha subsisten dan semi komersial yang ada di Sebatik pada waktu yang lalu adalah penjualan sayuran dan palawija untuk konsumsi Tawao dan sedikit untuk Tarakan, mengingat jarak yang terlampau jauh

Pada wala tahun 1985 mulai ada usaha penanaman Kakao kecil-kecilan yang dilakukan oleh migran Bugis, yang bibitnya diperoleh dari Tawao. Pada saat itu pengolahan tanaman dilakukan oleh seorang yang mempunyai pengalaman bekerja di perkebunan Kakao di Tawao, yang dideportasi ke wilayah Indonesia. Usaha rintisan kakao pertama kali sekitar 2 ha, dan bibit 300 pohon. Usaha rintisan inilah yang kelak

menjadi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat Sebatik hingga sekarang ini. Ekonomi produktif di Sebatik ini ditunjang pula oleh adanya usaha jasa transportasi angkutan laut dengan adanya *boat* penumpang dari Tarakan.

Perekonomian Sebatik dan Tawao sebetulnya saling bergantung, Tawau membutuhkan barang hasil pertanian dari Sebatik, sebaliknya Sebatik banyak membutuhkan barang industri dari Tawao, mengingat jarak untuk ke Nunukan dan Tarakan terlalu jauh. Oleh karena ketergantungan barang industri demikian besar terhadap Tawau, maka transaksi perdagangan lebih banyak dilakukan dengan menggunakan uang ringgit daripada rupiah. Sebetulnya pemerintah telah mencoba membuat peraturan untuk menggunakan uang rupiah dalam pembayaran. Namun hal tersebut sulit dilakukan, mengingat segala macam pembelian barang di Tawau dilakukan dengan ringgit, sehingga apabila dikonversi dalam rupiah, pedagang akan merasa rugi. Namun demikian, ada juga yang mengkonversi nilai ringgit kedalam nilai rupiah, seperti untuk sektor jasa transportasi yang menghitung nilai Rp 1000, setara dengan M\$1.

Kelembagaan yang ada di wilayah Sebatik mencerminkan suatu pola fungsi pelayanan dan pengamanan daerah perbatasan yang dapat dilihat dari adanya Pos Angkatan Laut, Pos Marinir, Pos Militer, Kepolisian, Pasukan Penjaga perbatasan, Imigrasi, Syahbandar dan Bea Cukai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa daerah Sebatik menjadi wilayah penting dari segi pelayanan untuk daerah perbatasan. Pelayanan

sosial lainnya yang merupakan 'khas' daerah perbatasan adalah adanya pasar yang tidak hanya menjual barang konsumsi lokal melainkan dibanjiri dengan barang-barang produk dari luar. Sebagai suatu daerah yang berstatus daerah perbatasan, maka secara kelembagaan terdapat beberapa lembaga yang mempunyai kaitan erat dengan kepentingan perbatasan, yaitu Pos Imigrasi, Pos Bea Cukai, Pos Pembantu Syahbandar, Pos Angkatan laut, Marinir dan berbagai layanan masyarakat seperti Puskesmas, Polsek, Posramil dan prasarana pasar.

BAB III

POLA MOBILITAS PENDUDUK

Oleh : Suko Bandiyono

Mobilitas penduduk terjadi karena adanya sejumlah perbedaan antara suatu tempat, terutama dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Sebagai respon masyarakat terhadap perbedaan kemampuan ekonomi telah menumbuhkan kesadaran penduduk adanya “tekanan” untuk melakukan mobilitas menuju daerah yang menjanjikan adanya kesempatan kerja yang lebih baik. Pada umumnya penduduk melakukan mobilitas dari daerah yang kelebihan tenaga kerja dan berpenghasilan rendah menuju daerah yang kekurangan tenaga kerja dan dapat menawarkan upah yang lebih tinggi.

Respon terhadap berbagai kesempatan kerja berbeda antara daerah satu dengan daerah lain sehingga menimbulkan perbedaan dalam pola mobilitas baik volume maupun ciri-ciri mereka. Uraian pada bagian ini akan menjelaskan tentang berbagai pola mobilitas penduduk yang lebih menekankan pada tenaga kerja baik yang bersifat internal maupun bersifat internasional. Sebelum mendeskripsikan pola mobilitas tenaga kerja akan diawali dengan uraian singkat tentang sejarah mobilitas penduduk di daerah penelitian.

3.1. Sejarah Mobilitas

Keberadaan orang Indonesia di Sabah tidak terlepas dari hubungan sejarah yang sudah berjalan beberapa abad. Di Kalimantan Timur bagian utara berdiam suku Tidung yang diperkirakan berasal dari Indocina. Proses migrasi orang Indocina ke Kalimantan diperkirakan pada abad pertama dan abad ke dua sesudah masehi. Mereka masuk ke daerah Kina Batanga di Kalimantan dan ada pula yang masuk ke daerah Sulu yang saat ini masuk Filipina. Wilayah permukiman suku Tidung sangat luas yang mencakup Kalimantan Timur bagian utara (P. Bunyu, Tarakan, Nunukan, Sebatik, Sebuku, Sebakung, P. Mandul, Sekatak dan Salimbatu). Adapun di daerah Sabah meliputi 20 daerah (Sudung, Kelabakan, Balung, Kelumpang, Mabul, Timbunmata, Bt. Madai, Muara Segama, Tungku, Kitaburanga, Sandakan, Labuk, Sagat, Luwatan, Mortai, Tawau, Daerah Atas, Tinagat, Mamalua dan Indrasaba). Daerah tersebut disebut sebagai tanah Tidung yang meluas dari Kudat sampai Tanjung Mangkaliat.

Orang Tidung yang sebagian besar tinggal di daerah pantai mulai mendapat pengaruh agama Islam pada abad 13, sehingga orang-orang Tidung cenderung menggunakan nama-nama Arab. Dalam proses perkembangannya wilayah Tidung telah mendesak daerah orang Dayak Kenya dan Londaya yang tinggal di pedalaman yang bergunung. Penduduk Sabah dan penduduk asli Bulungan ternyata mempunyai satu keturunan. Oleh karena itu banyak keluarga orang

Tidung di Bulungan yang mempunyai kerabat di Sabah dan sebaliknya. Salah satu sebab banyak orang Tidung di Sabah adalah akibat perang Bulungan (1816) sehingga orang-orang di Sebuku pindah ke Sandakan dan Lobuk. Sampai saat ini mereka masih menjalin hubungan antara lain dengan saling berkunjung meskipun telah terpisah dalam konsep negara. Dalam berkomunikasi mereka masih menggunakan bahasa Tidung.

Penduduk yang tinggal di Sabah selain orang Tidung juga ada etnik setempat yang lain yaitu Kadazan dan Murut dan banyak dijumpai etnik cina dan orang-orang yang berasal dari propinsi lain di Indonesia misalnya dari Sulawesi Selatan, Jawa, Nusa Tenggara bahkan dari Sumatera. Berdasarkan informasi dari beberapa orang tua di daerah perbatasan dikatakan bahwa keberadaan mereka di Sabah terjadi jauh sebelum ada Border Crossing Agreement tahun 1967. Mereka melakukan migrasi ke Malaysia antara lain sebagai respon terhadap kesulitan ekonomi dan berbagai pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada tahun enam puluhan. Banyak diantara mereka menjadi askar (tentara), menjadi pegawai kerajaan, menjadi pedagang dan menjadi petani. Oleh karena itu pada saat terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1963-1964 telah terjadi pertempuran antara tentara Republik Indonesia dengan orang asal Indonesia yang menjadi askar.

Semenjak tahun 1967, arus migrasi penduduk dari Indonesia terutama dari Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur yang masuk

ke Sabah cenderung mengalami peningkatan. Pada saat itu sudah mulai diberlakukan pos lintas batas dan setelah tinggal di Sabah mereka dengan mudah memperoleh kartu identifikasi (Kartu Tanda Penduduk) yang selanjutnya ada kebijaksanaan di Sabah untuk membolehkan menjadi warga negara kerajaan Malaysia bagi mereka yang telah punya kartu identifikasi. Pada saat itu sebagian mereka menjadi warga Malaysia dan sebagian lagi telah memilih tetap sebagai warga negara RI.

Salah satu faktor utama penduduk Indonesia cenderung bermigrasi ke Sabah adalah dibukanya perkebunan dalam skala besar di daerah tersebut. Perkebunan kelapa sawit dan coklat di Sabah mulai dikembangkan pada tahun tujuh puluhan. Ekstensifikasi perkebunan yang pesat telah mengorbankan hutan di Sabah. Dampak dari menipisnya hutan di Sabah adalah timbulnya pecurian kayu di daerah perbatasan Bulungan.

Mobilitas penduduk ke Sabah mempunyai hubungan erat dengan dinamika masyarakat di daerah perbatasan di Bulungan, terutama di daerah pesisir dan kepulauan. Di pulau Nunukan pada zaman Belanda tepatnya pada tahun tigapuluhan, ada usaha perkayuan yang pengangkutan dari daratan ke pantai menggunakan lori. Pada saat itu banyak pekerja dari Jawa, terutama dari Banyumas. Mereka umumnya membawa istri dan anak. Pekerja dari Sulawesi Selatan juga masuk ke Nunukan. Mbah Kartomihardjo adalah salah satu dari orang Jawa yang bekerja di proyek pengangkutan kayu di Nunukan.

Keturunan orang Jawa banyak yang tetap tinggal di pulau tersebut dan kebanyakan tinggal di Kampung Jawa. Pada saat ini di Nunukan ada sekitar 1000 orang Jawa. Mereka mempunyai perkumpulan sosial "Mitra Langen Lestari". Gelombang ke dua masuknya orang Jawa di Nunukan pada tahun enampuluhan yaitu berkaitan dengan konfrontasi dengan Malaysia yang banyak memerlukan militer dan sukarelawan. Demikian pula orang-orang asal Sulawesi Selatan, bahkan jumlah pendatang makin meningkat pesat. Orang asal Sulawesi terkenal ulet dalam berusaha baik sebagai pedagang, buruh maupun sebagai petani. Oleh karena itu pada saat ini mayoritas penduduk pulau Nunukan adalah orang-orang Sulawesi Selatan.

Mobilitas orang-orang asal Sulawesi sangat tinggi. Mereka tidak hanya berhenti di pulau Nunukan, tetapi banyak yang menyeberang masuk ke Tawau dan menyebar luas di daerah Sabah antara lain di Sepitang, Tenom, Keningau, Penampang, Marudu, Sandakan, Lahat Datu, Sampurna dan Tawau. Proses masuknya pendatang tersebut melalui cara berantai atas dasar hubungan primordial suku bangsa dan daerah asal. Orang dari Sulawesi Selatan juga menjadi pionir pembangunan di Pulau Sebatik. Pada tahun enampuluhan mereka pertama kali membuka tanah di Sebatik dan saat ini mereka telah menjadi penduduk dominan di pulau tersebut. Umumnya mereka bekerja sebagai pekebun (coklat, kelapa, pisang), nelayan, pedagang dan usaha transportasi laut. Perkembangan di Sebatik tidak dapat dipisahkan dengan kota Tawau yang mampu

menyerap berbagai hasil komoditi pertanian dan mensuplai berbagai kebutuhan penduduk di daerah tersebut. Oleh karena itu di pulau Sebatik di samping uang rupiah juga berlaku uang ringgit untuk alat pembayaran sehari-hari. Saat ini setiap seperempat jam ada motor speed boat yang bolak-balik menuju Tawau. Setiap orang yang menuju Tawau atau sebaliknya dipungut biaya Rp. 5000 atau 5 ringgit.

Awal keberadaan orang Nusa Tenggara Timur terutama dari daerah Larantuka di Nunukan dan Tarakan berkaitan dengan keberadaan Jepang di daerah tersebut. Pada waktu penjajahan Jepang banyak didatangkan tenaga romusa dari daerah lain, termasuk dari Nusa Tenggara. Mereka dipekerjakan untuk mengangkut kayu dan membuat basis pertahanan. Sebagian dari mereka tetap berada di daerah tersebut meskipun telah berakhirnya penjajahan Jepang. Hal ini telah mengawali proses migrasi tenaga kerja asal Larantuka, terutama dari Adonara. Proses migrasi orang Larantuka ke daerah perbatasan makin santer dalam kaitannya dengan konfrontasi dengan Malaysia di mana mereka datang sebagai tenaga sukarela dan militer pada pertengahan enam puluhan. Banyak orang Indonesia, termasuk orang dari Nusa Tenggara yang menyeberang ke Sabah sebagai mata-mata. Setelah berakhirnya konfrontasi tahun 1966, sebagian orang Indonesia di Sabah tetap bertahan di Sabah walaupun telah masuk menjadi bagian kerajaan Malaysia. Sejak tahun tujuh puluhan terjadi gelombang mobilitas tenaga kerja ke Sabah sejalan meningkatnya kebutuhan tenaga kasar, terutama pada sektor perkebunan. Di Sabah telah

berkembang pesat ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit dan coklat. Penyerapan tenaga kasar diperkebunan cenderung menurun setelah dasawarsa tujuh puluhan karena telah masuk tahap produksi dan perawatan kebun. Sebagian dari tenaga kerja juga bekerja sebagai pembalak kayu dan jasa. Termasuk pekerjaan jasa adalah pembantu rumah tangga dan penjaga kedai.

Di daerah perbatasan yang masuk wilayah daratan juga terjadi mobilitas tradisional ke Malaysia karena keterkaitan etnik. Mereka tetap melakukan hubungan tradisional sampai sekarang yaitu mengunjungi keluarga, berkebun dan perkawinan. Disamping itu mereka juga menjual hasil hutan ke Malaysia antara lain kayu, rotan, karet, damar, jelutung dan tengkawang. Dari Malaysia membeli kebutuhan sehari-hari seperti sabun, gula dan garam. Fenomena yang perlu diperhatikan adalah terjadinya arus migrasi ke luar penduduk pedalaman dalam jumlah besar misalnya dari Apokayan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Pujungan, Long Midang, dan Tanjung Palas. Migrasi penduduk pedalaman tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak penjajahan Belanda.

3.2. Pola Mobilitas Internal

Mobilitas internal yaitu gerakan penduduk secara horizontal yang terjadi di dalam negeri, dalam hal ini di daerah perbatasan Kabupaten Bulungan. Pola mobilitas internal yang terjadi di Bulungan

dapat terjadi di daerah pantai/kepulauan dan di daerah daratan pulau Kalimantan baik yang bersifat permanen maupun nonpermanen.

Pola mobilitas internal di Bulungan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Gerakan penduduk dalam kabupaten Bulungan
2. Gerakan penduduk yang masuk dari luar kabupaten dan sebaliknya.
3. Gerakan penduduk yang terkait dengan mobilitas internasional.

Uraian terhadap hal ini akan dikaitkan dengan mobilitas internasional.

Mobilitas penduduk dalam Kabupaten Bulungan telah diuraikan dalam sejarah migrasi yaitu terjadinya perpindahan penduduk pedalaman ke daerah hilir pantai timur bahkan ke Malaysia. Rendahnya pelayanan sosial, kesulitan ekonomi dan keadaan geografi yang berat telah memaksa mereka harus bermigrasi ke luar. Mereka bermigrasi secara bertahap selama bertahun-tahun menelusuri sungai-sungai (lihat juga Bab II). Umumnya migrasi tersebut dilakukan oleh beberapa kelompok keluarga sambil bercocok tanam, lantas pindah lagi dan seterusnya sampai mencapai daerah tujuan. Daerah tujuan migrasi antara lain daerah Tanjung Selor dan Tarakan. Permukiman di Tanjung Selor antara lain di Desa Jelarai, kilometer 8 dari ibukota kabupaten dan di sekitar gereja dekat kampung salim Batu (di pinggiran Kota Tanjung Selor). Mereka tinggal dipinggir sungai dan umumnya berusaha tani dan kerajinan. Akibat perpindahan tersebut, penduduk di daerah pedalaman cenderung mengalami penurunan

sehingga jumlah penduduk desa yaitu di bawah 50 kepala keluarga. Beberapa desa bahkan hilang antara lain desa Long Bungan. Diperkirakan jumlah migran keluar pada tahun-tahun 1955, 1973 dan 1990 masing-masing sebanyak 23 ribu, 13 ribu dan 4,7 ribu jiwa.

Mobilitas dalam kabupaten Bulungan lebih menonjol di daerah pantai/kepulauan daripada di daerah pedalaman. Mobilitas yang tinggi di daerah pantai karena ditunjang oleh kemudahan akses transportasi, kepadatan penduduk yang relatif tinggi dan adanya pusat pertumbuhan yaitu kota kabupaten yaitu Tanjung Selor, kota Nunukan dan kota Tarakan yang saat ini telah menjadi kotamadya. Kota tersebut berperan sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Komoditi yang datang dari luar daerah masuk ke kota tersebut dan selanjutnya perdesaan. Kota tersebut juga berfungsi sebagai tempat pemasaran produksi pertanian dari daerah perdesaan. Hasil pertanian yang dipasarkan ke Nunukan seperti buah langsung dan durian antara lain datang dari Sembakung dan Sebuku, Transportasi yang umumnya digunakan baik mobilitas orang maupun barang umumnya menggunakan transport air yang menggunakan motor tempel.

Kabupaten Bulungan juga menjadi daerah tujuan migrasi dari daerah lain. Migrasi masuk ke kabupaten Bulungan dapat dibedakan mereka yang pindah secara swakarsa (*voluntary migration*). Daerah transmigrasi tersebut yaitu di Jelarai (UPT 1 s/d 3) Salimbatu (UPT 1 s/d 6) dan Tg Kerangjang Jumlah transmigran di daerah tersebut telah mencapai 16 ribu jiwa. Mereka datang dari Jawa, Nusa Tenggara Barat

dan Nusa Tenggara Timur. Perkembangan lokasi transmigrasi di Jelarai telah dikaitkan dengan jalan trans Kalimantan poros selatan. Transmigrasi yang ditempatkan di Bulungan selain pola pangan juga pola PIR kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Keberadaan program transmigrasi di daerah tersebut telah memberi kontribusi positif terhadap peningkatan produksi hasil pertanian pangan.

Seperti telah diterangkan pada sejarah mobilitas penduduk, banyak penduduk dari propinsi lain yang bermigrasi ke Bulungan yang sudah berlangsung lama yang terkait dengan kegiatan perkayuan dan peristiwa konfrontasi pada pertengahan tahun enam puluhan. Arus migrasi yang mengalami peningkatan ke daerah tersebut sejalan dengan peningkatan pembangunan. Perkembangan di daerah perbatasan pantai yaitu Nunukan dan Sebatik sangat dipengaruhi oleh kota Tawau di Sabah. Kota Tawau telah menjadi pesat pertumbuhan yang sangat berperan dalam menggerakkan ekonomi daerah perbatasan. Tawau telah menjadi tempat pemasaran hasil hutan dan hasil pertanian dan sebaliknya mensuplai kebutuhan ekonomi daerah perbatasan. Nunukan telah menjadi pintu gerbang mobilitas ke Sabah telah menjadi magnet yang menarik penduduk dari Sulawesi, Nusa Tenggara dan Jawa. Migran yang masuk ke daerah tersebut banyak bekerja pada sektor jasa, perdagangan dan pertanian. Nunukan yang akan menjadi kota administratif terdapat 26 instansi. Kota Nunukan telah berkembang usaha jasa transportasi dan jasa tenaga kerja (PJTKI) sebanyak 16 buah. Salah satu dari PJTKI adalah cabang PT. Andromeda. Jasa

tenaga kerja yang mencolok adalah calo tenaga kerja yang lebih senang disebut pengurus tenaga kerja. Calo tenaga kerja tersebut telah membantu calon tenaga kerja Indonesia ilegal dengan imbalan ongkos yang tinggi.

Penduduk yang masuk ke daerah tersebut umumnya laki-laki dan berada pada umur produktif. Kedatangan mereka tidak lepas dengan migran yang datang sebelumnya yang membawa pendatang baru. Tujuan utama migrasi masuk daerah perbatasan adalah memaksimalkan pendapatan guna meningkatkan kemampuan ekonomi. Penduduk yang masuk ke daerah perbatasan cenderung lebih besar daripada mereka yang meninggalkan. Hal ini tercermin dari angka pertumbuhan penduduk di daerah tersebut yang mencapai sedikit di atas 3 persen setahun. Data penumpang kapal dalam negeri di pelabuhan Nunukan dalam tahun 1992-1997 menunjukkan bahwa jumlah penumpang tiba sebesar 494.563 jiwa dan yang berangkat meninggalkan pelabuhan Nunukan sebanyak 496.346 jiwa. Selama kurun waktu tersebut lebih banyak yang pergi daripada yang datang dengan selisih 1783 jiwa. Penumpang yang lebih banyak meninggalkan Nunukan tersebut terjadi pada tahun 1996 dan 1997. Mereka yang tiba dan berangkat tersebut sebagian besar adalah tenaga kerja yang di Sabah. Ada dua hal yang mendorong mereka meninggalkan lewat pelabuhan Nunukan: (1) terjadinya deportasi tenaga kerja Indonesia ilegal; (2) lesunya perekonomian Nunukan

akibat sejak Januari 1997 Pemerintah Malaysia melarang masuknya kayu gelondongan dan kayu gergajian dari Indonesia.

Tabel 3.1. Arus Penumpang Kapal Dalam Negeri Di Pelabuhan Nunukan

Tahun	Penumpang	
	Tiba	Berangkat
1992	46.855	37.449
1993	68.442	65.073
1994	76.184	75.314
1995	108.010	103.629
1996	101.099	113.154
1997	93.973	101.727
Jumlah	494.563	496.346

Sumber: Kantor Administrasi Pelabuhan Nunukan.

Keberadaan HPH Yamaker, HPH Sabatik Abadi dan Inhutani telah menambah daya tarik penduduk masuk ke daerah Nunukan. Jumlah penduduk migran yang makin banyak akhirnya mendominasi penduduk Nunukan dan Sebatik sehingga telah menggeser penduduk asli Tidung. Penduduk Tidung sedikit demi sedikit menjual tanahnya kepada pendatang dan membuat mereka harus menyesuaikan diri. Keberadaan HPH yang telah mengeksploitasi hutan telah memperburuk sumber pangan penduduk lokal. Pada akhirnya mereka hanya mengandalkan pada hasil ladang yang hasilnya cenderung berkurang karena terbatasnya areal untuk rotasi tanaman. Namun

demikian keberadaan “base camp” telah menjadi pasar hasil pertanian dan hasil hutan dengan cara barter.

3.3. Mobilitas Internasional

Wilayah Sabah sudah lama menjadi tujuan migrasi penduduk di Indonesia terutama asal Sulawesi. Pada pertengahan abad 19 orang Bugis telah bermukim di wilayah tersebut terutama daerah pantai. Orang asal Sulawesi sudah lama menyebar ke luar daerah dengan bekal kemauan keras dan keberanian untuk memperbaiki taraf hidupnya. Wilayah Sabah ternyata dapat mewujudkan impian orang asal Indonesia walaupun harus memilih menjadi warga negara Malaysia. Seperti telah disinggung sebelumnya banyak warga Sabah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sebelum tahun 1967 mereka diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraan. Mereka yang memilih menjadi warga negara Malaysia masuk kategori sebagai migran permanen.

Setelah ada perjanjian lintas batas tahun 1967 dan diperbaharui tahun 1984 arus lalu lintas tenaga kerja telah tercatat oleh Kantor Imigrasi. Berdasarkan data keimigrasian di Nunukan tercatat sebanyak 36 ribu tenaga kerja asal Indonesia yang berada di Sabah. Tenaga kerja Indonesia tersebut 67 persen adalah laki-laki. Tenaga kerja laki-laki lebih dominan sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia banyak menyerap tenaga pekerjaan kasar di perkebunan dan perkayuan.

Tenaga kerja Indonesia wanita ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, juru masak, bahkan banyak yang terjebak menjadi pekerja seks. Oleh karena itu tingkat pendidikan formal mereka adalah rendah yaitu 57 persen hanya menamatkan Sekolah Dasar dan 14,5 persen bahkan tidak tamat SD dan tidak sekolah. Mereka yang telah menamatkan Sekolah Lanjutan Pertama atau lebih hanya 28,5 persen.

Tabel 3.2. Distribusi Asal Tenaga Kerja Indonesia di Sabah Malaysia Timur Menurut Jenis Kelamin, 1996

Daerah Asal	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sulawesi Selatan	8.604	4.798	13.402
Nusa Tenggara Timur	6.871	3.923	10.794
Nusa Tenggara Barat	4.180	808	4.988
Jawa Timur	2.428	1.512	3.940
Sulawesi Tenggara	1.029	244	1.273
Kalimantan Timur	343	279	622
Sulawesi Tengah	152	52	204
Daerah lainnya	594	275	869
Jumlah	24.201	11.891	36.092

Sumber : Bappeda Kalimantan Timur. 1996.

Tabel 3.3. Distribusi Persentase Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia di Sabah, Malaysia Timur Menurut Jenis Kelamin, 1996

Pendidikan yang ditamatkan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak sekolah dan tidak tamat SD	11,7	22,1	14,5
Sekolah Dasar	60,0	48,9	57,0
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	16,3	17,9	16,7
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	12,0	11,1	11,8
Jumlah	100,0 (24.201)	100,0 (11.891)	100,0 (36.092)

Sumber : Bappeda Kalimantan Timur. 1996.

Berdasarkan suatu monitoring yang dilakukan oleh sebuah NGO's perempuan di Indonesia untuk periode 1984/1985 hingga 1989/1990, jumlah Tenaga kerja resmi yang mengalir ke wilayah Malaysia dari tahun ke tahun selalu meningkat. Namun apabila 'teori gunung es' juga diterapkan untuk menghitung jumlah TKI yang tak berdokumen, maka jumlah riil TKI yang ada di Malaysia mungkin akan berlipat sekitar 15-20 kali dari jumlah yang legal. Hal ini dapat dilihat indikasinya dari perbandingan antara jumlah TKI yang ditampung oleh PJTKI di Balai AKAN, dengan jumlah TKI yang turun dari kapal dan langsung berangkat menuju Tawao

Tabel 3.4. Jumlah Tenaga Kerja Resmi ke Malaysia Periode
1984 – 1990

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
1984/1985	5181	151	5332
1985/1986	4292	887	5179
1986/1987	15214	3650	18864
1987/1988	4606	1219	5825
1988/1989	1303	577	1780
Total	30596	6484	37080

Sumber : Solidaritas Perempuan 1997

Untuk dapat masuk ke Sabah, umumnya calon tenaga kerja telah memiliki paspor dengan status kunjungan keluarga yang hanya berlaku selama satu bulan. Untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Nunukan, mereka dibantu oleh para calo dengan memberi imbalan uang. Setelah mereka masuk ke Sabah mereka berusaha mencari pekerjaan baik melalui calo maupun melalui kerabat yang telah bekerja di Sabah. Status mereka menjadi migrasi ilegal karena tinggal di Sabah lebih dari sebulan. Seandainya statusnya ingin dilegalkan mereka harus memiliki Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Untuk sebuah SPLP mereka harus mengeluarkan uang sekitar 1500 hingga 1800 ringgit. Pada umumnya mereka tidak sanggup membayar SPLP karena pendapatan mereka hanya sekitar 250 ringgit hingga 450 ringgit tiap bulan.

Migrasi nonpermanen tenaga kerja Indonesia tersebut dilihat dari daerah asal nampak bahwa persentase terbesar berasal dari Sulawesi Selatan, (37%). Mereka yang berasal dari Nusa Tenggara

Timur, Nusa Tenggara Barat dan dari Jawa Timur masing-masing 30 persen, 14 persen dan 11 persen. Selain migran tenaga kerja berasal dari empat daerah tersebut sebagian berasal dari lain daerah antara lain dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, bahkan dari Timor Timur. Sabah ternyata telah menjadi magnet yang sangat kuat yang mampu menarik orang-orang Indonesia untuk mencari peluang pekerjaan tidak hanya datang dari daerah Kawasan Timur Indonesia namun juga datang dari Kawasan Barat Indonesia.

Selain adanya tenaga kerja ilegal, Indonesia juga mengirim tenaga kerja legal melalui Balai AKAN Nunukan. Dalam tahun anggaran 1995/1996, jumlah tenaga kerja Indonesia yang diberangkatkan oleh PJTKI di Nunukan sebanyak 18.446 jiwa yang terdiri dari 13.205 laki-laki dan dan sebanyak 5.790 perempuan. Dilhat dari daerah asal mereka, persentase terbesar berasal dari Sulawesi Selatan (37,3%). Daerah asal pengirim terbesar kedua dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (30,2%). Sisanya tenaga kerja Indonesia yang terstatus legal datang dari daerah lain seperti Nusa Tenggara Barat (10,3%), Jawa Timur (9,8%), Sulawesi Tenggara (6,2%).

Pengiriman tenaga kerja tersebut 91 % menuju Sabah, 8,1% menuju Serawak dan 0,9% menuju Malayasia Barat (Semenanjung). Pengiriman tenaga kerja legal tersebut masih di bawah jumlah permintaan, bahkan untuk permintaan dari Hongkong sebanyak 950 jiwa, tidak dapat direalisasikan. Dalam kenyataan proses pengiriman tenaga

kerja lewat PJTKI tersebut memakan waktu lebih dari dua bulan terutama menunggu keluarnya visa. Untuk tujuan Malaysia pengurusan visa dikeluarkan oleh Konsulat Malaysia yang berada di Pontianak. Selain itu tenaga kerja Indonesia juga diharuskan membayar levi (pajak) dan cagaran (jaminan) yang harus dibayarkan sekaligus. Kesulitan mengurus menjadi tenaga kerja legal menyebabkan sebagian dari calon tenaga kerja mengundurkan diri dan ada yang pergi ke Sabah menjadi tenaga kerja ilegal.

Disamping ada pola migrasi non permanen tenaga kerja ke Sabah, sebaliknya terjadi arus migrasi kembali ke darah asalnya, baik untuk sementara atau seterusnya. Mereka yang pulang ke tempat asal yang sifatnya sementara biasanya hanya untuk menengok keluarga di kampung sambil membawa uang. Pada waktu menengok keluarga di kampung kadangkala pada waktu kembali ke Sabah membawa saudara atau kawan. Adapun mereka yang kembali kampung untuk tidak kembali ke Sabah umumnya merasa sudah “bosan” dan merindukan keluarganya yang ditinggalkan. Selain itu sebagian dari mereka merasa kecewa karena tidak berhasil memperoleh pekerjaan di Sabah seperti yang diharapkan, antara lain ditipu oleh calo tenaga kerja.

Deportasi dari Sabah mulai terasa semenjak tahun 1993 dimana negara bagian Sabah tidak lagi mengeluarkan “job order” sehingga merangsang timbulnya tenaga ilegal. Keadaan ekonomi yang memburuk di Malaysia dirasakan akhir-akhir ini diperkirakan pemulangan tenaga kerja asing termasuk dari Indonesia akan makin

meningkat. Semenjak Januari tahun 1994 hingga Juli 1996 jumlah tenaga kerja Indonesia yang dideportasi dari Tawau telah mencapai 18.652 jiwa dimana 78% adalah laki-laki. Mereka dideportasi selain karena statusnya adalah ilegal (persoalan dokumen) ada pula alasan lain misalnya terlibat kasus kriminal.

Bagi mereka yang mempunyai status ilegal atau lazim disebut pendatang haram, keberadaannya di Sabah tidak menentu dan selalu diliputi perasaan takut karena Polisi Diraja Malaysia sewaktu-waktu dapat menangkap. Pada waktu diadakan razia, siapa saja yang dicurigai dapat ditangkap baik yang berstatus legal maupun yang berstatus ilegal. Mereka yang dapat menunjukkan identitas diri sebagai tenaga kerja legal dilepas dan sebaliknya mereka tidak dapat menunjukkan *identity card* sebagai tenaga kerja status legal, harus menerima sanksi yaitu masuk tahanan, yang selanjutnya menunggu proses deportasi. Sejak 1 Juni 1997, Polisi Diraja Malaysia telah melancarkan razia besar-besaran di 7 kota di Sabah yaitu Kota Kinibalu, Labuan, Sandakan, Sepitang, Keningau, Lahat Datu dan Tawau. Mereka yang sering kena razia adalah pada saat tenaga kerja asing berkeliaran di kota, misalnya sedang belanja. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan mereka dapat damai dengan Polisi Diraja Malaysia dengan memberi uang sekitar 20 ringgit. Perlu dicatat bahwa banyak polisi Malaysia di Sabah adalah orang asal dari Indonesia. Mereka yang tertangkap sebagai tenaga kerja ilegal lalu dibawa ke Tawau, bergabung dengan mereka yang sebelumnya telah kena razia. Kadang

kala ada juga Tauke yang baik hati dengan membantu uang untuk mengurus SPLP.

Hasil obsevasi dari wawancara di Nunukan menunjukkan bahwa mereka yang dideportasi masuk kota Nunukan tersebut hampir seluruhnya kembali ke Sabah dengan dibantu oleh para calo tenaga kerja. Sebagian kecil kembali ke darah asal dan ada pula yang tertinggal di Nunukan antara lain karena gila atau mengalami kelumpuhan. Kepergian untuk segera meninggalkan kota Nunukan juga dikondisikan oleh keterbatasan kemampuan daya tampung pemerintah daerah setempat untuk dapat menghidupi mereka yang dideportasi dalam jumlah besar. Biaya hidup sehari di Nunukan setiap orang diperkirakan Rp. 15.000,-. Umumnya mereka kembali ke Sabah karena masih menginginkan pekerjaan disamping masih ada harta dan barang-barang yang ditinggalkan ditempat kerja.

Tabel 3.5. Jumlah Deportasi Tenaga Kerja Indonesia di Sabah Tahun 1994-Juni 1996

Tahun	Deportasi			Daerah Asal				
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sulawesi	Nusa Tenggara	Jawa	Kalimantan	Sumatera
1994	3367	878	4245	3091	736	333	77	8
1995	6025	1770	7795	5866	1390	454	83	2
1996*	5194	1418	6612	4999	1243	310	56	4
Jumlah	14586	4066	18652	13956	3369	1097	216	14

* Sampai Juni

Sumber: Bappeda Kalimantan Timur 1996

Kantor Imigrasi di Nunukan selain menerima tenaga kerja Indonesia yang dideportasi juga mendeportasikan warga negara asing terutama Malaysia yang tinggal di Nunukan dan Sei Pancang karena *illegal entry*. Mereka yang dideportasikan ke Sabah sebagian besar adalah orang-orang keturunan Indonesia dan orang cina yang sudah jadi warga negara Malaysia. Kedatangan mereka ke Indonesia umunya untuk kunjungan keluarga dan bisnis. Dalam tahun 1997, orang asing melanggar keimigrasian sebanyak 52 jiwa. Dari jumlah tersebut 13 jiwa adalah perempuan. Mereka yang melakukan *illegal entry* tersebut berumur antara 20-40 tahun.

Pola mobilitas yang lain adalah adanya ulang-alik penduduk perbatasan. Orang-orang di daerah perbatasan terutama yang berstatus sebagai pedagang selalu melakukan mobilitas ulang-alik ke Tawau. Mereka pergi ke Tawau membawa hasil bumi dan hasil laut untuk dijual atau barter. Komoditi yang dijual di Tawau cukup bervariasi yaitu hasil-hasil perkebunan, hasil pekarangan, hasil hutan dan hasil lau. Disamping itu beberapa orang tertentu menjual ke Tawau dengan cara menyelundupkan misalnya rokok kretek “gudang garam”. Sebaliknya mereka membawa barang dari Tawau secara selundupan pula misalnya bawang putih dan *roma* (rombengan Malaysia).

Berdasarkan uraian tentang mobilitas penduduk internasional dapat diperoleh berbagai pola mobilitas yaitu:

1. Mobilitas permanen penduduk Indonesia ke Sabah
2. Moblitas sirkuler tenaga kerja Indonesia yang masuk ke Sabah

3. Moblitas kembali tenaga kerja Indonesia dari Sabah
4. Mobilitas deportasi tenaga kerja Indonesia dari Sabah
5. Mobilitas deportasi penduduk Malayasia dari Nunukan
6. Mobilitas harian (ulang-alik) penduduk perbatasan.

BAB IV
PROSES MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH
PERBATASAN

Oleh: Bayu Setiawan dan Herry Yogaswara

Proses mobilitas penduduk merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji untuk dapat menggambarkan cara-cara yang ditempuh oleh seorang dari tempat asalnya sampai ke tempat tujuan. Apabila dilihat bahwa di dalam pola mobilitas penduduk wilayah perbatasan terdapat beberapa pola yang berbeda, maka dalam prosesnya pun terdapat perbedaan. Berkaitan dengan mobilitas penduduk melintasi perbatasan, terdapat hal-hal yang spesifik, serta cara-cara atau syarat-syarat tertentu dalam prosesnya, karena ini menyangkut mobilitas keluar negara. Oleh karena itu sebelum membahas mengenai proses mobilitas penduduk di wilayah perbatasan, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengaturan mobilitas penduduk di wilayah perbatasan karena akan terkait erat dengan proses mobilitas itu sendiri.

4.1 Pengaturan Mobilitas Penduduk Lintas Batas

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Mobilitas Penduduk di Daerah Perbatasan

Arus mobilitas penduduk di wilayah perbatasan baik yang datang maupun yang keluar nampaknya selalu menunjukkan suatu dinamika yang menarik untuk dikaji. Banyak permasalahan yang muncul dalam perkembangannya yang memerlukan penanganan berbagai pihak. Masalah mobilitas penduduk di wilayah perbatasan ini akan melibatkan pemerintah daerah tidak saja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur sebagai pihak yang menjadi objek atau daerah transit dari adanya para pelaku mobilitas penduduk, namun lebih jauh keterlibatan pemerintah daerah lain sangat dimungkinkan dalam rangka ikut berperan memecahkan permasalahan mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Kalimantan Timur.

Permasalahan yang dihadapi dengan adanya pendatang di Nunukan yang merupakan daerah transit bagi para pencari kerja dari daerah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur rupanya menjadi beban bagi pemerintah daerah Kalimantan Timur. Mereka adalah pencari kerja yang ingin bekerja di Malaysia yang sebelum bekerja di Malaysia biasanya menunggu di Nunukan. Berdasarkan pengalaman yang telah lalu, sebagian dari mereka tidak dapat menunggu terlalu lama, tetapi mereka harus melalui prosedur yang berlaku yang memang terkadang membutuhkan waktu yang

cukup lama. Pencari kerja, secara legal, umumnya harus mengurus visa kerja melalui Konsul Jendral Malaysia yang ada di Kalimantan Barat walaupun mereka telah melalui jalur yang resmi lewat perusahaan jasa tenaga kerja (PJTKI). Pada akhirnya mereka banyak yang masuk ke Malaysia khususnya di Negara Bagian Sabah secara ilegal. Padahal selama ini (sejak tahun 1993) Pemerintah Negara Bagian Sabah sudah tidak lagi mengeluarkan *job order* sehingga mengakibatkan tidak dapat dikeluarkannya visa kerja. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak tenaga kerja ilegal yang diterima bekerja di Sabah karena upah tenaga kerja yang murah. Permasalahan lain yang muncul adalah banyaknya tenaga kerja ilegal yang dideportasi dari Tawau dan hal ini kembali menjadi beban bagi pemerintah daerah khususnya di Nunukan.

Pemerintahan daerah Tingkat II maupun di Kecamatan tidak memiliki suatu kewenangan untuk membuat aturan-aturan yang membatasi calon tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Kewenangan tersebut semestinya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang dapat membuat peraturan-peraturan daerah yang tujuannya dapat membuka atau menutup suatu wilayah dengan alasan tertentu, seperti untuk membatasi laju pertumbuhan penduduk karena besarnya arus migran dari luar wilayah. Akan tetapi nampaknya hal ini masih sulit untuk dilaksanakan. Ada upaya-upaya secara lokal yang telah diterapkan oleh pihak Kecamatan seperti membuat aturan untuk melarang pembuatan Kartu Tanda Penduduk, dan hanya memberikan surat bukti lapor diri kepada pendatang, karena banyak ditemui kasus

dimana KTP sering disalahgunakan oleh pemiliknya untuk mendapatkan paspor atau pas lintas batas yang dijadikan legitimasi untuk menyeberang ke wilayah Malaysia.

Sebenarnya Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, khususnya di Nunukan dalam menangani masalah mobilitas penduduk di wilayah perbatasan telah memberikan kebijaksanaan yaitu dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada para pencari kerja yang datang ke Nunukan dari manapun asal mereka. Akan tetapi permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan tersebut selalu masih muncul dan menjadi beban tanggungan pemerintah daerah. Sehubungan dengan semakin meningkatnya arus deportasi tenaga kerja yang bekerja di Malaysia Timur, khususnya di Negara Bagian Sabah maka Pemerintah Daerah Kalimantan Timur menganggap perlu adanya penanganan secara terpadu untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam mengurangi dampak dari deportasi tenaga kerja khususnya, telah dibentuk suatu kerjasama antar daerah asal tenaga kerja yaitu Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur untuk mengatasi atau mengurangi dampak deportasi tenaga kerja dari Negara Bagian Sabah. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur juga mengusulkan kepada pemerintah Negara Bagian Sabah melalui Departemen Luar Negeri dan Departemen Tenaga Kerja agar dapat mengeluarkan *job order* karena Sabah nampaknya masih memerlukan tenaga kerja untuk perkebunan kelapa sawit. Selain itu mengusulkan pula agar Pemerintah Malaysia

membuka Konsul Jendral atau yang setingkat dengan Konsul di wilayah Kalimantan Timur (Tarakan), supaya memudahkan untuk mengurus visa kerja. Hal ini untuk memberikan perlindungan hukum apabila tenaga kerja tersebut masuk secara legal ke Negara Bagian Sabah.

Perjanjian Lintas Batas antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia

Dalam setiap negara yang berdaulat dan yang berbatasan dengan negara lain biasanya dikenal adanya suatu perjanjian mengenai lintas batas. Hal ini dibuat agar masing-masing penduduk negara yang bersangkutan tidak melanggar hak-hak kedaulatan suatu negara. Indonesia yang bertetangga dengan Malaysia juga mengenal adanya perjanjian lintas batas yang dikenal dengan *Agreement on Border Crossing between The Republic of Indonesia and Malaysia*, atau Persetujuan mengenai Lintas Batas antara Republik Indonesia dan Malaysia.

Persetujuan atau Perjanjian lintas batas pertama kali ditandatangani di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1967, yang menghasilkan Permufakatan Dasar Lintas Batas. Setelah berlaku sekian lama, tampaknya Perjanjian lintas batas masih dirasakan banyak kekurangan dengan adanya perubahan dan perkembangan penduduk serta permasalahannya. Oleh karena itu perjanjian ini terus mengalami perbaikan demi penyempurnaan guna mengatasi permasalahan perbatasan antara dua negara. Perjanjian lintas batas yang terakhir,

ditandatangani di Medan pada tanggal 12 Mei 1984 dan hingga saat ini selalu digunakan sebagai acuan dalam menangani masalah perbatasan kedua negara.

Perjanjian lintas batas ini intinya adalah untuk mempererat hubungan persahabatan antara dua negara yang merupakan bangsa serumpun dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para penduduknya yang ingin saling berkunjung. Hal ini mengingat bahwa ditinjau dari latar belakang sejarahnya, penduduk di perbatasan kedua negara masih merupakan suatu jalinan kekerabatan sebelum kedua negara menyatakan kedaulatannya sehingga sampai saat ini masih dapat ditemui keluarga warga Indonesia di Malaysia dan sebaliknya. Dengan demikian sejak dulu tingkat mobilitas penduduk di wilayah perbatasan ini cukup tinggi. Mengingat pentingnya untuk menghargai hak atau kedaulatan suatu negara, dipandang perlu untuk membuat suatu perjanjian atau aturan khusus yang mengatur mobilitas penduduk di wilayah perbatasan ini.

Perjanjian lintas batas yang maknanya memberikan semacam perlakuan khusus atau kemudahan bagi warga negara kedua negara hanya berlaku khususnya bagi warga negara yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia. Salah satu wilayah perbatasan yang ditentukan adalah wilayah Kalimantan Timur (meliputi penduduk yang tinggal di wilayah **Kecamatan Lumbis, Kerayan, Nunukan, Sebatik**) dengan wilayah Negara Bagian Sabah (meliputi penduduk yang tinggal di wilayah **Sipitang, Pensiangan, Tenom, Tawau**). Dengan adanya

perjanjian lintas batas tersebut, bila seorang penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan ingin berkunjung ke wilayah negara lainnya dalam wilayah perbatasan yang telah ditentukan tersebut, tidak perlu menggunakan paspor sebagaimana lazimnya kalau hendak mengunjungi suatu negara. Untuk kemudahan kunjungan tersebut mereka menggunakan **Pas Lintas Batas** yang berdasarkan persetujuan adalah sebagai pengganti paspor.

Pas Lintas Batas hanya dikeluarkan dan diberikan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Kantor Imigrasi, kepada penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan tersebut yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan telah disetujui dalam perjanjian lintas batas. Penduduk di luar wilayah perbatasan yang telah ditentukan tersebut tidak dapat menggunakan Pas Lintas Batas, tetapi tetap harus menggunakan paspor sebagai mana ketentuan yang telah disepakati. Pas Lintas Batas diberikan untuk suatu keperluan kunjungan keluarga, kegiatan sosial/hiburan, keperluan keagamaan, usaha, tugas pemerintah dan keperluan lain yang telah disetujui kedua belah pihak. Dengan demikian pas lintas batas tidak dapat digunakan untuk kepentingan mencari pekerjaan atau bekerja.

Untuk mendapatkan pas lintas batas seorang penduduk harus mempunyai kartu tanda penduduk yang minimal sudah berlaku selama enam bulan. Padahal untuk mendapatkan kartu penduduk harus terlebih dahulu tinggal di wilayah kecamatan selama enam bulan. Jadi untuk mendapatkan pas lintas batas seseorang harus tinggal di wilayah

kecamatan perbatasan minimal selama satu tahun. Kartu penduduk ini dianggap penting dan merupakan syarat untuk mendapatkan pas lintas batas, karena hanya penduduk di kecamatan wilayah perbatasan yang telah disepakati yang bisa mendapatkan pas lintas batas.

Seseorang yang telah mendapatkan Pas Lintas Batas dapat menggunakannya dengan membawa pengikut. Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan pengikut adalah anak-anak atau yang masih mempunyai hubungan kerabat. Hal ini pula yang membedakan antara Pas Lintas Batas dengan Paspor. Pengikut tinggal mencantumkan identitasnya disertai dengan foto. Jadi dalam pas lintas batas ini terdapat lembaran khusus yang memuat identitas para pengikut. Namun demikian para pengikut tersebut juga harus merupakan penduduk di wilayah perbatasan setempat seperti yang telah ditentukan.

Pemanfaatan Pas Lintas Batas

Pada umumnya penduduk di wilayah perbatasan telah memiliki dan menggunakan Pas Lintas Batas dengan mentaati peraturan atau ketentuan yang telah ada. Hal ini dapat dilihat dan diamati dari mereka yang melakukan perjalanan ke wilayah Malaysia dari Pelabuhan Besar Nunukan, Pelabuhan Beringin, maupun Sungai Pancang di Pulau Sebatik, yang selalu membawa atau dapat menunjukkan Pas Lintas Batas. Dalam pengamatan di lapangan sebagian penduduk yang ditemui menyatakan telah memiliki Pas Lintas Batas. Menurut

pengakuan mereka dalam pengurusan Pas Lintas batas tidak terlalu mengalami kesulitan asalkan persyaratan yang ada telah dipenuhi dengan baik. Mereka tinggal membawa kartu tanda penduduk dan datang ke Kantor Imigrasi untuk diambil foto.

Dalam kenyataan, masih banyak ditemui adanya penyimpangan dari ketentuan yang sudah ditetapkan dalam penggunaan pas lintas batas tersebut. Banyak pengikut dari pemegang Pas Lintas Batas yang ternyata bukan keluarga atau kerabatnya. Hal ini nampaknya merupakan kelonggaran yang diberikan oleh pihak imigrasi, yang penting dalam hal ini pemegang Pas Lintas Batas yang akan bertanggung jawab kalau terjadi masalah dengan para pengikutnya. Menurut informasi dari beberapa penduduk yang ditemui di lapangan mereka tidak menemui masalah dengan para pengikut yang bukan kerabatnya. Dalam pemeriksaan di wilayah Malaysia yang selalu diperiksa dan ditanya adalah pemegang Pas Lintas Batas dan dari pengalaman mereka yang sudah pernah ke Malaysia dengan pengikut yang bukan kerabat, tidak mengalami kesulitan dalam pemeriksaan oleh petugas imigrasi Malaysia di Tawau. Oleh sebab itu terkadang penggunaan pas lintas batas disalahgunakan. Ada saja penduduk yang memiliki pas lintas batas memanfaatkannya untuk tujuan lain. Dari beberapa informasi yang diberikan oleh penduduk setempat yang memiliki pas lintas batas, banyak penduduk dari luar wilayah perbatasan yang memanfaatkan pas lintas batas dengan status sebagai pengikut sekedar untuk mengunjungi kota Tawau untuk

berbelanja atau kunjungan singkat lainnya. Khususnya dari Sebatik, mereka biasanya pergi ke Tawau pagi hari dan sore hari sudah kembali ke Sebatik. Tawau merupakan kota yang cukup besar dan mempunyai daya tarik bagi masyarakat di daerah perbatasan. Nampaknya ada kecenderungan dari beberapa pemilik pas lintas batas untuk memanfaatkan pas lintas batas yang dimilikinya untuk tujuan 'komersil', dengan imbalan.

Dari pengamatan di lapangan terlihat bahwa banyak penduduk yang telah memanfaatkan pas lintas batas, khususnya di wilayah Sebatik, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka berbelanja di Tawau. Dapat dilihat bahwa tingkat ketergantungan masyarakat Sebatik cukup tinggi terhadap Tawau, selain mereka juga menjual hasil pertaniannya ke Tawau. Namun demikian dari informasi para pedagang sayuran, terkadang mereka tidak menggunakan pas lintas batas karena biasanya mereka pagi hari sudah berangkat dan pulang siang hari. Nampaknya ada semacam perlakuan khusus bagi para pedagang tersebut.

Pas lintas batas juga banyak disalahgunakan, oleh orang-orang yang ingin bekerja di Malaysia. Pas Lintas Batas tersebut biasanya hanya digunakan sebagai syarat untuk dapat masuk ke wilayah Malaysia. Setelah dapat masuk ke wilayah Malaysia mereka tidak kembali lagi tetapi mencari kerja dan bekerja di sana. Mereka ini yang biasanya dianggap sebagai tenaga kerja ilegal atau pendatang haram, karena pas lintas batas tidak dapat digunakan untuk bekerja. Untuk

bekerja di Malaysia harus menggunakan beberapa persyaratan seperti adanya *job order*, paspor dan visa kerja. Untuk mengurus semuanya itu memerlukan waktu dan biaya yang cukup mahal. Oleh sebab itu biasanya mereka mengambil jalan pintas dengan menggunakan pas lintas batas yang relatif lebih mudah dan murah.

Seperti diketahui bahwa untuk mendapatkan pas lintas batas seseorang harus memiliki kartu tanda penduduk dan sudah tinggal di wilayah tersebut selama 1 tahun. Namun demikian dalam kenyataannya banyak kasus ditemui, dimana pendatang dapat memiliki kartu tanda penduduk dalam waktu yang relatif singkat sekali. Mereka biasanya mendapatkannya dengan mudah karena mengupayakan lewat jalur tidak resmi dengan melalui calo-calo yang banyak terdapat di Nunukan. Dari pengalaman sewaktu mengadakan penelitian di Flores Timur (NTT), dari pengakuan mereka banyak yang menggunakan pas lintas batas, yang sebelumnya sudah mendapatkan KTP dengan mudah melalui calo-calo. Menurut pengakuan mereka, nama di KTP disesuaikan dengan nama-nama penduduk setempat.

Tampaknya pemerintah daerah khususnya di tingkat Kecamatan sangat sulit untuk membuat aturan yang menahan laju para calon pencari kerja. Bahkan terkesan ada suatu situasi dilematis yang dialami oleh aparat pemerintah di lapangan, khususnya yang terkait dengan pembuatan KTP, pas lintas batas maupun paspor. Mulai dari aparat tingkat Desa, Kecamatan, Imigrasi, Balai AKAN, seringkali apabila tidak mau melayani permintaan calo ataupun calon pekerja,

mereka diancam dengan kekerasan. Akan tetapi dengan memberikan surat-surat tersebut berarti melanggar ketentuan yang berlaku.

Dari pengalaman selama ini ada beberapa kasus kesalahan dalam penggunaan pas lintas batas yang mempunyai akibat keimigrasian, seperti pas lintas batas yang sudah lewat batas waktu, penggunaan pas lintas batas yang tidak mencapkin pas lintas batas atau tidak melaporkan diri setelah sampai di wilayah Malaysia. Pemerintah Malaysia biasanya sangat keras memberi sanksi dalam menangani kasus-kasus kesalahan dalam penggunaan pas lintas batas.

Proses perlintasan batas tradisional maupun yang legal menggunakan pas lintas batas--dalam beberapa kasus--prakteknya sangat tergantung pula dengan sikap dari penjaga di wilayah perbatasan Malaysia. Beberapa informasi menyebutkan bahwa, apabila penjaga perbatasan berasal dari Sabah, mereka seringkali mendapatkan berbagai kemudahan. Hal ini agak berbeda apabila penjaga perbatasan berasal dari Semenanjung yang cenderung sangat keras terhadap para pelintas batas. Kondisi ini dimungkinkan oleh adanya hubungan pertalian sejarah maupun kekerabatan yang sudah terbina antara orang-orang Sabah di wilayah Malaysia dengan orang-orang di wilayah Indonesia. Beberapa informasi memberikan gambaran bahwa apabila kita berada di Tawau seperti layaknya kita berada di Indonesia, mengingat banyak orang dari Indonesia yang menetap di sana. Kondisi ini tampaknya mempermudah berbagai

aktivitas perlintasan batas untuk keperluan tradisional, mencari kerja maupun usaha di bidang perdagangan.

4.2. Proses Mobilitas Internal

Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya terdapat beberapa pola mobilitas penduduk di wilayah perbatasan yaitu pola mobilitas internal dan pola mobilitas internasional. Mobilitas penduduk internal melingkup perpindahan penduduk dari wilayah pedalaman ke daerah hilir pantai timur yang dilakukan secara bertahap. Sasaran mereka sebenarnya adalah kota terdekat karena tersedianya berbagai fasilitas. Mereka pada umumnya suku-suku dayak Pujungan dan Kayan di daerah pedalaman yang secara bertahap berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya selama bertahun-tahun. Proses perpindahan hingga sampai ke kota membutuhkan waktu yang cukup lama, karena dalam satu lokasi dimana mereka pindah dan tinggal tidak hanya dalam waktu yang singkat melainkan bertahun-tahun.

Dalam proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya biasanya dilakukan dengan berjalan kaki secara berkelompok, yang biasanya terdiri dari beberapa keluarga. Untuk itu dalam perjalanan pindah, mereka berusaha untuk menyusuri sungai agar dalam memilih lahan nantinya tidak sulit mendapatkan air. Dalam perjalanan ke suatu tempat, yang dicari adalah lahan yang dapat untuk bercocok tanam dan menetap.. Hal ini dilakukan mengingat mata pencaharian pokok

mereka adalah bercocok tanam. Mereka hidup dari hasil bercocok tanam, oleh karena itu sebelumnya harus menyiapkan lahan dengan mengolah tanah.. Setelah lahan itu siap, lantas mereka mulai menanamnya dan kemudian menunggu hasilnya. Dalam menyiapkan lahan hingga panen juga memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu dalam perpindahannya dalam satu lokasi biasanya mereka tinggal cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun.

Setelah tinggal cukup lama mereka akan berpindah lagi ke daerah lainnya, perpindahan ini disebabkan karena lahan yang mereka garap sudah tidak cocok lagi untuk bercocok tanam. Proses ini terus berlanjut hingga akhirnya mereka menetap di dekat kota sebagai tujuan akhir mereka seperti yang dapat dilihat sekarang, adanya permukiman suku dayak di sekitar Jelarai. Mereka sekarang juga hidup secara berkelompok dan masih tetap mengusahakan lahan untuk bercocok tanam, yang hasilnya mereka pasarkan di kota Tanjung Selor.

Selain migran yang berasal dari satu daerah terdapat pula banyak migran yang berasal dari luar daerah perbatasan. Proses kedatangan mereka memang ada yang sengaja didatangkan dengan melalui program transmigrasi. Mereka ditempatkan di Jelarai, Salimbatu dan Tanjung Keranjang, yang berasal dari Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Namun demikian banyak migran dari luar yang datang atas inisiatif sendiri. Proses mobilitas penduduk yang datang ke daerah perbatasan tersebut dapat dibedakan menurut daerah asalnya.

Migran yang paling banyak berasal dari daerah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Jawa. Proses mobilitas orang-orang Jawa sudah lama berlangsung di wilayah perbatasan, mereka awalnya dibawa oleh pemerintah Belanda sebagai kuli kontrak yang dilanjutkan sebagai romusha pada waktu jaman Jepang. Pada waktu itu banyak orang Jawa yang berasal dari Banyumas, Cilacap dan Kroya (Jawa Tengah) dan dari Tuban serta Bojonegoro (Jawa Timur) dibawa untuk bekerja disana. Setelah itu mereka yang pulang untuk cuti membawa informasi tentang keadaan di perbatasan, khususnya di Nunukan. Ketika mereka kembali ke Nunukan membawa pengikut. Pada waktu itu mereka masih menggunakan kapal-kapal kayu. Berangkat dari daerah asal menuju Surabaya dari Surabaya dengan kapal menuju Ujung Pandang, Tarakan dan Nunukan.

Setelah jaman konfrontasi dengan Malaysia banyak orang Jawa yang datang ke Nunukan. Mereka ditugaskan di Nunukan sebagai polisi dan juga KKO. Mereka yang bekerja di Nunukan khususnya di kehutanan, ketika ada kesempatan pulang ke Jawa. Ketika kembali ke Nunukan, mereka membawa saudara-saudaranya untuk ikut bekerja di sana. Sejak disetujuinya Perjanjian Lintas Batas antara Indonesia-Malaysia makin banyak orang Jawa yang datang seiring dengan dibukanya pula perusahaan-perusahaan perkayuan. Selain bekerja di perusahaan perkayuan sebagian dari orang-orang yang datang dari Jawa berjualan di pasar dan bekerja sebagai tukang kayu.

Orang-orang dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara datang ke Nunukan dan Sebatik dengan menggunakan perahu-perahu kayu. Namun sebelumnya mereka juga ada yang didatangkan sebagai romusha ketika jaman penjajahan Jepang. Pada umumnya orang-orang Sulawesi datang secara sendiri-sendiri. Mereka memang secara sengaja mencari wilayah-wilayah yang masih kosong untuk berkebun. Setelah menemukan lahan yang memungkinkan untuk tinggal dan berkebun mereka pulang kembali ke Sulawesi untuk menjemput keluarganya. Sampai saat ini banyak orang-orang Sulawesi yang sukses dalam membuka usahanya yaitu dalam usaha perkebunan, terutama di wilayah Sebatik. Selain itu mereka juga sukses dalam usaha perdagangan.

Proses mobilitas orang-orang dari Nusa Tenggara Timur, terutama dari Flores Timur dan Flores Barat dimulai sejak sekitar tahun 1940-an. Pada dasarnya mereka memang ingin mencari kerja di Malaysia, sehingga Nunukan hanya sebagai tempat transit saja. Tetapi menurut informasi dari tokoh orang-orang NTT, dulu apabila mereka kembali dari Sabah dibidang dari Nunukan. Mereka pada umumnya memang bukan perantau, tapi informasi tentang Malaysia sudah mereka sudah ketahui. Orang-orang dari NTT pada umumnya datang secara berkelompok dengan menyewa kapal sebelum ada kapal-kapal reguler yang melayani pelayaran dari Flores ke Nunukan seperti sekarang ini. Dalam setahun bisa sampai tiga kali, mereka menyewa kapal milik orang-orang Sulawesi, untuk pergi-pulang ke Nunukan.

Dari Larantuka atau Maumere mereka berlayar ke Ujung Pandang lantas ke Pare-Pare, Tarakan dan Nunukan.

Saat ini mereka yang ingin pergi ke wilayah perbatasan di Nunukan dan Sebatik sudah semakin mudah dengan adanya kapal-kapal reguler yang melayani route pelayaran sampai Nunukan. Orang-orang dari Jawa yang ingin ke Nunukan bisa menggunakan KM Tidar, KM Leuser, dan KM Binaiya. Orang-orang dari Nusa Tenggara Timur dapat menggunakan KM. Awu. Selain itu biasanya orang-orang dari Nusa Tenggara Timur sampai saat ini masih sering menyewa kapal-kapal. Orang-orang dari Sulawesi dapat menggunakan semua kapal-kapal tersebut, karena trayeknya selalu melalui Ujung Pandang dan Pare-Pare. Selain kapal-kapal besar juga ada kapal-kapal yang lebih kecil ukurannya yang melayani pelayaran dari Pare-Pare ke Nunukan. Ada tiga kapal yang melayani rute ini yaitu Samarinda Ekspres I, Samarinda Ekspres II dan Halimun. Dalam satu bulan kira-kira ada 8 kali kapal-kapal besar tersebut singgah di Nunukan, masing-masing kapal singgah 2 kali dalam sebulan.

4.3. Proses Mobilitas Internasional

Mobilitas penduduk dari wilayah perbatasan Indonesia ke wilayah Malaysia motif tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Kota Nunukan dalam hal ini hanya dijadikan sebagai tempat untuk transit saja. Kondisi ini dimungkinkan dengan adanya

dukungan pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah seperti misalnya pembangunan pelabuhan yang dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar serta frekuensi kedatangan dan keberangkatan kapal-kapal reguler tersebut ke beberapa daerah asal migran.

Secara umum daerah asal migran yang pergi ke wilayah Malaysia berdasarkan banyaknya migran adalah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Jawa. Selain itu ada pula yang berasal dari Toraja, Buton, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Migran dari Sulawesi Selatan pada umumnya adalah orang-orang Bugis yang berasal dari Bugis Mandar, Bone, Soppeng, Pare-Pare, dan Enrekang.

Umumnya, mereka yang pergi ke Malaysia melalui Nunukan sudah mendapat informasi dari teman sekampungnya atau kerabatnya, tentang situasi dan kondisi di Malaysia. Ada dua macam proses kepergian mereka ke Malaysia, pertama mereka secara resmi melalui perusahaan jasa tenaga kerja yang kedua melalui calo-calo tenaga kerja yang biasanya dikenal dengan tenaga kerja ilegal yang sering disebut *undocumented labour*. Namun demikian keduanya harus menyediakan sejumlah uang untuk pengurusan surat-surat atau dokumen keimigrasian, transportasi dan jasa perusahaan ataupun calo.

Para pekerja yang mencari pekerjaan lewat PJTKI mendaftarkan diri langsung ke PJTKI yang ada di daerah asalnya, atau biasanya ada orang-orang dari PJTKI yang sengaja mencari orang untuk dipekerjakan di Malaysia. Biasanya di daerah-daerah asal

pekerja yang banyak bekerja di Malaysia banyak pula terdapat PJTKI. PJTKI yang ada di Nunukan sebagian besar adalah cabang-cabang dari Jakarta, Surabaya dan Sulawesi Selatan. Mereka ini yang nantinya mengurus keberangkatan TKI dari Nunukan, karena mereka yang dari tempat asalnya akan singgah terlebih dahulu di Nunukan.

Untuk saat ini hanya di Negara Bagian Serawak yang masih mau menerima tenaga kerja Indonesia sedangkan Negara Bagian Sabah sudah sejak tahun 1993 tidak mau menerima lagi tenaga kerja Indonesia secara legal. Oleh sebab itu apabila ada tenaga kerja Indonesia yang saat ini pergi ke Sabah berarti mereka pergi ke sana tanpa adanya *job order* atau permintaan pekerjaan dari perusahaan yang ada di Malaysia. Untuk para pekerja yang tidak melalui prosedur yang resmi atau pekerja ilegal, biasanya calo mempunyai peranan yang cukup besar untuk dapat membawa calon tenaga kerja bekerja di Negara Bagian Sabah.

PJTKI dalam menempatkan tenaga kerja di Malaysia harus didasarkan pada permintaan nyata (*employment order* atau *job order*) dari pengguna jasa. Oleh karena itu PJTKI harus mempunyai mitra usaha atau mendapatkan pengguna jasa, dan dalam hal ini harus membuat perjanjian kerja dengan mitra usaha yang dituangkan dalam perjanjian pengerahan (*recruitment agreement*) yang diketahui oleh instansi yang berwenang dan perwakilan RI. Dalam permintaan itu harus jelas jenis tenaga kerja apa yang dibutuhkan.

Proses keberangkatan tenaga kerja lewat jalur yang resmi memerlukan waktu yang cukup lama. Masalahnya mereka harus mengurus paspor terlebih dahulu, setelah itu harus mengurus visa kerja, karena tanpa visa kerja mereka akan ditolak masuk ke wilayah Malaysia. Dalam menunggu visa kerja ini biasanya memerlukan waktu cukup lama karena waktunya juga tidak dapat ditentukan secara pasti. Selain itu visa harus diurus ke Konsul Jendral Malaysia yang berkedudukan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pada umumnya PJTKI membebankan seluruh biaya proses penempatan kepada para calon tenaga kerja. Hal ini dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja memang dibenarkan. Dalam biaya ini biasanya sudah termasuk *recruiting fee*, namun besarnya berapa tidak dapat diungkapkan karena mereka tidak mau memberikan perinciannya. Mereka menganggap masalah itu adalah rahasia perusahaan. Akan tetapi sebenarnya semua rincian biaya yang dibebankan tersebut harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Kanwil Daerah asal tenaga kerja. Walaupun dalam peraturannya seluruh biaya sudah dibebankan kepada calon tenaga kerja sebelum mereka diberangkatan, namun informasi dari beberapa tenaga kerja yang pernah bekerja di Malaysia menyatakan bahwa gaji mereka dulu pernah dipotong sebagai pengganti biaya. Mereka tidak bisa menolak karena pihak mitra kerja PJTKI di Malaysia yang langsung memotong gaji melalui perusahaan dimana mereka bekerja. Kadang-kadang hal semacam ini yang susah untuk dikontrol karena untuk kelanjutannya di

Malaysia diserahkan kepada agen swasta. Padahal bagi PJTKI yang melakukan pembebanan biaya diluar ketentuan yang berlaku akan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan surat ijin usahanya. Akan tetapi pihak PJTKI di Indonesia bisa menolak tuduhan tersebut, karena hal itu dilakukan oleh agen di Malaysia dan itu diluar wewenangnya. Oleh karena itu yang selalu menjadi korban adalah para tenaga kerja, walaupun sebenarnya agen tenaga kerja tersebut memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja Indonesia.

Setelah selesai semua proses penempatan, biasanya yang terakhir ditunggu adalah visa kerja. Masa berlaku visa kerja ini selama dua tahun dan setelah habis mereka harus memperpanjangnya di Indonesia. Biasanya proses menunggu visa kerja ini yang lama karena waktunya tidak dapat ditentukan. Mmenurut pengalaman biasanya sekitar sepuluh hari tapi pernah pula sampai satu bulan lebih. Ketika berkunjung ke Balai AKAN di Nunukan dapat ditemui tenaga kerja yang sudah menunggu keluarnya visa kerja selama hampir 2 bulan.

Untuk tidak menunggu terlalu lama, ada beberapa PJTKI yang memberangkatkan tenaga kerja dari daerah asal, seperti misalnya PJTKI Andromeda, setelah semua urusan surat-surat atau dokumen-dokumen yang harus dibawa calon tenaga kerja selesai semuanya. Dengan demikian mereka tidak terlalu lama menunggu baik di Nunukan ataupun di tempat penampungan sementara di daerah asalnya. Transportasi yang digunakan untuk mengantar mereka ke Nunukan biasanya dengan kapal-kapal reguler yang tersedia. Oleh

karena itu kadang-kadang pihak PJTKI harus merencanakan jadwal keberangkatan tenaga kerja dengan jadwal kapal yang akan berangkat ke Nunukan. Kalau waktunya bersamaan dengan selesainya visa kerja maka tidak menemui masalah dalam arti mereka tidak perlu menunggu terlalu lama di Nunukan. Akan tetapi kalau sampai di Nunukan visa kerja belum didapatkan maka mereka harus dengan rela menunggu. Akibat dari lamanya menunggu visa kerja menurut informasi banyak terjadi kasus tenaga kerja yang melarikan diri. Mereka akhirnya mencari kerja dengan melalui calo untuk bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja ilegal. Demikian pula halnya dengan tenaga kerja yang sudah bekerja di Malaysia, ketika tiba saatnya untuk memperpanjang visa kerja, mereka merasa enggan sehingga akhirnya mereka tidak dilengkapi dokumen resmi untuk bekerja dan menjadi tenaga kerja ilegal. Selain mereka enggan untuk mengurus visa kerja, terkadang dari perusahaan dimana mereka bekerja tidak memberi ijin. Oleh sebab itu apabila ada Konsul Jendral Malaysia di wilayah Kalimantan Timur yang misalnya ditempatkan di Tarakan, Samarinda atau Balikpapan tentunya akan lebih memudahkan untuk mengurus visa kerja.

Selain mobilitas penduduk ke Malaysia yang merupakan tenaga kerja resmi dengan melalui ketentuan atau peraturan yang berlaku, terdapat pula mobilitas tenaga kerja tidak resmi ke Malaysia khususnya ke Negara bagian Sabah. Walaupun dalam kenyataannya Negara Bagian Sabah sudah tidak menerima tenaga kerja, namun kedatangan

tenaga kerja yang tidak resmi, diterima bekerja dengan senang hati oleh para pemilik perkebunan atau perusahaan lainnya. Bagi pihak pengusaha di Sabah tampaknya mereka lebih senang menggunakan tenaga kerja ilegal karena gajinya lebih murah dan tidak diberi beban pembayaran pajak-pajak tertentu. Selain itu juga dengan adanya tenaga kerja ilegal bisa digunakan sebagai alat untuk tetap mempertahankannya bekerja di perusahaannya. Karena bila tenaga kerja tersebut misalnya menuntut kenaikan gaji maka mereka mengancam akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk menangkapnya. Informasi mengenai kasus seperti ini banyak diungkapkan oleh para tenaga kerja yang pernah bekerja di Malaysia. Pada akhirnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa.

Fenomena pengiriman tenaga kerja ke Malaysia melalui prosedur yang tidak resmi dengan menggunakan jasa calo, sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, dan tampaknya kegiatan percaloan ini tidak dapat diberantas tuntas. Para calo sudah mempunyai semacam jaringan untuk mencari tenaga kerja yang dibutuhkan di Negara Bagian Sabah. Hal ini seperti diungkapkan oleh seorang mantan calo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sebelumnya dia bekerja di perkebunan di Malaysia sejak tahun 1959 sampai akhirnya dipercaya untuk mencari tenaga kerja ke daerah asalnya. Pekerjaan ini dilakukannya sampai tahun 1976 dan sekarang sudah hidup layak dengan memiliki kebun yang luas di Pulau Sebatik.

Peranan calo sangat besar dalam hal mencari tenaga kerja di daerah asal. Mereka selalu berusaha untuk menarik perhatian penduduk dengan informasi pekerjaan dan keadaan di Malaysia yang baik-baik bahkan cenderung dilebih-lebihkan sehingga penduduk tertarik untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia. Dalam hal penampilan diri saja mereka sudah tampak berbeda, mereka menggunakan pakaian yang bagus dengan perhiasan-perhiasan gelang dan kalung emas. Dalam kesempatan wawancara dengannya diungkapkan sebagai berikut

“Dulu sering pulang ke Sulawesi bodohin teman-teman, pulang ke Sulawesi pakai aksesoris untuk cari orang, tidur di hotel. Untuk itu dikasih company 1 kepala 10 ringgit. Dulu misalnya disuruh cari 100 orang, 30 orang yang urus surat, 70 orang yang selundupkan. Ada yang dukung di Tawau, company yang bayar, tauke semua yang kasih biaya”.

Pada waktu itu keadaannya belum sebaik sekarang, dalam arti masih ada kelonggaran-kelonggaran untuk menjadi tenaga kerja dimana prosesnya lebih mudah dibandingkan situasi sekarang ini. Dulu membawa tenaga kerja ke Malaysia tanpa dipungut biaya. Pada waktu itu kebanyakan orang yang ke Malaysia memakai *reset*, yaitu surat keterangan sementara dari imigrasi. Setelah enam bulan di sana mereka membuat *IC*, dengan syarat berkelakuan baik. Pada saat itu masih jarang tenaga kerja ilegal yang ditangkap pihak berwajib, sedangkan sejak tahun 1990 mulai digalakkan operasi penangkapan tenaga kerja ilegal.

Calo-calo tidak hanya mencari tenaga kerja asal Sulawesi saja akan tetapi juga di Nusa Tenggara Timur. Proses percaloan tampaknya lebih diminati oleh tenaga kerja dari Nusa Tenggara Timur. Tenaga calo tersebut bisa saja orang dari tempat asalnya akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang diluar daerah asalnya. Informasi tentang calo sudah mereka dapatkan dari orang-rang yang sudah pernah ke Malaysia sebelumnya. Mereka mempercayakan pengurusan keberangkatan ke Malaysia kepada calo karena dianggap lebih mudah dan cepat dapat pekerjaan, walaupun mereka tahu bahwa hal tersebut tidak melalui proses yang benar. Selain calo, diantara mereka sebenarnya ada yang bisa mengurus sendiri surat-surat yang dibutuhkan. Mereka sudah tahu cara-cara yang harus ditempuh karena sudah berkali-kali ke Malaysia. Biasanya kalau mereka pulang ke daerah asalnya di Flores ketika kembali lagi ke Malaysia membawa beberapa teman. Yang sering tertipu oleh para calo adalah orang yang baru pertama kali pergi ke Malaysia, karena memang belum berpengalaman sama sekali. Mereka yang melalui prosedur 'jalan pintas' adalah mereka yang ingin cepat ke Malaysia dan cepat bekerja, dan bagi mereka yang penting adalah sampai di Malaysia.

Bagi mereka yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, ada dua cara untuk datang ke Nunukan. Pertama dengan menyewa kapal dan kedua dengan menggunakan kapal Awu. Mereka yang menyewa kapal biasanya sudah dikoordinir oleh calo yang memang sengaja mencari di daerah asal, sedangkan mereka yang dengan kapal Awu biasanya

mempunyai kenalan atau keluarga yang nanti akan menjemput di Nunukan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka berangkat sendiri atau berkelompok tanpa sanak saudara atau kenalan di Nunukan. Mereka hanya memiliki informasi tentang Nunukan dan Malaysia yang mereka dapatkan di daerah asalnya. Diantara mereka yang datang ke Nunukan juga ada yang sudah berapa kali pulang pergi.

Suatu pemandangan yang menarik dapat kita lihat pada waktu kapal Awu datang merapat di pelabuhan Nunukan. Sudah banyak orang yang datang untuk menjemput kenalan atau kerabatnya. Ketika kapal datang merapat dan para penumpang mulai turun nampak orang sibuk, masing-masing mencari kerabat atau kenalannya. Dari hasil pengamatan memang banyak orang-orang dari NTT yang datang dan sudah dijemput oleh kerabat atau kenalannya. Pemandangan yang menarik dapat kita jumpai pula pada malam hari setelah kedatangan kapal Awu. Banyak studio foto dikunjungi oleh orang-orang untuk membuat foto dirinya yang diperlukan untuk membuat KTP. Setelah itu, pada hari-hari selanjutnya tampak Kantor Imigrasi ramai dikunjungi orang untuk membuat pas lintas batas atau paspor. Hal ini diakui oleh petugas imigrasi, bahwa biasanya permintaan pembuatan pas lintas batas atau paspor tersebut cenderung meningkat setelah ada kapal datang merapat di pelabuhan Nunukan.

Hari-hati selanjutnya, di pelabuhan Nunukan akan ramai pula dengan penumpang yang hendak pergi ke Tawau. Untuk melayani penumpang yang hendak ke Tawau, tiap hari ada tiga (3) kapal yang

beroperasi. Dua kapal langsung melayani rute Nunukan-Tawau yaitu Kapal Samudera Ekspres dan Saturiah serta satu lagi dari Tarakan-Nunukan-Tawau. Kapal-kapal ini juga yang biasanya mengangkut para tenaga kerja (tidak resmi) yang hendak bekerja di Malaysia. Mereka yang enggan mengurus surat-surat yang diperlukan dapat memanfaatkan jasa para calo. Mulai dari membuat KTP, PLB atau paspor dan mencari pekerjaan di Malaysia. Dalam hal ini pas lintas batas hanya digunakan sebagai syarat untuk dapat masuk ke wilayah Malaysia. Setelah dapat masuk Malaysia, sudah ada yang menjemput mereka untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan di wilayah Negara Bagian Sabah.

Cara lainnya untuk masuk ke wilayah Malaysia bisa juga dengan menggunakan paspor. Biasanya para mandor-mandor yang sudah lama bekerja di perkebunan dipercaya oleh tauke atau pemilik perkebunan untuk mencari tenaga kerja bila pulang ke Indonesia. Jadi para mandor ini minta bantuan *company* untuk mengurus paspornya sehingga tidak lewat PJTKI karena kalau lewat PJTKI harus ada *job order*. Untuk praktisnya saja, mereka bisa mencari tenaga kerja lewat mandor-mandor yang dipercaya. Dengan menggunakan paspor sebenarnya tidak bisa berlaku lama, dan setelah selesai masa berlakunya harus segera kembali. Akan tetapi mereka itu tidak akan kembali karena mereka terikat kontrak kerja di perkebunan.

Untuk mereka yang ingin langsung ke Tawau pada saat kapal-kapal besar merapat di pelabuhan Nunukan, banyak kapal-kapal kecil

atau *speedboat* yang menawarkan jasanya untuk mengantar ke Tawau. Calo-calo biasanya beroperasi di dalam kapal, pada waktu dalam perjalanan menuju Nunukan. Mereka mencari orang yang ingin pergi mencari kerja di Malaysia. Tampak bahwa jaringan percaloan dalam mencari tenaga kerja ini sangat rapi dan hal ini ditunjang oleh mandor-mandor dan tauke-tauke yang ada di Malaysia sehingga mereka bisa lolos bekerja di Malaysia tanpa susah-susah mengurus surat-surat. Mencari kerja lewat calo dianggap lebih praktis karena terkadang sudah ada semacam paket dari kampung di daerah asalnya sampai bekerja di Malaysia. Calo atau pengurus akan menampung mereka di Nunukan dan mengurus semua surat-surat yang dibutuhkan. Dalam mengurus paspor biayanya cukup mahal dan sudah tentu di atas biaya yang resmi. Untuk pembuatan paspor secara resmi biayanya sekitar Rp 97.000 tapi pada kenyataannya menurut informasi dari para pencari kerja, bisa mencapai Rp 350.000. Meskipun calon tenaga kerja sudah membayar cukup mahal, banyak pula kasus penipuan yang dilakukan oleh para calo terhadap calon tenaga kerja Indonesia. Kasus yang sering terjadi adalah mereka diterlantarkan setelah membayar biaya yang dibutuhkan oleh calo. Setelah sampai di Malaysia, ternyata tidak ada perusahaan yang menampungnya.

Dengan adanya tenaga kerja ilegal yang masuk ke wilayah Malaysia maka banyak pula tenaga kerja yang dipulangkan ke Indonesia. Mereka biasanya terjaring dalam operasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Hal itu merupakan resiko yang harus

ditanggung oleh para pekerja itu sendiri. Dalam hal ini para calo tidak bertanggung jawab. Namun demikian, banyak pula yang lolos dari penangkapan polisi setelah membayar 10 ringgit. Jadi sebenarnya kondisi seperti itu sudah sering dialami oleh para pekerja, dan yang sudah berpengalaman akan tahu apa yang harus mereka lakukan. Bagi mereka yang belum mempunyai pengalaman sama sekali, yang terjaring dalam operasi tersebut biasanya dipulangkan ke Indonesia.

Mereka yang dideportasi dipulangkan dengan menggunakan kapal dari Tawau ke Nunukan. Menurut informasi dari Kantor Imigrasi di Nunukan, dalam seminggu bisa sampai 3 kali pemulangan. Akan tetapi biasanya di Nunukan mereka sudah ada kenalan atau keluarga yang menampung. Selain itu mereka yang kembali ke Indonesia selalu diarahkan dan bagi yang tidak memiliki keluarga akan dikembalikan ke daerah asalnya dengan menggunakan kapal-kapal reguler yang ada. Ini juga menimbulkan permasalahan karena selama mereka menunggu untuk dipulangkan ke daerah asalnya, menjadi beban tanggungan pemerintah di Nunukan. Oleh karena itu muncul pula kesulitan dalam mengatasi permasalahan ini. Apabila semua orang yang dideportasi itu ditampung di Nunukan, tentu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, padahal anggaran untuk itu tidak ada. Oleh karena itu kadang-kadang untuk berlaku keras atau pengetatan dalam pengawasan orang-orang yang dideportasi tersebut sangat sulit, sehingga banyak diantara mereka kemudian dilepaskan saja. Pada akhirnya mereka akan kembali lagi ke Malaysia, karena

masih ada calo yang akan mengurus keberangkatan mereka kembali ke Malaysia.

Pada tahun 1994 di Malaysia dikeluarkan pengaturan ketenaga kerjaan, yaitu bagi para pekerja yang datang dari luar Malaysia (seperti dari Indonesia, Filipina dan sebagainya), tanpa ada permintaan dari pihak perusahaan Malaysia, tidak diperkenankan untuk datang ke Malaysia, dan bagi Penyalur Tenaga Kerja Malaysia, apabila diketahui mempekerjakan pekerja tanpa permintaan dari perusahaan yang beroperasi di Malaysia akan dikenakan denda. Kebijakan ini membawa implikasi semakin selektifnya Penyalur Tenaga Kerja di Malaysia. Namun dengan berbagai cara, tenaga kerja dari Indonesia masih terus masuk ke Malaysia, misalnya dengan menggunakan dokumen 'aspal'. Tenaga kerja dari Indonesia yang datang dianggap sebagai tenaga kerja bermasalah. Selain itu sejak tahun 1996 keluar peraturan dari pihak Malaysia yang mengatur 'pintu masuk' bagi masyarakat Indonesia menuju Malaysia, yaitu (1) pintu masuk Batam untuk wilayah Semenanjung Malaysia, dan pendatang tidak boleh keluar dari wilayah tersebut, (2) pintu masuk Entekong untuk wilayah Serawak, dan pendatang tidak boleh keluar dari wilayah negara bagian Serawak dan (3) pintu masuk Nunukan hanya untuk negara bagian Sabah dan pendatang yang masuk melalui wilayah ini tidak boleh keluar wilayah Sabah. Peraturan tersebut didasari juga dengan sistem negara bagian yang ada di wilayah Malaysia yang mempunyai otonomi tersendiri. Dengan keluarnya dua peraturan tersebut, membawa implikasi

terhadap semakin sempitnya ruang gerak TKI yang memasuki wilayah Malaysia.

Dari uraian mengenai proses mobilitas penduduk perbatasan, terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Khusus untuk daerah Nunukan dan Sebatik yang merupakan daerah terdekat untuk menuju Tawau atau Negara Bagian Sabah, masalah yang muncul adalah berkaitan dengan fungsi daerah tersebut sebagai daerah transit untuk menuju ke wilayah Malaysia. Banyaknya pendatang yang 'tertahan' di Nunukan dan Sebatik tentunya akan menimbulkan masalah sosial walaupun sebenarnya daerah tersebut dapat menjadi daerah kontrol terhadap mobilitas penduduk perbatasan, khususnya mobilitas tenaga kerja ke Malaysia. Untuk tenaga kerja resmi melalui PJTKI nampaknya tidak ada masalah yang berarti. Akan tetapi jaringan tenaga kerja ilegal yang memanfaatkan keberadaan calo di Indonesia berikut jaringan tauke di wilayah Malaysia menimbulkan masalah yang cukup serius. Salah satunya adalah semakin meningkatnya deportasi melalui Nunukan yang akan menimbulkan masalah baru bagi Nunukan itu sendiri sebagai daerah transit dan daerah pengembalian tenaga kerja yang dideportasi dari Malaysia.

BAB V

DAMPAK MOBILITAS PENDUDUK

Oleh: Aswatini

Mobilitas penduduk dapat dianggap sebagai suatu respon terhadap adanya ketidak seimbangan sumber daya antara dua daerah, daerah asal dan daerah tujuan. Ketidak seimbangan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan tingkat pembangunan ekonomi. Akan tetapi, faktor ekonomi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi proses migrasi karena faktor demografi, sosial, politik dan kelembagaan juga sangat berperan dalam menentukan keputusan migrasi seseorang. Adanya berbagai faktor yang berpengaruh dalam proses migrasi ini mengakibatkan dampak yang berbeda dari migrasi terhadap individu, keluarga, masyarakat serta daerah asal dan daerah tujuan migran.

Pola mobilitas penduduk di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Bulungan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu mobilitas internal dan internasional. Mobilitas internal terjadi baik karena adanya arus penduduk yang keluar meninggalkan daerah perbatasan maupun penduduk yang masuk ke Kabupaten Bulungan baik secara permanen maupun non-permanen (sirkulasi). Mobilitas internasional umumnya terdiri dari tenaga kerja yang masuk ke Malaysia melalui Kabupaten Bulungan, khususnya melalui Kecamatan Nunukan. Umumnya tenaga kerja yang pergi ke Malaysia bukanlah penduduk Kabupaten Bulungan, tetapi lebih banyak berasal dari propinsi lain di Indonesia

seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan juga dari Pulau Jawa. Kabupaten Bulungan (Kecamatan Nunukan) hanyalah merupakan daerah transit untuk tenaga kerja tersebut menyebrang ke Malaysia (Bab III). Nunukan menjadi daerah transit TKI yang akan ke Malaysia karena latar belakang sejarah, dimana sejak lama daerah ini memang menjadi pintu keluar masuk mobilitas penduduk antara Indonesia-malaysia di wilayah perbatasan ini. Dalam perkembangannya, Nunukan juga menjadi tempat dimana TKI dari berbagai wilayah di Indonesia menyelesaikan segala persyaratan untuk berangkat ke Malaysia. Sebagai daerah transit, Kecamatan Nunukan mendapat dampak langsung dari mobilitas TKI ini, baik dampak positif maupun dampak negatif.

5.1. Dampak mobilitas penduduk internal

5.1.1. Dampak terhadap daerah perbatasan

Dampak mobilitas penduduk terhadap daerah yang akan diuraikan disini mencakup daerah perbatasan itu sendiri, baik sebagai daerah asal, tujuan maupun persinggahan (transit) migran yang akan menuju Malaysia maupun terhadap daerah asal migran. Dalam Bab III telah diuraikan ada dua pola mobilitas penduduk di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur, yaitu mobilitas internal dan mobilitas internasional. Mobilitas internal dalam analisa disini dibatasi pada mobilitas penduduk dalam Kabupaten Bulungan dan mobilitas penduduk yang masuk ke Kabupaten Bulungan (dari luar kabupaten). Mobilitas internasional, dapat merupakan mobilitas permanen maupun mobilitas ulang-alik. Mobilitas permanen biasanya merupakan mobilitas tenaga kerja (TKI) baik dari Propinsi Kalimantan Timur sendiri maupun dari propinsi lain di Indonesia. Mobilitas ulang-alik

biasanya dilakukan penduduk di wilayah perbatasan untuk berbelanja, mengunjungi saudara dan kunjungan sosial lainnya.

Mobilitas penduduk dalam Kabupaten Bulungan terjadi dari daerah pedalaman dan pedalaman-perbatasan ke daerah hilir Pantai Timur, bahkan ke Malaysia. Adanya mobilitas ini yang di dorong oleh kesulitan hidup yang dialami masyarakat pedalaman berakibat pada kosongnya daerah-daerah pedalaman. Beberapa desa di wilayah perbatasan di Kalimantan Timur bahkan dikabarkan sudah hilang karena sudah ditinggalkan penduduknya yang berangsur-angsur pindah untuk mendekati fasilitas hidup yang lebih baik. Misalnya, pada tahun 1980-an terjadi eksodus dari Apo Kayan ke Tanjung Selor. Ini terjadi berbulan-bulan, dan mereka pindah untuk mendekai/mencari fasilitas. Kejadian ini menghilangkan satu kecamatan, Kayan Hilir. Selain dari itu, ada dua desa di perbatasan Kabupaten Bulungan yang tinggal nama yaitu Desa Kedjaja dan Simanggaris, dimana penduduknya sudah pergi meninggalkan desanya (informasi dari informan kunci).

Untuk daerah perbatasan (daerah asal) ini tentunya akan merupakan kelemahan. Daerah perbatasan merupakan daerah yang rawan. Kosongnya daerah perbatasan berarti kurangnya pengawasan terhadap daerah tersebut serta sumber daya yang ada. Informasi yang didapat di lapangan menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, batas negara antara Indonesia-Malaysia sudah bergeser masuk ke dalam wilayah Indonesia. Ini tentunya merupakan suatu kerugian untuk Indonesia. Pergeseran ini dimungkinkan karena kosongnya wilayah tersebut sehingga tidak ada kontrol terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang tertentu yang merugikan Indonesia tersebut. Selain dari itu, kegiatan ilegal lainnya seperti pencurian kayu akan lebih bebas dilakukan. Meskipun pengawasan dari aparat yang berwenang tetap dilakukan, tetapi luasnya wilayah perbatasan dan terbatasnya tenaga

dan biaya menyebabkan kurang efektifnya pengawasan. Penduduk di wilayah perbatasan, karena mereka menetap, dapat merupakan 'pengawas' setiap saat dan mata bagi petugas dalam mengamankan daerah perbatasan.

Mobilitas masuk ke Kabupaten Bulungan dapat terdiri dari penduduk yang datang secara spontan (*spontaneous migration/voluntary migration*) maupun yang datang melalui program transmigrasi. Program transmigrasi dengan penempatan di Jelarai tampaknya kurang berhasil. Ini dapat dilihat dari hasil observasi yang menunjukkan sepiunya daerah transmigrasi dan banyak diantara para transmigran yang meninggalkan daerahnya karena mencari pekerjaan di daerah lain (kota). Arus mobilitas penduduk yang masuk ke Kabupaten Bulungan dari Propinsi lain yang terbesar adalah dari Sulawesi Selatan, yang umumnya terdiri dari Orang Bugis. Mereka datang ke Kabupaten Bulungan sudah sejak lama. Karena itu, di daerah penelitian di Kecamatan Nunukan dan Sebatik, sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Bugis. Mereka umumnya sudah menjadi pengusaha dan petani kebun yang cukup berhasil. Keturunan dari pendatang Bugis yang pertama di Kecamatan Sebatik bahkan sudah menjadi Kepala desa secara turun temurun di salah satu desa di sana. Kedatangan Orang Bugis, khususnya ke Kecamatan Sebatik sangat berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, baik melalui usaha perdagangan dan usaha jasa lainnya seperti penginapan, hotel maupun usaha perkebunan coklat.

5.1.2. Dampak terhadap individu dan masyarakat.

Bagi penduduk daerah perbatasan di Kabupaten Bulungan, mobilitas mereka meninggalkan daerahnya (desanya) dilakukan untuk mendekati fasilitas pelayanan umum yang sangat terbatas di daerah perbatasan. Dengan demikian, ini akan memberi dampak positif untuk kehidupan mereka. Selain dari itu, untuk Suku-suku Dayak di pedalaman, mobillitas tersebut memang sudah mereka lakukan secara turun temurun karena mengikuti sistim pertanian perladangan yang sudah mereka terapkan secara turun temurun. Dengan demikian, ini juga membawa konsekuensi ekonomi untuk kehidupan mereka. Selain dari itu, dengan lebih dekatnya mereka kepada fasilitas pelayanan sosial, akan berdampak terhadap pendidikan anak, kesehatan dan kehidupan sosial mereka lainnya.

Bagi migran dari luar Kabupaten Bulungan, khususnya mereka yang berasal dari Sulawesi Selatan, migrasi ke Bulungan merupakan salah satu usaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Meskipun tidak semua cerita mereka berakhir dengan baik, umumnya Orang-orang Bugis di Kecamatan Nunukan dan Sebatik termasuk kelompok penduduk dengan tingkat ekonomi yang lebih baik dibandingkan penduduk asli (Orang Tidung). Pada awal kedatangan mereka ke Bulungan, kehidupan mereka cukup sulit. Tetapi tanah yang tersedia untuk diolah cukup luas dan ini merupakan kesempatan yang tidak disia-siakan untuk membuka perkebunan, khususnya perkebunan coklat yang masih tetap menghasilkan sampai sekarang. Dengan keuletannya, pendatang Bugis dari Sulawesi Selatan merupakan kelompok yang cukup menguasai ekonomi di wilayah perbatasan di Kecamatan Nunukan dan Sebatik.

5.2. Dampak mobilitas penduduk internasional.

Mobilitas internasional penduduk di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Bulungan dapat dikelompokkan dalam mobilitas permanan penduduk Indonesia ke Malayasia, khususnya wilayah Sabah, mobilitas ulang-alik penduduk untuk berbelanja, kunjungan keluarga dan kunjungan sosial lainnya serta mobilitas tenaga kerja dari Indonesia ke Malayasia (TKI).

5.2.1. Dampak mobilitas permanen

Seperti telah juga diuraikan dalam Bab III, mobilitas pemanen penduduk dari Indonesia ke Malayasia melalui wilayah Kabupaten Bulungan sudah terjadi sejak lama. Selain penduduk lokal Suku Dayak Kayan dan Suku Tidung, pendatang yang banyak juga bermigrasi ke Malaysia adalah Suku Bugis dari Sulawesi Selatan, orang-orang dari Jawa, Nusa Tenggara dan bahkan Sumatera. Perpindahan mereka ke wilayah Sabah sudah terjadi jauh sebelum adanya perjanjian lintas batas tahun 1967 dan karenanya mereka banyak yang sudah menjadi Warga Negara Malaysia. Adanya pola mobilitas penduduk permanen ini mengakibatkan eratnya hubungan dan kekerabatan penduduk perbatasan di kedua wilayah negara yang berbeda ini, yang dapat dilihat dari pola perkawinan dan hak ulayat tanah. Selain dari itu, adanya mobilitas permanen ini juga membuka hubungan dagang antara penduduk di kedua wilyah. Selanjutnya, adanya pola-pola hubungan tersebut berakibat pada meningkatnya arus mobilitas penduduk ulang-alik untuk kunjungan keluarga dan perdagangan.

5.2.2. Dampak mobilitas ulang-alik

Mobilitas ulang-alik penduduk wilayah perbatasan yang akan dibahas terutama antara wilayah Kecamatan Nunukan dan Sebatik dengan wilayah Sabah khususnya Tawau. Mobilitas ulang alik yang banyak dilakukan penduduk Indonesia dari Nunukan dan Sebatik umumnya dilakukan penduduk setempat untuk kunjungan keluarga, ekonomi (menjual hasil produksi dan berbelanja) serta kunjungan 'pesiar'. Penduduk dari wilayah Malaysia, khususnya Tawau ke Indonesia (Nunukan dan Sebatik) juga dilakukan untuk tujuan yang sama.

Adanya arus mobilitas ulang alik, dengan berbagai tujuan berdampak terhadap terhadap daerah dan kehidupan masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur. Mobilitas ulang-alik penduduk perbatasan ini terutama berdampak terhadap pertumbuhan daerah perbatasan Nunukan dan Sebatik di Indonesia. Nunukan dan Sebatik (terutama Sebatik) termasuk dua daerah terpencil kalau dilihat dari lingkungan geografis negara Indonesia umumnya dan Propinsi Kalimantan Timur khususnya. Kecamatan Sebatik belum dapat dilayani komunikasi telepon dan alat transportasi yang dapat menghubungkan daerah tersebut dengan daerah luar hanya transportasi laut, secara teratur hanya dari Tarakan. Tawau merupakan kota yang sangat jauh lebih maju dibandingkan Nunukan dan Sebatik. Dengan demikian, adanya mobilitas ulang alik penduduk Nunukan dan Sebatik, dengan berbagai tujuan jelas sangat berpengaruh terhadap 'hidupnya' kedua daerah tersebut.

Mobilitas ulang-alik yang bertujuan ekonomi, baik di Nunukan dan Sebatik menyebabkan banyaknya dijumpai barang-barang berasal dari Malaysia. Barang-barang ini dapat masuk secara legal maupun

ilegal. Dari sudut pandang pendapatan daerah banyaknya barang-barang luar yang masuk secara ilegal tentunya merugikan, karena tidak ada masukan untuk pendapatan daerah. Tetapi, dari sudut pandang kehidupan masyarakat daerah, ini merupakan salah satu kegiatan (mata pencaharian) yang dapat mereka lakukan untuk menunjang kehidupan mereka.

Terutama untuk wilayah Kecamatan Sebatik, lebih sulitnya hubungan antara kedua daerah tersebut dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia dibandingkan dengan Tawau, mengakibatkan ekonomi daerah ini sangat tergantung kepada Tawau. Hampir semua jenis barang kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat di Sebatik berasal dari Tawau. Akibatnya, harga-harga barang semua juga didasarkan perhitungan harga 'Ringgit Malaysia', sebab pedagang di Sebatik harus memperhitungkan keuntungan berdasarkan harga beli barang di Tawau. Mata uang yang digunakan juga dua macam, yaitu 'Rupiah Indonesia' dan 'Ringgit Malaysia'. Ini, meskipun kurang disadari masyarakat setempat, sebenarnya sangat berpengaruh terhadap 'sikap mental' masyarakat perbatasan tersebut. Seperti contohnya, dapat digambarkan dari pengalaman di lapangan: pedagang (barang kebutuhan sehari-hari) di Sebatik merasa bangga menyatakan bahwa semua barang-barang dagangannya adalah 'Barang Malaysia'. Selain dari itu, setiap pembicaraan tentang harga selalu dibicarakan dengan 'Ringgit Malaysia' dan baru ketika ditanyakan tentang 'Rupiah' mereka menjelaskannya dalam 'Rupiah'. Keadaan ini tidak dapat dihindari karena memang kehidupan ekonomi mereka sangat tergantung pada wilayah Tawau di Malaysia.

Selain karena arus mobilitas ulang-alik yang cukup besar, sarana komunikasi juga mempengaruhi sikap mental masyarakat tersebut. Sebagai contoh, di Sebatik ada stasiun relai TVRI. Tetapi,

siaran TVRI tidak dapat ditangkap kecuali jika penduduk menggunakan parabola. Ini disebabkan karena pemancar televisi Malaysia lebih kuat sehingga menghalangi penyiaran TVRI. Akibatnya, bagi penduduk umumnya yang tidak memiliki parabola, acara televisi yang dapat mereka lihat (tangkap) adalah acara televisi Malaysia dan Singapura. Ini tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan mereka tentang perkembangan di wilayah Indonesia lainnya. Mereka akan lebih mengenal perkembangan di negara tetangga. Meskipun kadang-kadang ada pemberitaan tentang Indonesia melalui siaran televisi Malaysia dan Singapura, ini, seperti dikemukakan oleh informan kunci setempat dan berdasarkan pengalaman peneliti menyaksikan acara televisi Malaysia di Sebatik, banyak mengandung pemberitaan yang kurang akurat. Dengan demikian, siaran tersebut dapat menyesatkan.

Penduduk dari Malaysia (Tawau khususnya) yang datang ke Nunukan dan Sebatik umumnya juga untuk kunjungan keluarga, hubungan dagang dan 'melancong'. Kelompok pendatang ketiga (melancong) ini mempunyai potensi dampak negatif, yaitu tumbuhnya pelacuran terselubung. Hasil observasi di Sebatik menunjukkan bahwa praktek pelacuran masih terselubung dalam arti tidak ada lokalisasi tetapi diakui masyarakat bahwa praktek tersebut ada. Umumnya kegiatan ini di 'jalankan' melalui tempat-tempat hiburan seperti karaoke dan tempat penginapan (hotel). Pengalaman peneliti membuktikan bahwa praktek terselubung ini memang ada, dalam kaitannya dengan kunjungan 'melancong' pendatang dari Tawau. Karena daerah perbatasan, khususnya Sebatik sangat dekat dengan Tawau, keadaan ini sangat perlu diantisipasi dalam kaitannya dengan penyebaran Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS. Pembangunan di Sebatik yang menuju pada pertumbuhan daerah

sebagai daerah pariwisata harus memperhatikan kemungkinan ini. Selain dari itu, dengan kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini, harga-harga di Indonesia akan dirasakan relatif murah. Ini mungkin akan berdampak terhadap meningkatnya kedatangan ‘pelancong’ dari Tawau tersebut.

5.2.2. Dampak mobilitas tenaga kerja internasional

Mobilitas tenaga kerja (TKI) merupakan fenomena yang sangat penting di daerah perbatasan ini meskipun sebagian besar pelaku mobilitas bukan penduduk daerah perbatasan. Karena itu, dampak mobilitas tenaga kerja ini akan dibahas secara lebih mendalam dengan melihat secara khusus dampak terhadap daerah : Nunukan sebagai daerah transit, Tawau (dan sabah) sebagai daerah tujuan dan beberapa daerah asal TKI. Sebatik, meskipun merupakan daerah yang paling dekat dengan Tawau, kurang berperan sebagai daerah transit TKI. Ini mungkin sangat berhubungan dengan sejarah pertumbuhan daerah. Nunukan sudah lebih dahulu berkembang dan menjadi tujuan migran dari luar Kalimantan Timur. Sarana transportasi yang lebih mudah dan lengkap juga menyebabkan Nunukan lebih berperan sebagai daerah transit, sedangkan sarana administratif di Nunukan memang berkembang dan disesuaikan untuk menunjang besarnya arus mobilitas tenaga kerja dan barang yang terjadi. Perkembangan sarana transportasi laut antara pulau-pulau, khususnya untuk Kawasan Timur Indonesia juga merupakan salah satu sebab meningkatnya arus mobilitas tenaga kerja yang menuju Malaysia melalui perbatasan Kabupaten Bulungan. Salah satu propinsi pengirim tenaga kerja ke Malaysia yang terbesar dari Indonesia adalah dari Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang ini ada transportasi laut, yaitu kapal laut

yang berlayar langsung dari Maumere di Pulau Flores menuju Nunukan.

Dampak terhadap daerah transit, daerah tujuan dan daerah asal
Daerah transit

Sebagai sebuah daerah transit, daerah Nunukan sangat sensitif terhadap berbagai dampak sosial sebagai akibat dari adanya perkembangan di wilayah Malaysia. Dampak ini dapat berupa dampak positif bahkan seringkali merupakan dampak negatif terhadap kehidupan sosial di daerah Nunukan. Dampak positif yang diterima daerah Nunukan berupa pendapatan di sektor jasa kontribusinya sangat kecil jika dibandingkan dengan harga sosial yang harus dibayar oleh masyarakat dan aparat di daerah tersebut.

Sebagai daerah transit, kehidupan ekonomi daerah Nunukan sangat berhubungan erat dengan arus mobilitas TKI yang melalui Nunukan. Besarnya arus mobilitas ini mendorong tumbuhnya sektor jasa seperti penginapan dan rumah makan. Pada waktu kapal-kapal besar masuk ke Pelabuhan Nunukan, ribuan penumpang datang dan pergi dari Nunukan. Mereka yang datang biasanya tinggal beberapa hari untuk menunggu angkutan (atau kesempatan) untuk pergi ke wilayah Malaysia. Dengan demikian, pada saat itu sektor jasa penginapan dan rumah makan dapat mengambil keuntungan dari kondisi ini. Dengan demikian ini berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk.

Suatu hal yang menarik di Nunukan adalah perbedaan kehidupan siang dan malam. Ketika kapal besar bersandar, pada malam hari kehidupan sangat ramai. Hampir diseluruh pelosok kota Nunukan warung-warung makan dan penginapan terlihat ramai. Tetapi keesokan harinya, pagi dan siang hari, suasana kota terlihat 'lengang'.

Menurut beberapa informan, sebagian dari pendatang transit tersebut ada yang langsung berangkat ke wilayah Malaysia pada malam itu juga, terutama yang pergi secara ilegal. Sebagian dari mereka yang masih tinggal biasanya selama siang hari lebih banyak tinggal dan tidur di penginapan. Hal lain yang menarik, setelah kapal besandar adalah ramainya Kantor Imigrasi dan pelabuhan pemberangkatan penumpang ke Tawau. Ini jelas menunjukkan bahwa ramainya pendatang ke Nunukan adalah hanya untuk tujuan transit dan pengurusan surat-surat untuk menyebrang ke Malaysia. Dari segi pendapatan daerah, ini merupakan pemasukan yang tidak kecil.

Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain meningkatnya kondisi rawan karena timbulnya berbagai tindakan kejahatan seperti perkelahian, penggunaan obat-obat terlarang, timbulnya tempat-tempat hiburan malam yang berpotensi pada praktek pelacuran, pencurian serta berbagai masalah yang dihadapi pemerintah daerah. Karena banyaknya pendatang, yang umumnya laki-laki berusia muda, sering timbul perkelahian yang bermula dari perselisihan-perselisihan, apalagi jika ada perayaan-perayaan dan keramaian. Ini tidak jarang berakhir dengan terjadinya pembunuhan. Anak-anak muda di Nunukan juga dikatakan banyak yang terpengaruh penggunaan obat-obat terlarang yang masuk melalui Malaysia, dikenal dengan sebutan *Maradno* dan *Mado*. Selain dari itu juga ada *dadah* (narkotika) yang masuk dari Filipina (dengan jalur Filipina – Tawau – Nunukan). Banyaknya pendatang juga mengakibatkan tingginya permintaan jasa rumah makan. Di Nunukan, hampir setiap rumah makan yang agak besar menyediakan sarana karaoke, setiap malam dimulai dari jam 18.30 sampai dengan jam 12.00 malam. Tempat-tempat ini (dengan sinar lampu yang ‘tidak mencukupi’) juga berpotensi untuk berkembangnya kegiatan a susila serta perselisihan antar pemuda. Selain dari itu, di

Nunukan juga ada beberapa tempat lokalisasi. Ini juga berpotensi untuk berkembangnya PMS dan HIV/AIDS.

Banyaknya pendatang transit di Nunukan juga menimbulkan masalah yang cukup berat bagi pemerintah daerah. Untuk wilayah Sabah, deportasi TKI akan dikirim ke Nunukan. Ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menanggulangnya. Biasanya untuk sementara mereka ditampung dan dicukupi kebutuhan makannya oleh pemerintah daerah, sebelum mereka kembali ke daerah asalnya. Tetapi kemampuan pemerintah daerah untuk menanggulangi keadaan ini sangat terbatas, akhirnya mereka dilepaskan kembali. Sebagian dari mereka bahkan ada yang kemudian kembali lagi ke Malaysia secara ilegal. TKI yang karena berbagai alasan dideportasi ke Nunukan banyak yang sebelumnya sudah menjadi tahanan di Sabah. Diantara mereka tidak sedikit yang dideportasi dalam kondisi sakit, bahkan 'setengah gila'. Ini semua menjadi tanggungan Pemda Nunukan. Biasanya mereka yang sakit ini akan dikirimkan ke Puskesmas di Nunukan untuk dirawat. Tetapi yang membuat Pemda Nunukan kecewa, diantara mereka dirawat, setelah sehat kembali ada saja 'calo-calo' yang membujuk untuk kembali ke Tawau dan mereka tidak kembali ke daerah asalnya.

Masalah lebih besar dihadapi pemerintah daerah di Nunukan jika TKI dari luar daerah yang akan menuju Malaysia datang dalam jumlah yang cukup besar. Umumnya mereka belum memiliki kelengkapan surat-surat dari daerahnya dan baru akan mengurusnya di Nunukan. Keterlambatan menguruskan surat mereka akan berakibat ancaman bagi aparat yang menguruskan surat-surat tersebut, sedangkan mereka banyak yang tidak dilengkapi surat keterangan yang jelas. Dengan demikian, ada dilema yang dihadapi Pemda serta aparat yang terkait dengan pengiriman TKI ini seperti kantor AKAN. Jika

mereka dibuatkan kelengkapan surat untuk pergi ke Malaysia, sebenarnya itu hanya untuk ijin kunjungan dan bukan ijin bekerja (karena untuk bekerja harus ada *job order* dari Malaysia). Tetapi jika mereka tidak diberikan surat yang memungkinkan mereka untuk pergi ke Malaysia, mereka akan menjadi tanggungan Pemda dan bahkan mereka mengancam keselamatan aparat.

Diantara TKI ilegal yang pergi ke Malaysia juga ada yang ternyata ditipu oleh 'calo' atau 'tauke' di Malaysia. Karena kecewa diantara mereka ada yang melarikan diri dan kembali ke Nunukan. Mereka ini, menurut informasi yang dapat dikumpulkan dalam wawancara dengan informan kunci di Nunukan, karena tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukan di Nunukan, berbuat macam-macam yang cenderung meningkatkan kriminalitas dan perbuatan-perbuatan terlarang lainnya.

Situasi daerah Nunukan sangat tergantung dengan keadaan di wilayah Tawau dan Sabah umumnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung menyangkut permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan di sektor-sektor perkebunan dan kehutanan. Secara tidak langsung adalah berhubungan dengan aktivitas ekonomi di Tawau dan Sabah, misalnya usaha *bantalan* (kayu). Pada masa jayanya usaha *bantalan* di Tawau (Sabah), akibatnya juga dapat dirasakan di Nunukan. Banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap usaha *bantalan* juga berarti bertambah ramainya Nunukan sebagai daerah transit. Tetapi ini juga diiringi dengan akibat sampingannya seperti kegiatan prostitusi, perkelaheian dan pencurian barang-barang.

Banyaknya TKI yang transit di Nunukan juga berdampak negatif terhadap kebersihan lingkungan. Umumnya karena para pendatang ini hanya untuk sementara tinggal di Nunukan, mereka tidak mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kebersihan

lingkungan di Nunukan. Hal ini sangat dikeluhkan oleh aparat Kecamatan Nunukan yang merasa itu sebagai hal yang sangat merugikan.

Daerah tujuan

Saat ini daya serap tenaga kerja di Malaysia khususnya di Negeri Bagian Sabah sudah tidak terlalu besar dibandingkan dahulu. Kesempatan yang ada sebelumnya adalah di sektor kehutanan dan sektor perkebunan, selain sektor jasa seperti pembantu rumah tangga. Berkurangnya daya serap di sektor kehutanan terjadi karena untuk daerah perbatasan Malaysia menganut sistem tebang habis hutan, yang selanjutnya dikembangkan menjadi perkebunan. Sementara sektor kehutanan berkurang kontribusinya, digantikan dengan sektor perkebunan, terutama perkebunan kakao dan kelapa sawit. Sektor inilah yang sampai sekarang masih dapat memberikan kesempatan kerja kepada TKI, meskipun semakin berkurang terus, apalagi dengan kondisi krisis ekonomi seperti ini. Tentunya pemerintah Malaysia akan mengutamakan penyerapan tenaga kerja dari daerahnya.

Dampak dari sistem tebang habis yang dilakukan di Malaysia adalah semakin berkurangnya persediaan kayu di wilayah Malaysia. Ini memicu pengambilan/pencurian kayu illegal di wilayah Indonesia oleh para pengusaha Malaysia. Modus operandi dari para pengusaha ini adalah membayar orang-orang Indonesia untuk mengambil kayu di wilayah Indonesia, sehingga kalau terjadi penangkapan oleh pihak keamanan Indonesia, sebetulnya yang ditangkap adalah orang-orang Indonesia juga. Bagi Malaysia, khususnya Negara Bagian Sabah, tersedianya tenaga kerja macam ini sangat menguntungkan. Umumnya TKI tersebut mendapat upah relatif murah dibandingkan tenaga lokal

setempat. Ini akan melipat gandakan keuntungan daerah Sabah, sebab selain mereka tidak dirugikan dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan penebangan hutan secara liar, mereka juga membayar tenaga kerja cukup murah dan tidak menanggung risiko lainnya.

Sebagaimana daerah perbatasan umumnya, penyelundupan juga banyak terjadi antara Indonesia-Malaysia, di wilayah perbatasan ini. Beberapa informan di Nunukan menyatakan bahwa dapat dikatakan Kota Tawau hidup karena Indonesia. Banyaknya kayu, rotan dan hasil hutan lainnya yang diselundupkan ke Tawau merupakan salah satu kegiatan yang menghidupkan kota Tawau. Selain dari itu, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Nunukan dan Sebatik juga banyak menggunakan barang-barang Malaysia yang dimasukkan melalui Tawau. Hasil-hasil dari Indonesia yang berkualitas seperti ikan Kerapu banyak dijual hidup-hidup ke Tawau untuk di eksport ke Hongkong. Ini tentunya memberikan pula pemasukan bagi Tawau sebagai pelabuhan persinggahan untuk eksport (produksi dari Indonesia).

Daerah asal

Dampak terhadap daerah asal disini akan diuraikan berdasarkan hasil studi PPT-LIPI dengan ANU di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT merupakan salah satu daerah pengirim TKI terbesar ke Malaysia, salah satunya dengan melalui Nunukan. Banyaknya TKI asal NTT dapat dilihat ketika kapal Awu yang melewati Maumere bersandar di Nunukan. Pada saat itu, ratusan orang, bahkan mungkin ribuan, penumpang dengan wajah khas Timor turun di Nunukan. Sebaliknya, sejumlah yang sama juga naik (untuk kembali) ke kapal

yang akan kembali lagi ke Maumere, dengan melewati beberapa kota lainnya.

Studi di desa asal TKI di Kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa secara ekonomi, mobilitas TKI dari NTT ke wilayah Malaysia ini membawa dampak positif. Dapat dikatakan bahwa hampir semua keluarga dimana paling sedikit ada satu anggota keluarganya yang bekerja di Malaysia (dan juga Brunei Darussalam) di desa yang diteliti, mempunyai rumah tembok Migrasi TKI ini juga mempunyai dampak terhadap pembangunan di desa asal migran. Penduduk yang bekerja diluar negeri biasanya juga mengumpulkan dana untuk pembangunan fisik di desa asalnya seperti untuk pembangunan gereja, atau untuk pengadaan air bersih (Raharto, 1997).

Dampak negatif terhadap daerah asal dapat dilihat dari berkurangnya tenaga kerja laki-laki di sektor pertanian. Untuk masa-masa tertentu, kegiatan pertanian di desa asal di Flores Timur memang sangat terbatas karena terbatasnya lahan pertanian yang subur dan dapat ditanami sepanjang tahun. Tetapi, secara umum kekurangan tenaga kerja laki-laki di bidang pertanian berarti menambah beban perempuan untuk lebih banyak terlibat dalam kegiatan pertanian.

Dampak terhadap individu dan keluarga tenaga kerja

Kebanyakan TKI yang mencari pekerjaan di Malaysia terpaksa melakukannya karena tekanan ekonomi. Terbukanya kesempatan kerja di Malaysia menarik mereka untuk mencoba mengadu nasibnya di sana. Untuk individu TKI, dampak positif yang didapat dari migrasi yang dilakukannya adalah peningkatan pendapatan dibandingkan dengan di daerah asal mereka. Dengan demikian, ini juga meningkatkan status ekonomi mereka dan keluarganya. Tetapi, selain

dampak positif, terdapat pula dampak negatif terhadap individu TKI yang terutama dialami oleh TKI ilegal.

Banyak diantara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berangkat ke Malaysia adalah mereka yang berangkat dengan dokumen 'Aspal' (Asli Tapi Palsu). Disebut dokumen 'Aspal' karena semua dokumen yang digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia (pasport) adalah asli. tetapi dengan pasport tersebut sebenarnya pendatang ke Malaysia tidak boleh bekerja dan hanya diijinkan tinggal selama satu bulan di Malaysia. Karena sesampainya di Malaysia para TKI tersebut bekerja, mereka merupakan tenaga kerja ilegal. Selain dari itu, setelah masa ijin tinggal mereka habis, biasanya mereka tetap tinggal dan bekerja di Malaysia. Ini menambah derajat status ilegal mereka di Malaysia.

Karena statusnya yang ilegal, TKI ini sangat rentan terhadap masalah dan sistem peraturan di Malaysia. Secara periodik, Pemerintah Malaysia mengadakan operasi (razia). Biasanya banyak tenaga kerja ilegal yang tertangkap. Hasil dari operasi ini, dapat berupa penahanan TKI yang tidak mempunyai surat-surat keterangan atau karena ijin tinggalnya sudah habis. Dalam tahanan ini, seperti dikatakan oleh beberapa informan, tidak jarang terjadi pemukulan dan penyiksaan terhadap TKI. Keadaan ini sering berakibat pada gangguan kesehatan dan tekanan jiwa yang berat yang menyebabkan TKI tersebut kehilangan ingatannya. Dengan demikian, ketika mereka dideportasi (untuk yang berasal dari Sabah di deportasi ke Nunukan), sampai di Nunukan ada diantara mereka yang masih menderita kehilangan ingatan dan dalam keadaan sakit seperti kelumpuhan. Ini merupakan 'harga yang sangat mahal' yang dibayar oleh TKI untuk dapat bekerja di Malaysia.

Karena statusnya yang ilegal, para TKI juga sering menjadi korban pemerasan dan penipuan para calo dan tauke. Umumnya upah

yang diterima TKI lebih kecil dibandingkan tenaga kerja lokal. Status mereka yang ilegal memudahkan tauke untuk melakukan penekanan dan pemerasan. Sering terjadi jika TKI menuntut haknya, mereka akan dilaporkan pada aparat setempat sehingga kemudian ditangkap (karena statusnya yang ilegal) atau karena mereka dilaporkan sebagai perusuh. Mereka ini yang sering mendapatkan pemukulan dan siksaan dalam tahanan yang berakibat pada kesehatan mereka. Mereka kemudian di deportasi ke Indonesia. Ini menguntungkan dan memang disengaja, tauke karena menjadi tidak harus membayar upah TKI untuk pekerjaannya selama jangka waktu tertentu yang sudah dijalaninya. Ada pula calo-calo yang sudah mengambil lebih dahulu upah para TKI ini sehingga ketika TKI menanyakan tentang upah kerjanya pada tauke ternyata sudah 'dibawa lari' oleh calo yang membawa mereka bekerja ke tempat tersebut. Banyaknya TKI yang di deportasi ke Nunukan, seperti telah diuraikan sebelumnya, membawa dampak terhadap meningkatnya kerawanan sosial di Nunukan. Para TKI yang di deportasi tersebut, sebagian ada yang kembali ke daerah asalnya. Tetapi tidak sedikit yang merasa malu untuk kembali ke daerah asalnya dan memaksakan diri untuk kembali lagi ke Malaysia dan bekerja apa saja, tentunya dengan upah yang rendah.

Dampak positif yang dapat dirasakan keluarga adalah adanya kiriman uang dari para TKI ke daerah asalnya. Kiriman uang (*remittances*) dari Migran yang bekerja diluar negeri juga cukup besar dan sangat berarti bagi kehidupan keluarga yang ditinggalkan. *Remittances* ini biasanya mulai dikirimkan dua atau tiga kali setahun. Jumlah *remittances* rata-rata RP 95.000,-/bulan. Ketika kembali ke desanya, rata-rata TKI membawa uang sebanyak Rp 2.098.328,-. *Remittances* ini, selain digunakan untuk membangun/memperbaiki

rumah umumnya digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak (Goma *et al*, 1933; Romdiati, 1997).

Selain dampak positif, migrasi TKI ini juga mempunyai dampak negatif di daerah asal. Salah satu dampak negatif dirasakan oleh wanita, istri dari TKI yang ditinggalkan di desa asalnya. Untuk wanita yang sudah menikah, di desa yang diteliti di Flores Timur, kepergian suami untuk bekerja di luar negeri meninggalkannya dengan beban ganda karena mereka juga harus bekerja di kebun untuk menghidupi keluarganya, selama menanti uang kiriman dari suami-suami mereka. Untuk mengatasi masalah dalam mengolah tanah pertanian, biasanya para istri yang ditinggalkan membentuk kerja kelompok. Mereka mengolah tanah secara bergotong royong. Kehidupan keluarga akan mulai membaik ketika suami-suami mulai mengirimkan uang hasil kerja mereka ke rumah. Tetapi tidak semua TKI laki-laki mempunyai rasa tanggung jawab yang baik terhadap keluarga yang ditinggalkannya. Beberapa diantara mereka setelah mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang baik di luar negeri, ada yang menikah dengan wanita penduduk setempat, bahkan mengganti kewarga negaranya. Mereka akan membuat keluarga yang ditinggalkannya sangat menderita, karena tidak ada uang yang mereka kirimkan pulang (Raharto, 1997).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya migrasi TKI ke Malaysia melalui wilayah perbatasan Kalimantan Timur khususnya Kecamatan Nunukan dan Sebatik berdampak positif maupun negatif, baik terhadap individu, keluarga maupun daerah asal, tujuan dan daerah transit di Nunukan dan Sebatik. Dampak negatifnya, seperti diungkapkan oleh banyak informan kunci dirasakan lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Tetapi, dengan krisis ekonomi yang dialami saat ini, tidak dapat diharapkan bahwa migrasi TKI ini akan

dapat dibendung. Bahkan, ada kemungkinan jumlah TKI yang akan menuju Malaysia ini akan meningkat karena kesulitan hidup yang makin meningkat di desa-desa di daerah asal TKI, sebagai akibat dari krisis ekonomi tersebut. Malaysia sendiri juga tidak terlepas dari keadaan krisis ekonomi ini meskipun yang dialami tidak separah Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, tentunya pemerintah Malaysia akan meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja lokalnya terhadap persaingan dengan TKI, khususnya dengan memperketat peraturan dan pengaturan terhadap tenaga kerja asing yang datang. Ketatnya peraturan akan berdampak terhadap peningkatan usaha-usaha ilegal dari TKI untuk memasuki wilayah Malaysia yang berarti juga meningkatnya jumlah TKI yang rentan dan tidak terlindungi hukum di negara asing.

Masalah TKI yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terkait di Nunukan, melainkan juga menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dimana TKI berasal. Tetapi, hingga kini belum ada suatu mekanisme yang baik untuk menahan arus mobilitas calon TKI yang transit di wilayah Nunukan, sebelum mereka berangkat menuju Tawau. Kondisi ini mengharuskan adanya suatu mekanisme koordinatif antara pihak Pemerintah Daerah asal calon TKI dengan pihak Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Oleh: Aswatini

Daerah perbatasan Indonesia - Malaysia di Kabupaten Bulungan, pada umumnya terdiri dari wilayah daratan dan wilayah laut dengan karakteristik aliran barang, jasa dan orang yang berbeda. Secara umum mobilitas penduduk di daerah perbatasan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar mobilitas penduduk internal dan mobilitas penduduk internasional. Sebagai daerah perbatasan, mobilitas penduduk internal yang penting terhadap kedudukan daerah perbatasan adalah perginya penduduk meninggalkan daerah perbatasan sehingga daerah ini menjadi kosong. Ini terjadi di beberapa wilayah perbatasan di Kabupaten Bulungan yang terletak di daratan Pulau Kalimantan. Perginya penduduk meninggalkan daerah perbatasan, dari segi keamanan daerah perbatasan merupakan kelemahan. Mobilitas penduduk internasional di daerah perbatasan ini dapat dikelompokkan menjadi mobilitas tenaga kerja lokal (asal Kalimantan) dan mobilitas tenaga kerja dari berbagai daerah lainnya di Indonesia di luar Kalimantan, yang menyebrang ke Malaysia melalui daerah perbatasan tertentu yang merupakan pintu keluar-masuk arus barang dan orang seperti wilayah Kecamatan Nunukan dan Sebatik.

Arus barang antara Indonesia-Malaysia yang melalui daerah perbatasan ini terdiri dari barang konsumsi, hasil pertanian dan hasil hutan. Adanya pertalian sejarah maupun hubungan keluarga yang

terbina antara orang-orang Sabah dengan orang-orang di wilayah Indonesia mempermudah berbagai aktivitas perlintasan batas untuk keperluan tradisional, mencari kerja atau di bidang usaha perdagangan lain. Secara umum, barang dan jasa yang melewati perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada Tabel 6.1. dibawah ini.

Tabel 6.1: Arus orang, barang dan jasa dari Indonesia ke Malaysia melalui pos-pos perbatasan di Kabupaten Bulungan.

Pos Perbatasan di Indonesia	Karakteristik Batas	Daerah Tujuan di Malaysia	Tipe Aliran Barang dan Jasa
Sebatik	Laut dan darat	Tawau	Sirkulasi penduduk lokal Kalimantan dan hasil pertanian serta barang konsumsi lainnya; Tenaga kerja dari Jawa, Sulawesi,
Nunukan	Laut	Tawau	idem di atas
Krayan	Darat	Bario	Hasil hutan dan tenaga kerja lokal
Lumbis	Darat	Bantul	Hasil hutan dan tenaga kerja lokal

Penelitian ini difokuskan pada mobilitas penduduk dan barang di daerah perbatasan di Kecamatan Nunukan dan Sebatik. Luasnya daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Bulungan yang mencakup wilayah darat dan laut, mengharuskan pemilihan konsentrasi pada daerah tertentu. Kecamatan Nunukan dan Sebatik dipilih sebagai daerah fokus penelitian karena peranan penting daerah tersebut, terutama kecamatan Nunukan, sebagai daerah transit tenaga

kerja Indonesia (TKI) yang akan menuju Malaysia. masalah TKI ini sudah menjadi fokus perhatian sejak lama karena permasalahan-permasalahan yang timbul akibat fenomena ini.

Permasalahan penting yang dihadapi daerah perbatasan Nunukan dan Sebatik sehubungan dengan adanya pola-pola mobilitas penduduk di daerah tersebut antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jaringan tenaga kerja ilegal. Fenomena ini sangat penting dalam analisa permasalahan mobilitas penduduk di daerah perbatasan karena dampak langsungnya terhadap daerah transit seperti Nunukan. Sebagai daerah transit, Nunukan banyak harus menanggung dampak dari adanya TKI ilegal ini yang dirasakan sebagai beban. Timbulnya TKI ilegal ini juga sangat erat berhubungan dengan birokrasi pengurusan ijin kerja resmi di Malaysia, yang harus di urus di Konsulat Malaysia di Pontianak. Tetapi, dampak positif dari fenomena ini juga dirasakan, sebab dibandingkan dengan daerah perbatasan lainnya Nunukan lebih pesat berkembang dan lebih maju.
2. Deportasi TKI ilegal melalui Nunukan, seringkali berakibat terhadap rasa frustrasi mendalam dari tenaga kerja yang tertipu sehingga menyebabkan gangguan jiwa dan berbagai konflik sosial yang muncul seperti perkelahian. Untuk pihak pengusaha di Malaysia, tampaknya mereka cenderung memilih TKI ilegal karena upah yang dapat ditekan lebih rendah dan tidak dibebani pembayaran pajak-pajak tertentu. TKI ilegal jelas sangat rentan terhadap penipuan dan penekanan-penekanan.

3. Jaringan penyelundupan barang dan hasil hutan. Sebagaimana umumnya daerah perbatasan, penyelundupan merupakan fenomena yang biasa untuk daerah perbatasan. Selain barang-barang kebutuhan hidup, yang lebih penting dari fenomena ini adalah penyelundupan hasil hutan dari Indonesia ke Malaysia, seperti kayu dan rotan, karena nilainya yang sangat besar. Ini tentunya merupakan kerugian di pihak Indonesia.
4. Pencurian hasil hutan Indonesia karena hutan di wilayah Malaysia sudah habis dan sudah dikembangkan menjadi perkebunan. Pencurian hasil hutan ini sering diiringi dengan penggeseran batas negara antara Indonesia dan Malaysia.
5. Ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan pada pasar di Tawau. Tawau, di wilayah Malaysia merupakan pasar terdekat untuk memasarkan hasil dan membeli kebutuhan hidup masyarakat perbatasan di Sebatik dan Nunukan. Dengan demikian harga juga ditentukan oleh pasar di Tawau.
6. Penduduk lebih berorientasi pada negara tetangga Malaysia. Ini dapat dilihat dari harga-harga barang yang banyak ditentukan dengan patokan harga 'Ringgit Malaysia' (M\$). Selain dari itu, terbatasnya sarana informasi seperti siaran TVRI yang dapat ditangkap juga mengakibatkan penduduk lebih paham informasi tentang Malaysia. Terutama di Sebatik, penduduk hanya dapat menyaksikan siaran televisi Malaysia dan Singapura.

7. Dengan kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini, harga-harga di Indonesia menjadi lebih murah. Harus diantisipasi meningkatnya arus pelancong dari Tawau yang ke Indonesia serta dampak negatifnya seperti meningkatnya praktek prostitusi serta PMS.

Untuk permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat diusulkan beberapa rekomendasi, yang diharapkan akan mempunyai dampak ganda untuk mengatasi beberapa masalah:

1. Dalam usaha menahan arus migrasi TKI ke Malaysia, pembangunan daerah perbatasan Kaltim sebaiknya difokuskan pada pembukaan daerah perkebunan coklat dan kelapa sawit. Ini merupakan komoditi yang berdasarkan pengalaman petani pengusaha lokal cocok untuk daerah tersebut. Disamping itu, untuk pemasarannya juga sudah terjalin dengan pasar di Tawau. Dengan demikian ini diharapkan akan dapat menahan arus mobilitas TKI ke wilayah Malaysia, karena TKI tersebut umumnya juga bekerja di sektor perkebunan di Malaysia. Usaha ini dengan sendirinya juga akan meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan Indonesia dalam usaha mengatasi pencurian kayu dan pelanggaran tapal batas. Selanjutnya ini juga akan mengurangi dampak negatif dari adanya arus TKI ke Malaysia. Tetapi usaha ini memerlukan koordinasi lintas sektor, karena kepentingan yang berbeda antara sektor-sektor yang akan terlibat seperti misalnya Departemen Kehutanan, Transmigrasi, pengusaha HPH.
2. Untuk menahan arus mobilitas penduduk meninggalkan daerah perbatasan perlu dilakukan usaha 're grouping' desa perbatasan. Ini akan mengefektifkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat *Re-grouping* yang sekarang ini sedang

dilaksanakan di Kalimantan Timur, tampaknya akan sangat berpengaruh terhadap situasi daerah perbatasan, khususnya desa-desa yang mempunyai akses yang terdekat dengan garis batas. Konsepsi pengelompokan desa yang ada sekarang ini hendaknya hanya pada penyatuan sistem administrasi dan belum pada tingkat memindahkan penduduk (*resettlemen*) ke satu daerah dengan sistem satu desa. Konsep pengelompokan yang hanya berdasarkan konsep 'desa induk' untuk sekarang tampaknya cukup baik. Terdapat kekhawatiran apabila terjadinya peleburan desa maka penduduk di daerah perbatasan akan pindah ke wilayah Malaysia. Hal ini dapat terjadi, karena sistem desa yang dibentuk sekarang ini sebetulnya suatu formalisasi terhadap sistem keluarga luas yang mempunyai wilayah ulayat tertentu. Namun dengan adanya UU 5/1979 mengenai pemerintahan desa, maka masyarakat pedalaman pun harus mengikuti tatanan formal dengan dibentuknya desa. Dampaknya adalah muncul ratusan desa yang jumlah KK-nya mungkin dibawah 10, dan bahkan masih merupakan kumpulan orang se-kerabat. Apabila mereka dilebur menjadi satu, dikhawatirkan terjadi konflik sosial yang besar, mengingat masing-masing desa mempunyai pemimpin sendiri yang merupakan orang paling berpengaruh dalam kelompoknya.

3. Sebagai usaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat di perbatasan Nunukan dan Sebatik terhadap pasar di Tawau, pasokan kebutuhan hidup masyarakat harus ditingkatkan dengan mendatangkan kapal besar untuk mensuplai kebutuhan tersebut. Untuk usaha ini kondisi pelabuhan Nunukan sudah cukup memadai. Permasalahan sebelumnya, jika kapal barang besar masuk ke Nunukan, dikhawatirkan tidak ada cukup banyak komoditi yang

akan diangkut keluar sehingga perusahaan angkutan akan rugi. Tetapi jika usaha perkebunan di wilayah perbatasan cukup berkembang, diharapkan akan cukup banyak komoditi yang dapat dipasarkan langsung dari Nunukan tanpa melalui Tawau.

4. Untuk penyebaran informasi yang lebih baik dan memperluas wawasan serta pengetahuan masyarakat perbatasan tentang negaranya, dan dalam usaha menarik orientasi mereka lebih banyak ke negaranya, pemancar TVRI di Nunukan perlu ditingkatkan kualitasnya. Dengan demikian siaran TVRI dapat ditangkap tanpa harus menggunakan parabola.
5. Menetapkan peraturan harga barang dalam rupiah. Dengan demikian diharapkan lama-kelamaan penduduk akan terbiasa untuk mengucapkan 'rupiah' dibandingkan dengan 'ringgit'.
6. Dalam kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini, harga-harga barang di Indonesia relatif akan menjadi lebih murah dibandingkan di Malaysia. Ini merupakan kesempatan untuk memasarkan barang Indonesia di Malaysia, karena harga yang dapat bersaing (sebelumnya harga barang Indonesia dikatakan lebih mahal dari barang buatan Malaysia). Ini juga terjadi dengan pedagang di Filipina Selatan yang banyak memborong barang dari Manado, karena harganya relatif menjadi lebih murah.

DAFTAR ACUAN

- BKPMMD Kalimantan Timur, 1994. *Potensi Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan*. Samarinda: BKPMMD Kalimantan Timur
- Goma, Johana Naomi, Ida Bagoes Mantra dan R. Bintarto. 1993. 'Mobilitas tenaga Kerja Flores Timur ke Sabah Malaysia dan Pengaruhnya Terhadap daerah Asal: Studi Kasus Desa Nelereren Kecamatan Adonara Timur'. *BPPS-UGM*, 6 (4A), November 1993.
- Goss, Jon and Bruce Lindquist. 1995. 'Conceptualizing International Labour Migration: A structuration Perspective', in *International Migration Review*, Vol. 29, No. 2, pp. 317-351.
- Kantor Statistik Kabupaten Bulungan, 1996. *Kabupaten Bulungan Dalam Angka 1995*. Tanjung Selor: Bappeda Tk II Bulungan dan Kantor Statistik Kabupaten Bulungan.
- Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Timur, 1996. *Kalimantan Timur Dalam Angka 1995*. Samarinda: Bappeda Tk.I Kaltim dan Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Timur.
- Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, 1984. *Studi Sosio-Ekonomi Daerah Perbatasan: Kecamatan Nunukan*. Samarinda: Pemda Tk.I Kalimantan Timur
- , 1992. *Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa ke Masa*. Samarinda: Pemda Tk.I Kalimantan Timur

- Raharto, Aswatini. 1997. 'Pergi Melarat Untuk mencari Kehidupan yang lebih Baik'. *Penduduk dan Pembangunan Indonesia Timur. Eastern Indonesia Population and development research Project Newsletter*. Vol 3, No. 1, March 1997.
- Romdiati, Haning. 1997. 'International Return Migration and Village of Origin (A case Study in Bantala Village, Flores Timur). Penduduk dan Pembangunan Indonesia Timur'. *Eastern Indonesia Population and development research Project Newsletter*. Vol 3, No. 2, June 1997.
- Tan, Mely G. 1985. 'Masalah Perencanaan Penelitian', dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode-Metode penelitian Masyarakat*, hal. 14-43. Jakarta: Gramedia.
- Tim P3PK UGM, 1990. *Kajian Sosial Ekonomi Desa-Desa Perbatasan di Kalimantan Timur*. Samarinda: Bappeda Tk.I Kalimantan Timur dan P3PK UGM.

